

ANALISIS PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PT. BANK SULUTGO)

Fernie Lydia Toar¹, Daisy S.M. Engka², Mauna Th.B. Maramis³

Program Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: fernietoar061@student.unsrat.ac.id, daysiengka@unsrat.ac.id, maunabeatrix@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa pengaruh penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada BUMD (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara (2) menganalisa pengaruh penerimaan Deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada BUMD (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara. (3) menganalisa pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan dari instansi-instansi terkait, menggunakan data *time series* dengan jangka waktu tahun 2011 – 2020. Variabel yang digunakan untuk meneliti adalah dua variabel independent yaitu Penyertaan Modal dan Deviden, serta satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda melalui program *Eviews 8*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel penyertaan modal berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara, (2) variabel deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara, (3) variabel penyertaan modal dan deviden secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci : *Penyertaan Modal, BUMD, Deviden dan PAD*

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the effect of the North Sulawesi Provincial Government's capital investment in BUMD (especially PT. Bank SulutGo) on North Sulawesi's Original Local Government Revenue (PAD) (2) analyze the effect of North Sulawesi Provincial Government dividend receipts on BUMD (especially PT. Bank SulutGo) to North Sulawesi's Original Local Government Revenue (PAD). (3) analyze the effect of government capital investment and dividend income together on Regional Original Income.

*The type of data in this study is the type of quantitative data. The data sources in this study are secondary data sources obtained through official documents and reports from related agencies, using time series data with a period of 2011 – 2020. The variables used to examine are two independent variables, namely Capital Investment and Dividends, as well as one dependent variable, namely Original Local Government Revenue (PAD). The data analysis method used in this study is multiple linear regression through the *Eviews 8* program.*

The results of this study showed that (1) the variable of capital investment has a significant and positive effect on the PAD of North Sulawesi Province, (2) the variable of equity participation does not have a positive effect on the PAD of the Province of North Sulawesi. (3) the variable of capital investment and dividends is partially together have a significant effect on PAD.

Keywords: *Capital investment, BUMD, Dividend and PAD*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling mendasar di daerah. Agar dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan BUMD, maka sangat diperlukan jiwa *entrepreneurship* yang baik di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang saham utama BUMD/perusahaan daerah (Sudirno, dkk, 2010). Pembagian penyertaan modal dalam Posisi Investasi Permanen menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Penyertaan Modal Pemprov Sulut per tahun 2020

No	Uraian	Perusahaan	Komposisi Saham
1	Penyertaan modal pada BUMD	a) PT. Bank SulutGo b) PT. Membangun Sulut Hebat (MSH)	37,48% 83,19%
2	Penyertaan modal pada Pihak Ketiga Non BUMD	a) PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) b) PT. Askrida	72,39% 0,138%

Sumber : Data BKAD Provinsi Sulut tahun 2020

Peningkatan kinerja BUMD oleh pemerintah dilakukan dengan cara menganggarkan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal BUMD melalui APBD. PT. Bank SulutGo adalah satu BUMD milik Pemprov Sulut BUMD yang memiliki peranan yang tidak kalah penting bagi pemerintah daerah. Berikut ini data mengenai penyertaan modal dan deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 2. Setoran Modal dan Deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2011-2020

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden	Persentasi
2011	89.574.600.000	23.107.361.219	25,80
2012	89.574.600.000	23.708.334.090	26,47
2013	136.656.900.000	33.010.612.361	24,16
2014	201.859.200.000	29.307.850.110	14,52
2015	233.331.000.000	33.118.647.962	14,19
2016	272.471.100.000	21.209.863.543	7,78
2017	297.471.100.000	31.027.965.309	10,43
2018	297.471.100.000	52.761.456.545	17,74
2019	352.471.100.000	64.793.439.750	18,38
2020	372.471.100.000	42.201.580.825	11,33

Sumber : Bank SulutGo, 2022

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2011 sampai dengan 2020 yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. Penerimaan PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2020

No	Tahun	Jumlah PAD (dalam ribu rupiah)
1.	2011	535.087.974
2.	2012	633.650.533
3.	2013	789.631.755
4.	2014	937.681.927
5.	2015	1.012.945.961
6.	2016	1.141.321.190
7.	2017	1.146.674.828
8.	2018	1.253.804.978
9.	2019	1.286.006.930
10.	2020	1.172.932.102

Sumber : Sulawesi Utara Dalam Angka, BPS Sulut, 2022

Tabel diatas menunjukkan perkembangan PAD Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu sepuluh tahun dengan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah sebesar Rp.535.087.974,- terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.1.286.006.930,-, tetapi di tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan jumlah menjadi Rp.1.172.932.102,- yang turut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial lainnya, dan aktivitas ekonomi, termasuk pada usaha perbankan yang didalamnya juga yaitu PT. Bank SulutGo.

Dalam pelaksanaan perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT. Bank SulutGo yang didirikan sejak tahun 1961 ini cukup memberi banyak kontribusi berupa deviden yang menjadi salah satu penyangga pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) didalam susunan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Pos ini merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah/ kabupaten dalam upaya peningkatan dan pengembangan (Kasmir; 2010). Pemerintah tidak asal memberikan penyertaan modal. Pemerintah Daerah melihat tingkat kesehatan perusahaan dan tingkat profitabilitas perusahaan daerah, karena timbal balik dari penyertaan modal yang dikucurkan pemerintah daerah ke BUMD berupa bagian laba penyertaan modal yang digunakan sebagai pengisi PAD pada setiap tahun anggarannya sebagai kontribusi Bank SulutGo terhadap PAD, seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4. Persentasi Penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo pada Pos HPKDD (dalam ribu rupiah)

Tahun	HPKDD	Deviden dari PT. Bank SulutGo	Deviden BUMD dan non BUMD lainnya	Persentasi (%)
2011	23.107.361	23.107.361	-	100,00
2012	24.433.971	3.708.334	725.637	97,03
2013	33.010.612	33.010.612	-	100,00
2014	29.410.022	29.307.850	102.172	99,65
2015	33.225.161	33.118.647	106.514	99,68
2016	45.000.000	21.209.863	23.790.137	47,13
2017	31.361.351	31.027.965	333.38	98,94
2018	52.876.760	52.761.456	115.304	99,78
2019	64.886.989	64.793.439	93.550	99,86
2020	42.255.754	42.201.581	54.173	99,87
TOTAL	379.567.981.219	354.247.111.714	25.320.869.505	93,33

Sumber : Data Olahan dari BPS Sulut dan PT. Bank SulutGo, 2022

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pada Pos HPKDD dalam PAD ini sebagian besar merupakan kontribusi dari penerimaan deviden PT. Bank SulutGo, dengan rata-rata presentasi 93,33%, bila dibandingkan dengan penerimaan deviden dari BUMD dan Non BUMD lainnya di luar PT. Bank SulutGo. Hal ini dikarenakan perolehan deviden atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah masuk dalam Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebagai salah satu komponen pembentuk PAD itu sendiri.

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Henrikus Triyanto (2015) menyatakan bahwa Penyertaan Modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Deviden secara parsial sesuai dengan hasil penelitian Rissa Amosea (2012) yang menyebutkan bahwa secara parsial laba BUMD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa hal tersebut maka menurut penulis perlu diketahui dengan jelas pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulut dan Deviden yang diterima dari BUMD, khususnya PT. Bank SulutGo atas Pendapatan Asli Daerah Sulut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank Sulutgo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menganalisa pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menganalisa pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara :
 - a. Dari hasil penelitian ini akan diketahui, seberapa besar pengaruh penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat terus meningkatkan Penerimaan Daerah.
 - b. Memberikan informasi tentang pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Memberikan informasi tentang pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Bank SulutGo :
 - a. Dari hasil penelitian akan diketahui, seberapa besar penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara, sehingga Bank SulutGo tetap dapat memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.
 - b. Dapat memperoleh informasi tentang pengaruh penerimaan Deviden sebagai kompensasi setoran modal atas investasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo, sehingga Bank SulutGo akan semakin memaksimalkan pengelolaan bisnis bank untuk peningkatan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Dapat memperoleh informasi tentang pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk mendorong usaha BUMD, khususnya PT. Bank SulutGo.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Selain itu, pendirian BUMD dapat menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Investasi

Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah" (Barata, 2004:90). Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

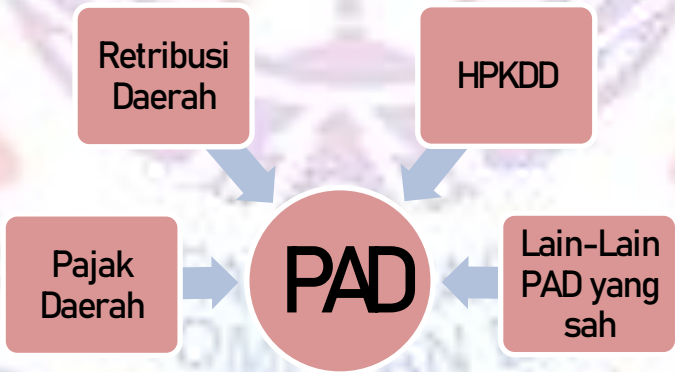
Pendapatan asli Daerah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah:

- “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”
- b. Retribusi Daerah
- Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, yakni penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa: “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari Pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Adanya kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan APBD. Selain itu, dalam kondisi APBD defisit, maka penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu alternatif pembiayaannya.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, Lain-Lain PAD yang Sah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah.
- Dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Komponen Pendapatan Asli Daerah



Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Penyertaan Modal

Menurut Balfas (2006) modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrument yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada suatu perseroan tersebut. Oleh karena saham merupakan penyertaan modal dari pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Dengan demikian besarnya kepemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap modal perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD adalah penyertaan modal daerah yang berasal dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD ini dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

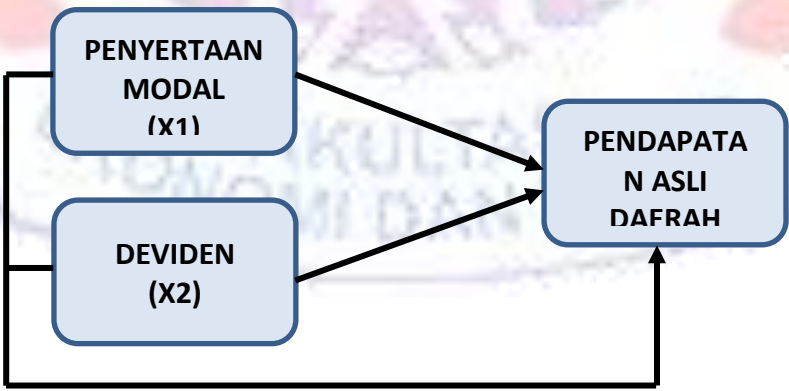
Deviden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dividen adalah bagian laba maupun pendapatan suatu perusahaan yang besarnya telah ditetapkan direksi dan disahkan dalam rapat pemegang saham untuk dibagi-bagikan terhadap seluruh pemegang saham. Definisi Dividen menurut Besley dan Brigham (2008) yaitu pembagian keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan untuk para investornya, baik laba yang didapatkan pada periode sedang berjalan maupun laba pada periode sebelumnya. Kimmel, Weygandt, dan Kieso (2011) memiliki pendapat tentang dividen yaitu distribusi suatu perusahaan terhadap investornya secara profesional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing. Maksudnya adalah para investor hanya dapat menerima laba sesuai persentase investasi mereka terhadap perusahaan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan penerimaan Deviden dari Bank SulutGo diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan teori dan kajian empiris serta model penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank Sulutgo) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara.
2. Diduga peningkatan penerimaan Deviden sebagai kompensasi setoran modal atas investasi pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada badan usaha milik daerah (khususnya PT. Bank

SulutGo berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara tahun 2011 hingga tahun 2020.

3. Diduga penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan yang diperoleh oleh instansi atau lembaga terkait, yaitu Badan Pusat Statistik, Bank SulutGo, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah data *time series*, dengan jangka waktu selama 10 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Program yang digunakan untuk pengelolaan data adalah program *Microsoft Excel* dan program *Eviews 8.0*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independent (X).

a. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah atau disingkat dengan PAD (Y). PAD diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.

b. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penyertaan Modal (X_1) adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.
2. Deviden (X_2) adalah bagian dari suatu laba yang bisa diberikan kepada para investor yang jumlahnya tergantung pada jumlah saham yang dimiliki oleh setiap investor. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakah model regresi linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu:

a. Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2009).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai toleransi dan lawannya

(2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2009).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Salah satunya adalah uji *White*. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

• H_0 : Tidak mengandung indikasi heteroskedastisitas

• H_1 : mengandung indikasi heteroskedastisitas

Jika $\alpha = 5\%$, maka tolak H_0 jika $\text{obs} \cdot R\text{-square} > X^2$ atau $P\text{-value} < \alpha$.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan dengan program *Eviews* untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Hasil yang diperoleh :

Jika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi.

Jika nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel Penyertaan Modal dan Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan, menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan data Time Series yang diolah menggunakan program *Eviews 8.0*. Formula dari Model Regresi Linier Berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + E$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi pasial untuk masing-masing X_1 dan X_2

X_1 = Penyertaan Modal Pemerintah

X_2 = Deviden

E = Faktor pengganggu

Formulasi model diatas merupakan regresi yang berbentuk linear, dan digunakannya bentuk ini karena secara teoritis variabel terikat yang akan diteliti mempunyai kecenderungan hubungan yang linier dengan masing-masing variabel bebasnya.

Pengujian Hipotesis

Uji Kesesuaian

a. Uji t-parsial (*partial test*)

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

b. Uji-F (*Over all test*)

Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen.

c. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-square*. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang diambil melalui *Annual Report* BSG dan Badan Pusat Statistik, dengan periode waktu per tahun selama 10 tahun, sejak tahun 2011 sampai dengan 2020, sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah PAD Solut, Penyertaan Modal Pemprov Solut, dan Deviden dari PT. Bank SolutGo Tahun 2011-2020

TAHUN	PAD (Variabel Y)	PENYERTAAN MODAL (Variabel X ₁)	DEVIDEN (Variabel X ₂)
2011	Rp 535.087.974.492	Rp 89.574.600.000	Rp 23.107.361.219
2012	Rp 633.650.533.000	Rp 89.574.600.000	Rp 23.708.334.090
2013	Rp 789.631.755.000	Rp 136.656.900.000	Rp 33.010.612.361
2014	Rp 937.681.927.000	Rp 201.859.200.000	Rp 29.307.850.110
2015	Rp 1.012.945.961.000	Rp 233.331.000.000	Rp 33.118.647.962
2016	Rp 1.141.321.190.000	Rp 272.471.100.000	Rp 21.209.863.543
2017	Rp 1.146.674.828.000	Rp 297.471.100.000	Rp 31.027.965.309
2018	Rp 1.253.804.978.000	Rp 297.471.100.000	Rp 52.761.456.545
2019	Rp 1.286.006.930.000	Rp 352.471.100.000	Rp 64.793.439.750
2020	Rp 1.172.932.102.000	Rp 372.471.100.000	Rp 42.201.580.825

Sumber : Pemprov Solut dan Bank SolutGo

Hasil Analisis Regresi

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT. Bank SolutGo, sebagai berikut :

Tabel 6. Statistik Deskriptif dari indeks Total PAD, Penyertaan Modal, dan Deviden dengan Data Log

	Y_PAD	X1_PENY...	X2_DEVIDEN
Mean	11.97989	11.32134	10.52218
Median	12.03150	11.40165	10.50520
Maximum	12.10924	11.57109	10.81153
Minimum	11.72843	10.95218	10.32654
Std. Dev.	0.130605	0.231444	0.157577
Skewness	-0.871961	-0.673773	0.553219
Kurtosis	2.404287	1.982063	2.263230
Jarque-Bera	1.415058	1.188366	0.736265
Probability	0.492861	0.552013	0.692025
Sum	119.7989	113.2134	105.2218
Sum Sq. Dev.	0.153518	0.482096	0.223475
Observations	10	10	10

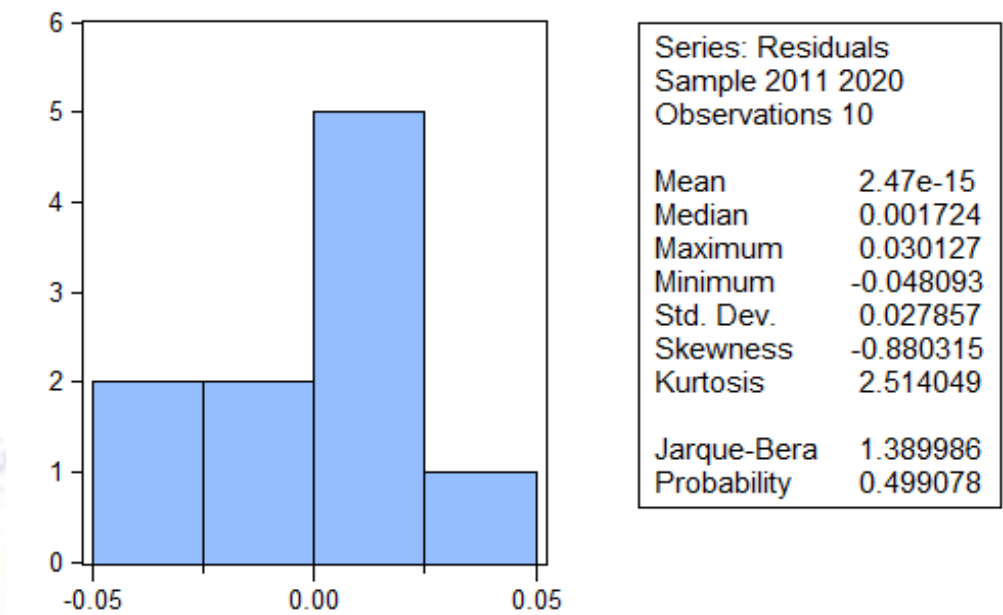
Sumber : Hasil olah eveiws 8.0

Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Suare*), dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas



Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai *Jarque-Bera* (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,499078 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 10/01/22 Time: 02:13
Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.502068	5032.169	NA
PENYERTAAN_MODAL	0.003479	4470.908	1.681010
DEVIDEN	0.007505	8329.933	1.681010

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari hasil pengolahan data di atas ini menunjukkan bahwa :

- Nilai centered VIF dari Penyertaan Modal = 1,681010
- Nilai centered VIF Deviden = 1,681010.

Keduanya bernilai kurang dari 10, maka model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk itu penelitian ini dapat dilanjutkan.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.794344	Prob. F(2,5)	0.5017
Obs*R-squared	2.411237	Prob. Chi-Square(2)	0.2995

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *probability chi-square* sebesar 0,2995. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.984606	Prob. F(5,4)	0.5205
Obs*R-squared	5.517218	Prob. Chi-Square(5)	0.3561
Scaled explained SS	2.046567	Prob. Chi-Square(5)	0.8427

Hasil Olah Eviews 8.0

Pada hasil pengolahan data diatas dapat dilihat nilai *Probability Chi-Square* dari *Obs*R-Squared* sebesar 0,3561 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui.

Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Penyertaan modal (X_1) dan Deviden (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Suares*). Hasil regresi menggunakan data Log (*Lampiran 1.2*) bisa dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Log

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 10/01/22 Time: 00:06				
Sample: 2011 2020				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.557375	0.708568	7.843111	0.0001
PENYERTAAN_MODAL	0.536861	0.058982	9.102070	0.0000
DEVIDEN	0.032743	0.086631	0.377958	0.7167
R-squared	0.954507	Mean dependent var		11.97989
Adjusted R-squared	0.941509	S.D. dependent var		0.130605
S.E. of regression	0.031587	Akaike info criterion		-3.828839
Sum squared resid	0.006984	Schwarz criterion		-3.738063
Log likelihood	22.14419	Hannan-Quinn criter.		-3.928419
F-statistic	73.43478	Durbin-Watson stat		1.548830
Prob(F-statistic)	0.000020			

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari hasil regresi dapat dilihat bahwa baik Variabel Penyertaan modal dan Deviden berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$LogY = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$

$LogY = 5.557375 + 0.536861x_1 + 0.032743x_2$

$PAD = 5.557375 + 0.536861 \text{ Penyertaan Modal} + 0.032743 \text{ Deviden}$

Dari persamaan regresi yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5.557375 menunjukkan bahwa apabila variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) nilainya 0 (nol), maka nilai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 5.557375.
2. Koefisien Regresi Penyertaan Modal (X_1) sebesar 0.536861, yang artinya jika Penyertaan Modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.536861, dengan asumsi variabel lain tetap (Konstan).
3. Koefisien Regresi Deviden (X_2) sebesar 0.032743, yang artinya jika Deviden mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.032743, dengan asumsi variabel lain tetap (Konstan).

Uji Hipotesis

Secara Partial (Uji t)

Hasil Uji t pada Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Berganda dengan aplikasi Eviews menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Y) adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penyertaan Modal (X_1) memiliki nilai $t_{statistic}$ sebesar 9,102070. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,895. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($9,102070 > 1,895$), berarti H_0 ditolak, menunjukkan bahwa Variabel Penyertaan Modal berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Variabel Deviden (X_2) memiliki nilai $t_{statistic}$ sebesar 0,377958. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,895. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($0,377958 < 1,895$), berarti H_0 diterima, menunjukkan bahwa Variabel Deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 10. dapat dijelaskan pengaruh variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y.

Nilai F-statistik yang diperoleh 73.43478 sedangkan F-tabel 4,737. Nilai F-table berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1) = 2$ dan df untuk denominator $(n-k/10-3) = 7$.

Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan pengujian data dengan Eviews 8 yang dapat dilihat pada Tabel. 10. diatas, maka diperoleh data besarnya R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.954507. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.954507 atau sebesar 95% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan

Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil pengujian statistik menemukan bahwa variabel Penyertaan Modal Pemerintah Sulawesi Utara pada BUMD dalam hal ini PT. Bank SulutGo mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat dilihat jika Penyertaan Modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.536861 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berpengaruh pada upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian terkait Penyertaan Modal ini secara parsial memiliki perbedaan kesimpulan dari hasil penelitian dengan Penelitian Terdahulu dimana Henrikus Triyanto (2015) menyatakan bahwa Penyertaan Modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah akan dipergunakan sebagai modal usaha PT. Bank SulutGo untuk memperoleh hasil keuntungan perusahaan yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan PAD Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Pengaruh Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial deviden yang diterima dari PT. Bank SulutGo tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terlihat jika ada kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara hanya naik sebesar 0.032743 atau tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian terkait Deviden ini sejalan atau sesuai dengan hasil penelitian Rissa Amosea (2012) yang menyebutkan bahwa secara parsial bahwa laba BUMD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo memperoleh manfaat ekonomi yaitu dengan penerimaan deviden dalam jangka waktu tertentu dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah. Nilai deviden tersebut ditetapkan berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Pemegang Saham. Deviden ini dimasukkan dalam pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, dimana penerimaannya berasal dari hasil penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Non BUMD. Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, dapat dilihat kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari :

Tabel 11. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Pos	Jumlah (Rp)	Kontribusi
1	Pajak daerah	930.415.146.643	83%
2	Retribusi daerah	114.784.249.029,63	10%
3	HPKDD	42.255.754.286	3,7%
4	Lain-lain PAD yang sah	37.862.638.056,96	3,3%
Total PAD		1.125.317.788.015,9	100%

Sumber : Data BPS dan APBD Pemprov Sulut, 2020

Pada Tabel 11 ini terlihat bahwa pos penerimaan terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar 83%, yang diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar 10%. Selanjutnya pos HPKDD memberikan kontribusi pendapatan untuk PAD sebesar 3,7%, dan yang paling kecil yaitu berasal dari Lain-Lain PAD yang sah, hanya sebesar 3,3%. Sehingga penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo terlihat tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, bila diteliti kembali pada Tabel 4. Persentasi Penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo pada Pos HPKDD dalam Bab I sebelumnya, terlihat bahwa sumber pendapatan pada Pos HPKDD dalam PAD ini sebagian besar merupakan kontribusi penerimaan deviden dari PT. Bank SulutGo, dengan rata-rata presentasi 93,33%, selang tahun 2011 – 2020. Sedangkan penerimaan deviden dari BUMD dan Non BUMD lainnya di luar PT. Bank SulutGo hanya memberikan kontribusi sebesar 6,67% saja pada penerimaan PAD Sulut.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pengaruh Deviden PT. Bank SulutGo terhadap PAD Provinsi Sulut walaupun tidak berpengaruh positif secara keseluruhan terhadap jumlah PAD, namun secara khusus sangat berpengaruh dalam menambah Pos HPKDD, jauh melampaui BUMD dan Non BUMD lainnya yang diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengaruh Penyertaan Modal dan Deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penyertaan Modal dan deviden secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terlihat dari

sumbangan pengaruh variabel independen (Penyertaan Modal dan Deviden) atau R_2 yang memiliki nilai sebesar 0.95 atau 95%, menunjukkan Penyertaan Modal dan Deviden secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Penyertaan Modal yang dilaksanakan pada BUMD, dalam hal ini pada PT. Bank SulutGo dapat memberikan kontribusi keuntungan (*feedback profit*) yang besar kepada pemerintah daerah berupa laba dan juga kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya menyertakan modal dalam bentuk investasi dalam kegiatan kepermerintahannya dan selalu menerima laba atas hasil penyertaan modal untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyertaan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena Penyertaan Modal yang dilaksanakan pada PT. Bank SulutGo dapat memberikan kontribusi keuntungan (*feedback profit*) yang besar kepada Pemerintah Daerah.
2. Deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2020 disebabkan oleh karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDD) dan Lain-Lain PAD yang Sah. Deviden PT. Bank SulutGo sebagai BUMD hanya mengisi 1 (satu) komponen diantara keempat komponen tersebut, yaitu HPKDD. Namun dari beberapa BUMD dan Non BUMD yang menerima penyertaan modal dari pemerintah provinsi, PT. Bank SulutGo merupakan BUMD yang memberikan kontribusi terbesar dalam pos HPKDD dalam penerimaan Deviden untuk menambah PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni sebesar 93,33%.
3. Penyertaan Modal dan deviden secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2020. Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Bank SulutGo akan terus memperoleh hasil keuntungan dari usahanya yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD, sekaligus perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah, untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

- a) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan tetap konsisten melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo sesuai dengan Peraturan Daerah Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang ada, sehingga dapat terus meningkatkan penerimaan daerah dari pertumbuhan usaha dan nilai BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
- b) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus memberikan dukungan berupa kebijakan di lingkungan pemerintah dan masyarakat untuk aktif menggunakan jasa perbankan PT. Bank SulutGo dengan memaksimalkan transaksi keuangan, serta mendorong tata kelola yang efektif dan efisien pada PT. Bank SulutGo, agar terjadi peningkatan laba hasil usahanya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran Deviden untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.

Bagi PT. Bank SulutGo :

- a) Bank SulutGo diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha dalam mengelola penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) agar dapat terus memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.
- b) Bank SulutGo semakin memaksimalkan pengelolaan bisnis bank serta profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai agar dapat terus menghasilkan laba untuk meningkatkan deviden sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara yang digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amosea, Rissa. 2012.** *Pengaruh Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, (Skripsi, Politeknik Negeri Bandung, 2012)
- Balfas, Hamud M. 2006.** *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Tatanusa
- Besley, Scott, and F Eugene Brigham. 2008.** *Essentials of Managerial Finance, fourteenth edition*. USA: Thomson South-Western.
- Ghozali, Imam. 2009.** *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP
- Ghozali, Imam. 2016.** *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregory, Mankiw N. 2000.** *Teori Ekonomi Makro (Terjemahan), Edisi Keempat*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004.** *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007.** *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mewoh, Ria Lea. 2017.** *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 (234)*.
- Triyanto, Henrikus (2015)** *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat*. Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Trisno Yuwono, Pius Abdullah, 1994.** *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Weygandt, Jerry. J, Kieso Donald E., dan Kimmel Paul D. 2011.** *Accounting Principles; Pengantar Akuntansi (Buku 2)*, Rajawali Pers
- <https://www.banksulutgo.co.id/>** Situs web resmi PT.Bank SulutGo
- <https://bkad.sulutprov.go.id/>** Situs web resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara

ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BITUNG

Julin Mamonto¹, Een N. Walewangko², Mauna Th.B. Maramis³

Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email; julinmamonto@yahoo.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan terhadap Kinerja Inspektorat Kota Bitung .

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data besaran Anggaran Program Pengawasan Pada Inspektorat Kota Bitung dengan periode pengamatan sepuluh tahun yaitu tahun 2012-2021. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian asosiatif dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Data diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung. Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung. Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja. Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) (X1), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (X2), Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Kata Kunci: Besaran Anggaran, Pengawasan, Kinerja

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Budget Amount of the Supervision Program on the Performance of the Bitung City Inspectorate.

This study uses secondary data in the form of budget data for the Supervision Program at the Bitung City Inspectorate with an observation period of ten years, namely 2012-2021. The type of research used is associative research with multiple linear regression data analysis techniques. The data was obtained from the Regional Finance and Assets Agency.

The results of the study indicate that the budget amount for the improvement of the internal monitoring system and controlling the implementation of regional head policies program (Mayor) (X1) has a positive and significant effect on the performance of the Bitung City Inspectorate. The budget amount for Professionalism improvement program of Audit Personnel and Supervisory Apparatuses (X2) has a positive and significant effect on the performance of the Bitung City Inspectorate. The budget amount for the program of the arrangement and improvement of system policies and supervision procedures (X3) has a negative effect on performance. The budget amount for the improvement of the internal monitoring system and controlling the implementation of regional head policies program (Mayor) (X1), The budget amount for Professionalism improvement program of Audit Personnel and Supervisory Apparatuses (X2), The budget amount for the program of the arrangement and improvement of system policies and supervision procedures (X3) have significant effect on Y.

Keywords: Budget Amount, Supervision, Performance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2004:208). Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang baik, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan

mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Action* dalam Tri Widodo (2008) menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pengawasan internal tidak hanya dilakukan pada saat akhir proses manajemen saja, tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Pergeseran peran pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar *watch dog* (menemukan penyimpangan) ke posisi yang lebih luas, yaitu sebagai konsultan dan katalis yang berorientasi pada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal.

Otonomi Daerah yang disemangati dengan azas desentralisasi maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Kota Bitung sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengawasan ada pada Inspektorat, dengan demikian Inspektorat Kota Bitung memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan daerah Kota Bitung. Untuk itu efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.

Kota Bitung berdasarkan UU No. 7 Tahun 1990 Tanggal 15 Agustus 1990, ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Inspektorat Kota Bitung mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan *good governance and clean government* pada Pemerintah Kota Bitung. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Bitung secara umum. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, permasalahan yang berulang diantaranya mengenai pengelolaan belanja modal, pengelolaan belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja bantuan dan hibah, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan pengelolaan aset tetap. Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara bahkan tidak sedikit Aparat Sipil Negera (ASN) pada Pemerintah Daerah Kota Bitung berhadapan dengan kasus hukum bahkan berujung pada tuntutan pidana yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan kerjasama dari pimpinan PD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, serta masih terbatasnya anggaran dan prasarana serta kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting bagi Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, dalam menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, anggaran negara justru harus diinformasikan kepada publik. Penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan segi keefektifan, keefisienan dan keekonomian sehingga perencanaan anggaran pada akhirnya tidak menggagalkan rencana yang telah disusun. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan maka anggaran dapat menjadi indikator kinerja organisasi. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun non fisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan, maka harus lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Kinerja pegawai merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pegawai juga merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Inspektorat Daerah merupakan pilar yang bertugas sebagai “pengawas” sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan internal bertujuan menilai system pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Berikut ini adalah rincian anggaran program pengawasan Inspektorat Kota Bitung tahun 2012-2022:

Tabel 1. BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BITUNG TAHUN 2012-2021

Program	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)	755,890,000	736,402,660	676,301,051	432,234,749	402,978,068	1,019,199,400	1,203,981,438	1,914,832,200	978,918,177	1,159,133,425
Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	29,650,000	18,200,000.00	15,230,000	213,126,000	137,820,981	179,046,900	176,068,697	554,199,200	356,205,448	356,205,448
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2,500,000	188,110,000	147,292,500	185,352,000	147,644,481	91,018,200	121,371,783	100,553,090	100,553,090	149,999,000

Sumber: Inspektorat Kota Bitung

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat dilihat bahwa adanya penurunan anggaran pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Penurunan tesebut Dampak dari Pandemi Covid-19 Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah Inspektorat Kota Bitung masih terkendala dari segi anggaran pengawasan Hal ini mengakibatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak optimal.

Pengawasan merupakan kegiatan pengendalian internal yang sangat penting karena itu harus dioptimalkan *kinerja APiP agar pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat tercapai*. Penelitian Yanida (2013) tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah menemukan bahwa semakin besar tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Penelitian lain yaitu Sembiring (2017) tentang Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur melalui Pemberian insentif dan peningkatan disiplin diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja dinas. Namun dalam penelitian Wiratno (2016) tentang Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi menemukan bahwa anggaran tidak mepengaruhi kinerja. Melihat urgensinya besaran anggaran program pengawasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan ini perlu untuk dianalisis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Inspektorat Kota Bitung”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?

2. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
3. Apakah Besaran Anggaran Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
4. Apakah Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
2. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
3. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Anggaran Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung?
4. Untuk mengetahui pengaruh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, serta Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara simultan terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi Publik

Bastian (2014:359), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Serta, menurut Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan, dan; kemampuan kerja (tentang peralatan) (Bastian, 2014:G-3). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

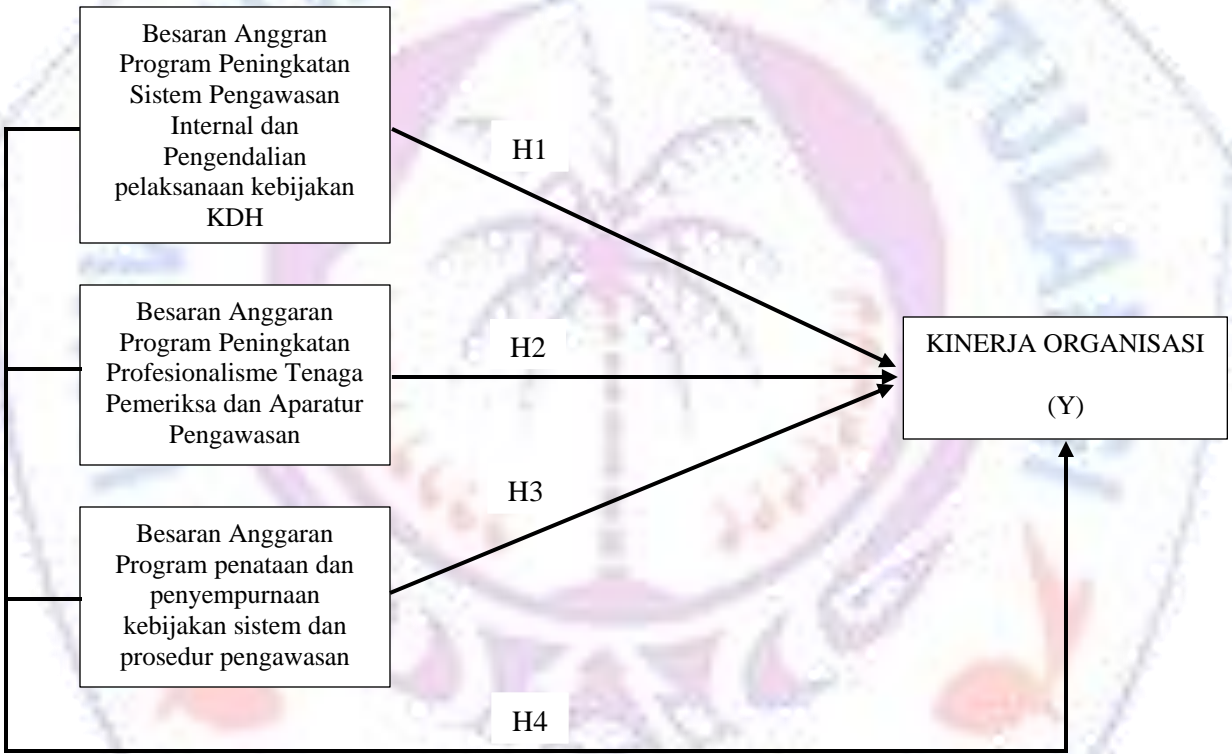
Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Reksohadiprodjo (2008) pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2010). Pengawasan sebagai upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena “Apabila tidak dilaksanakan cepat

atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137).

Anggaran

Pendapat Kaho (1997:60) bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Sumber Daya Manusia dan Kemampuan aparatur adalah Keuangan yang stabil dan peralatan yang lengkap. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora, 2004). Karena sumber-sumber yang dimiliki perusahaan bersifat terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Dari keterangan itu, maka faktor ketersediaan anggaran (*Financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesa Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang belum diketahui kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
2. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
3. Diduga Besaran Anggaran Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung
4. Diduga Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan serta Besaran Anggaran Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Bitung.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi, dalam pengertian bisnis, data merupakan sekumpulan informasi dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:402), sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terkait APBD Kota Bitung dan Besaran Anggaran Realisasi Pengawasan Inspektorat Kota Bitung dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2021 di peroleh melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi.

Metode Analisis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya positif atau negatif.

Berdasarkan model dasar pada persamaan $Y = f(X_1, X_2, X_3)$ maka ditemukan model estimasi $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Dimana:

Y	=	Kinerja Organisasi
β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi X1, X2, X3
X1	=	Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
X2	=	Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
X3	=	Besaran Anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
E	=	Error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis
Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/20/22 Time: 05:47
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	107.8792	35.76051	3.016715	0.0235
X1	1.25E-07	3.25E-08	3.835046	0.0086
X2	2.70E-07	7.89E-08	3.419237	0.0142
X3	-2.53E-07	1.76E-07	-1.440317	0.1998
R-squared	0.955105	Mean dependent var	247.3000	
Adjusted R-squared	0.932657	S.D. dependent var	101.5798	
S.E. of regression	26.36053	Akaike info criterion	9.670787	
Sum squared resid	4169.264	Schwarz criterion	9.791821	
Log likelihood	-44.35393	Hannan-Quinn criter.	9.538013	
F-statistic	42.54796	Durbin-Watson stat	1.922759	
Prob(F-statistic)	0.000195			

Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Dari tabel di atas dapat dituliskan model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X1 + \beta_2X2 + \beta_3X3+e$$

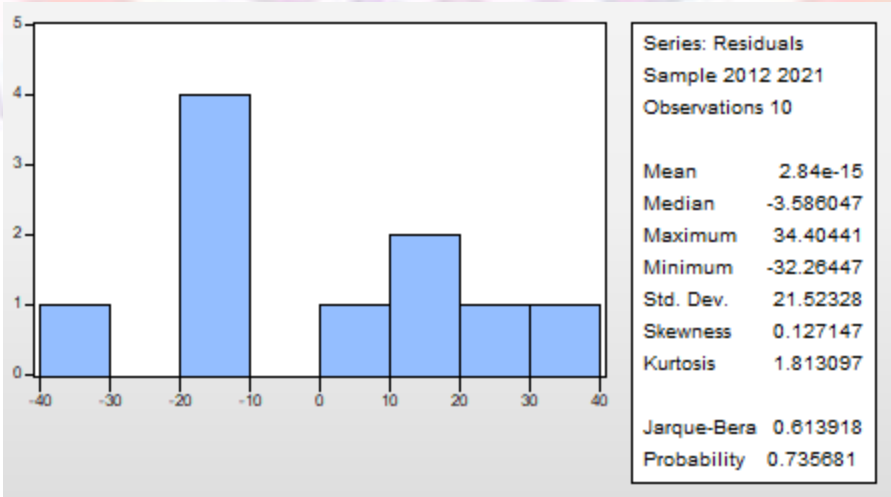
Dimana :

$$Y = 107.8792 + 1.25E - 07X1 + 2.70E - 07X2 - 2.53E - 07X3+e$$

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model rergresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan jargue-bera test.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0.735681) > α (0.05) maka H₀ diterima. Karena H₀ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antarvariabelbebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi cukup kuat di antara variabel bebas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.748451	-0.286634
X2	0.748451	1.000000	-0.035732
X3	-0.286634	-0.035732	1.000000

Sumber : Olah Data Eviews 10,2020

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas di atas, semua nilai koefisien korelasi < 0.8, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independen atau dengan kata lain asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/22 Time: 05:53				
Sample: 2012 2021				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.36929	15.41136	1.711029	0.1379
X1	-2.02E-09	1.40E-08	-0.143802	0.8904
X2	-9.15E-09	3.40E-08	-0.268920	0.7970
X3	-3.57E-08	7.58E-08	-0.471483	0.6540
R-squared	0.085570	Mean dependent var	18.22761	
Adjusted R-squared	-0.371646	S.D. dependent var	9.699973	
S.E. of regression	11.36034	Akaike info criterion	7.987309	
Sum squared resid	774.3445	Schwarz criterion	8.108343	
Log likelihood	-35.93654	Hannan-Quinn criter.	7.854535	
F-statistic	0.187154	Durbin-Watson stat	1.633629	
Prob(F-statistic)	0.901390			

Berdasarkan tabel uji glejser diperoleh probabilitas X_1 (0.8904) > α (0.05), maka H_0 diterima, probabilitas X_2 (0.7970) > α (0.05), maka H_0 diterima dan probabilitas X_3 (0.6540) > α (0.05), maka H_0 diterima. Karena H_0 untuk variable independen X_1 , X_2 , X_3 diterima berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen. X_1 , X_2 dan X_3 .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Uji autokorelasi ini menggunakan nilai durbin-watson dalam tabel regresi berganda untuk melihat masalah autokorelasi dalam model. Berdasarkan nilai durbin-watson pada tabel regresi berganda yaitu:

Nilai Durbin Watson berdasarkan table regresi berganda : 1.922759

dU= 2.0163 (berdasarkan table durbin Watson n=10,k=3)

dL= 0.5253 (berdasarkan table durbin Watson n=10,k=3)

4- $dU = 1.9837$, 4- $dL = 3.4747$

Nilai D_w berada di antar dL dan dU yaitu $dL(0.5253) < d(1.922759) < dU(2.0613)$

Uji autokorelasi berada di daerah keragu-raguan/tidak ada keputusan

Uji Signifikan

Uji Parsial (t)

Berdasarkan tabel regresi berganda , nilai uji t-statistik diperoleh (X_1) $(0.0086) < \alpha$ (0.05) , maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak dapat disimpulkan bahwa X_1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y .

Nilai probabilitas t-statistik X_2 $(0.0142) < \alpha$ (0.05) , maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa X_2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y .

Nilai probabilitas t-statistik X_3 $(0.1998) > \alpha$ (0.05) , maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa X_3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y .

Uji Simultan (F)

Berdasarkan tabel output regresi berganda, dapat diketahui bahwa nilai uji F-statistik diperoleh prob $(0.000195) < \alpha$ (0.05) , maka H_0 ditolak. Berdasarkan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y .

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel output regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0.955105 artinya secara bersama-sama variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh terhadap Y sebesar 95.5105%, sedangkan sisanya sebesar 4.4895% $(100\% - 95.5105\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pemodelan ini.

Pembahasan

Berdasarkan persamaan regresi dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

Pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) terhadap Kinerja.

Program Utama dalam pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Bitung adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH). Dimana Program ini pelaksanaannya diarahkan pada upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada pegawai atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menetapkan pemberian tambahan penghasilan dan memberikan promosi. Kinerja juga tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan tunjangan bagi pegawai, akan tetapi bagaimana memotivasi pegawai dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH). Hal tersebut di akibatkan oleh karena anggaran tersebut dialokasikan untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang menyentuh langsung pada tugas pengawasan Inspektorat Kota Bitung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Rahmi Nur Emilia (2013) tentang Pengaruh partisipasi dalam anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Bengkulu. Partisipasi dalam anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah..

Pengaruh Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terhadap Kinerja.

Suatu organisasi atau Perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas memahami peran dan tanggungjawabnya serta mampu menciptakan daya saing yang baik dihadapan pimpinan melalui hasil kerjanya. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu organisasi ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi baik itu berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri ataupun yang berasal dari luar individu pegawai itu.

Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pelaksanaannya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Hal tersebut diakibatkan oleh karena anggaran tersebut dialokasikan untuk tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, sehingga dengan anggaran yang dirasakan langsung akan membuat pegawai memiliki kinerja yang lebih tinggi atau mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurike, Vecky A.J. Masinambow dan Een N. Walewango dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan Terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado Tahun 2015-2018 yang menunjukkan bahwa besaran anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja.

Pengaruh Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan terhadap Kinerja.

Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Program ini diarahkan pada upaya-upaya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang pelaksanaannya berdasarkan laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan. Program ini juga di arahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi. Kinerja (performance) didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Artinya perubahan kinerja berupa peningkatan atau penurunan kinerja tidak dipengaruhi oleh besaran anggaran untuk Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Hal tersebut diakibatkan oleh karena anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi, sehingga dampaknya tidak bisa langsung dirasakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian N. Ermawati.(2017). Tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial dengan motivasi kerja sebagai variabel pemoderasi pada organisasi sektor publik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran anggaran Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja.
4. Secara Simultan Besaran Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH), Besaran Anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Besaran anggaran program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Bitung perlu meningkatkan alokasi anggaran pengawasan Inspektorat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH).
2. Guna peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Inspektorat harus terus meningkatkan Sumber Daya Manusia lewat pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
3. Inspektorat harus mempertahankan dan meningkatkan anggaran untuk Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sehingga akan meningkatkan kinerja.
4. Perlu adanya koordinasi dan dukungan yang baik dari Pemerintah daerah Kota Bitung dengan Inspektorat sebagai organisasi pengawas, serta komitmen pimpinan daerah dan jajarannya untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*, sehingga independensi Inspektorat tetap terjaga tanpa adanya intervensi dan Kinerja semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Munandar.2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta UI
Bastian.2001. Akuntansi Sektor Publik
Kaho.1997. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD
Kuncoro, Mudrajad.2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3 Penerbit Erlangga.
Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
Munandar.2001. Psikologi Industri Dan Organisasi.

- Rahmi Nur Emilia.2013.** Pengaruh Partisipasi dalam anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Bengkulu.
- Reksohadiprodjo. 2008.** Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Rudi Mantiri.2018.** Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi pegawai dan teknologi informasi terhadap kinerja anggaran pada Universitas Samratulangi.
- Sembiring.2017.** Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
- Sugiyono. 2016.** Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT.Alfabeta.
- Wiratno (2016)** tentang Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi
- Yanida. (2013).** Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NBwjNa25vykJ:https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/264/251+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Jurnal Jurnal Unibraw.
- Yurike. (2019).** Pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan Terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado.
- Zahro.(2016).** Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Persepsi Keadilan Anggaran dan Komitmen Tujuan Anggaran Sebagai Variabel. <http://webcache.gogleusercontent.com/search?q=cache:8offsDzEFvsJ:https://media.neliti.com/media/publications/74146-ID-pengaruh-pertisipasi-anggaran-terhadap-k.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Jurnal Undip.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PAD RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MANADO

Sunarni¹, Anderson G. Kumenaung², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail : ¹sunarni2305@gmail.com, ²andersongkumenaung@unsrat.ac.id ³itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh tarif retribusi, kualitas pelayanan kemampuan membayar berpengaruh terhadap pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui kemauan membayar. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tarif retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Kemampuan membayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Berdasarkan hasil penelitian secara tidak langsung tarif retribusi berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui kemauan membayar. Kualitas pelayanan juga secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui kemauan membayar. Berdasarkan hasil penelitian kemampuan membayar secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui kemauan membayar.

Kata Kunci : Tarif retribusi, kualitas pelayanan, kemampuan membayar, pencapaian target PAD dan kemauan membayar

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how the influence of retribution rates, service quality and ability to pay affect the achievement of the target of PAD Garbage/Cleaning Retribution through willingness to pay. The analytical tool used is path analysis with the help of SPSS 26. Based on the research results it is known that the levy tariff has a positive and significant effect on the willingness to pay. Service quality has a positive and significant effect on willingness to pay. The ability to pay has a positive and significant effect on the willingness to pay. Based on the results of the study, the levy tariff has a significant effect on achieving the PAD Garbage/Cleaning Retribution target through willingness to pay. Service quality also indirectly has a significant effect on achieving the target of PAD Garbage/Cleaning Retribution through willingness to pay. Based on the research results, the ability to pay indirectly affects the achievement of the PAD Garbage/Cleaning Retribution target through willingness to pay.

Keywords: Retribution rates, quality of service ability to pay, achievement of PAD targets and willingness to pay

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah melalui potensi daerah yang dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah diharapkan benar-benar mengelola dan menggali semaksimal mungkin potensi pendapatan yang ada di daerah. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan

daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan produk hukum dalam menjawab setiap persoalan yang ada di Kota Manado. Selama kurang lebih 10 tahun perda tersebut diberlakukan, Pemerintah Kota Manado melakukan evaluasi yang kurang memuaskan dalam penanganan sampah yang ada. Masih ditemukan banyak sampah yang berserakan di titik-titik pembuangan sampah yang ada di bak sampah tiap lingkungan, keterlambatan pengangkutan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa volume produksi sampah yang ada sudah dan belum tertangani dengan baik. Volume produksi sampah di Kota Manado kurang lebih 340 m³/harinya dengan kapasitas tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 13.699 Ha (sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado).

Kecamatan se Kota Manado bertugas untuk memberikan dan mengelola pelayanan sampah dalam wilayah Kota Manado. Adapun kegiatan pengelolaan tidak hanya meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan pembuangan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Manado dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bukan hanya sampai pada kegiatan tersebut, tetapi juga melakukan kegiatan penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Sesuai dengan program prioritas Kota Manado yaitu peningkatan ketersediaan layanan minimal perkotaan dan infrastruktur ramah air, berarti ada hubungan antara Pemerintah Kota Manado dengan suatu pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan kebersihan. Untuk itu diperlukan usaha dari pemerintah kota dalam menangani kebersihan khususnya sampah. Dengan adanya Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Kepada Pemerintah Kecamatan Se-Kota Manado, maka Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan persampahan dan mengelola penerimaan retribusi adalah Kecamatan se Kota Manado.

Tarif Retribusi persampahan/kebersihan Kota Manado, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 20 besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan per bulan dan dibedakan berdasarkan objek. Yang terjadi saat ini di Kecamatan Paal Dua untuk penarikan tarif retribusi terhadap wajib retribusi masih ada yang belum sesuai dengan Perda yang ada dan masih ada juga masyarakat yang belum membayar retribusi persampahan/kebersihan dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan informasi yang didapat tentang Retribusi persampahan/kebersihan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Manado Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No	Tahun Pungut	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	%
1	2017	7,331,822,000	8,331,350,000	88.00
2	2018	7,572,521,250	14,357,923,000	52.74
3	2019	11,788,656,000	25,150,103,400	46.87
4	2020	10,123,037,750	21,959,250,000	46.10
5	2021	8,536,566,500	13,980,000,000	61.06

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif retribusi, kualitas pelayanan dan kemampuan membayar berpengaruh terhadap kemauan membayar?
2. Apakah tarif retribusi, Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Membayar berpengaruh terhadap Pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui Kemauan Membayar?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tarif retribusi, kualitas pelayanan dan kemampuan membayar terhadap kemauan membayar.
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif retribusi, Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Membayar terhadap Pencapaian target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan melalui Kemauan Membayar.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Kepada pemerintah sebagai bahan informasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dengan retribusi persampahan dan target penerimaan asli daerah.
2. Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti, untuk penelitian lebih lanjut.

Tinjau Pustaka

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dijelaskan pasal 1 Bab I Ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Dihilup;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ;
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ;
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

a. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Tarif Retribusi

Tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, ataupun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif, ekspor, tarif impor dan sejenisnya.

Kualitas Pelayanan

Menurut Fandy Tjiptono (2005) kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia. Serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan.

Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP)

Menurut Rubiani (2004) kemampuan membayar (ability to pay) adalah jumlah uang yang mampu dibayarkan masyarakat untuk menggantikan biaya pelayanan yang diterimanya. Menurut Rumiati et al, (2013), Ability to pay atau kemampuan untuk membayar ialah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal.

Kemauan Membayar (Willingness To Pay-WTP)

Willingness to pay (kemauan membayar) yaitu kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya (Tamin et.al, 2004). Menurut Wedgwood, A (2008) WTP adalah jumlah maksimum dari status individu seseorang untuk kemauan membayar atas suatu barang atau jasa.

Hubungan Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP) dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay)

Pelaksanaannya dalam menentukan tarif retribusi sering terjadi benturan antara besarnya Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP) dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay), kondisi tersebut dapat berupa :

- **Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP) lebih besar dari Kemauan Membayar (Willingness To Pay)**

Kemampuan membayar lebih besar daripada kemauan membayar. Hal ini terjadi bila wajib retribusi/rumah tangga mempunyai penghasilan yang relatif tinggi tetapi kepuasan (utilitas) terhadap jasa pelayanan tersebut relatif rendah. Wajib retribusi/rumah tangga pada kondisi ini disebut wajib retribusi/rumah tangga yang bebas memilih (choice riders).

- **Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP) lebih kecil dari Kemauan Membayar (Willingness To Pay)**

Kondisi ini merupakan kebalikan dari kondisi ATP lebih besar dari WTP, dimana keinginan wajib retribusi/rumah tangga untuk membayar jasa pelayanan lebih besar daripada kemampuan membayarnya. Hal ini terjadi bila wajib retribusi/rumah tangga mempunyai penghasilan relatif rendah terhadap jasa pelayanan sangat tinggi, sehingga keinginan wajib retribusi/rumah tangga untuk membayar tarif retribusi lebih dipengaruhi oleh kepuasan (utilitas), pada kondisi ini wajib retribusi/rumah tangga disebut wajib retribusi/rumah tangga tertahan (captive riders).

- **Kemampuan Membayar (Ability To Pay-ATP) sama dengan dari Kemauan Membayar (Willingness To Pay)**

Menunjukkan bahwa antara kemampuan dan keinginan membayar tarif retribusi tersebut adalah sama, pada kondisi ini terjadi keseimbangan antara kepuasan (utilitas) wajib retribusi/rumah tangga dengan tarif retribusi yang dikeluarkan untuk membayar jasa pelayanan tersebut.

Apabila parameter ATP dan WTP yang ditinjau, maka aspek wajib retribusi/rumah tangga dalam hal ini dijadikan subjek yang menentukan nilai tarif retribusi yang diberlakukan dengan prinsip sebagai berikut menurut Permata, 2012:36.

1. ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar sehingga nilai tarif yang diberlakukan sedapat mungkin tidak melebihi nilai ATP kelompok wajib retribusi/rumah tangga sasaran. Campur tangan pemerintah maupun dukungan pemerintah dibutuhkan pada kondisi nilai tarif

retribusi berlaku lebih besar dari ATP. Hal ini diperlukan agar nilai tarif sama dengan nilai ATP.

2. WTP merupakan fungsi dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan jasa pengangkutan sampah, sehingga bila nilai WTP masih berada dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif retribusi dengan perbaikan kinerja pelayanan para pengangkut.
3. Apabila perhitungan tarif retribusi berada jauh dibawah ATP dan WTP, maka terdapat keleluasaan dalam perhitungan/pengajuan nilai tarif retribusi baru.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sahara Azhar (2011) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pelayanan, Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Masyarakat Kota Medan Terhadap Penerimaan Retribusi Sampah” menunjukkan bahwa tingkat pelayanan, kemampuan membayar dan kemauan membayar masyarakat Kota Medan secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi sampah.

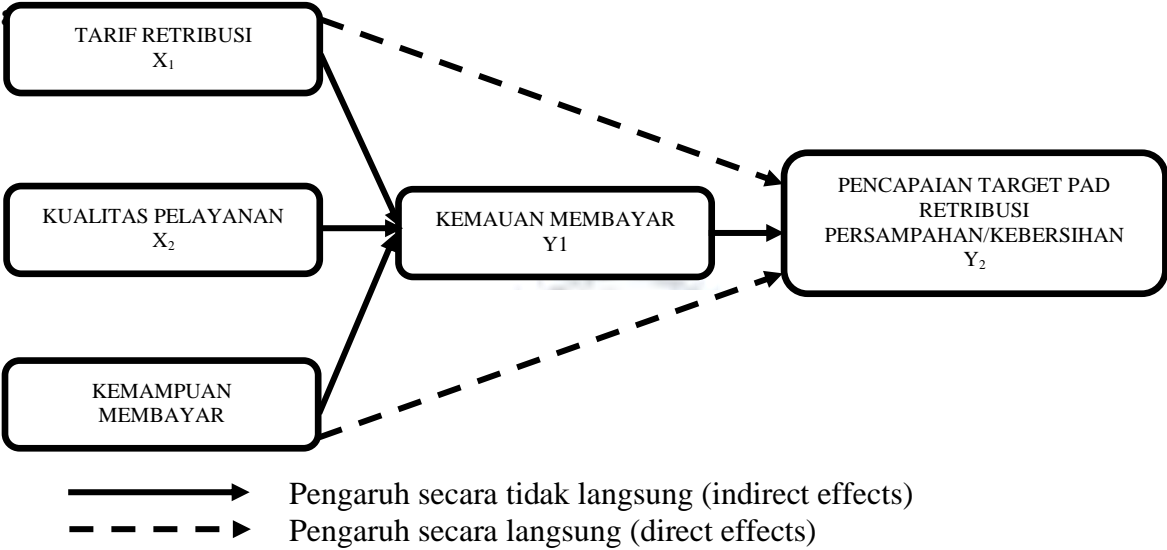
Penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Jaya (2014) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung” menunjukkan hasil bahwa pertama kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi sampah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan kemampuan membayar sampah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah, kedua kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan berpengaruh tidak langsung melalui kemauan membayar sampah. Ketiga kemampuan membayar, tarif retribusi memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan tidak langsung melalui kemauan membayar sampah secara signifikan.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Zamadila Rosyida Hasbullah, Kancitra Pharmawati¹, Yulianti Pratama (2020) Yang Berjudul Analisis Tarif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ability To Pay Dan willingness To Pay Di Kecamatan Cimahi Tengah. Studi Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP) Masyarakat Di Kecamatan Cimahi Tengah Berdasarkan Kelas Daya Listrik, Kelas Ii Rumah Dengan Daya Listrik 500 Watt Sampai Dengan 1300 Watt Dan Kelas Iii Rumah Dengan Daya Listrik 250 Watt Sampai Dengan 500 Watt terhadap Pengelolaan Sampah. Metode Yang Digunakan Adalah Survei, Wawancara, Kuesioner, ATP, WTP Menggunakan Contingent Valuation Method (Cvm). Nilai ATP Yang Diperoleh Pada Kelas Ii Dan Kelas Iii Adalah Rp. 12.701 Dan Rp. 6.829, Serta Nilai WTP Rp. 7.492 Dan Rp. 3.439.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Sakti Walenta, Fredrik Bastian Kawani (2020) dengan judul Analysis of Potential Market Retribution Receipts on Poso District Revenue (PAD) Case Study in Tentena City Siwagilemba Market. This study aims to analyze the potential acceptance of market retribution on regional revenue (PAD) in Poso district case studies on the Tentena siwagilemba market. The research method used is a qualitative method by collecting budget data and realization of market retribution income to determine the effectiveness of the potential market potential for local revenue. The results showed that the potential for market retribution still had effectiveness in the category that was quite effective with a 68 percent percentage in the management of Tentena Siwagilemba market retribution.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswanti (2021) yang berjudul The Effect Of Regional Tax Revenue And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (A Case Study at the Seruyan District Financial and Asset Management Revenue Service). The analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis and multiple regression. Based on the data analysis, information is obtained that the amount of Original Regional Revenue in 2015, 2016 and 2019 has decreased, while in 2017 and 2018, Regional Original Income has increased, this indicates that the original Regional Revenue data is grouped or does not vary.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswanti (2021) dengan judul “The Effect Of Regional Tax Revenue And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (A Case Study at the Seruyan District Financial and Asset Management Revenue Service), menunjukkan bahwa sekaligus pajak daerah dan pengutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagian pajak daerah memiliki signifikan efek positif pada pendapatan daerah, sementara biaya local tidak memiliki signifikan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).



Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Kemauan Membayar (Y_1) (variabel dependen) dengan Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2) dan Kemampuan Membayar (X_3) (variabel independen) di Kota Manado.
 2. Diduga terdapat pengaruh secara tidak langsung antara variabel Pencapaian Target PAD retribusi (Y_2) (variabel dependen) dengan Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Kemampuan Membayar (X_3) dan kemauan membayar (Y_1) (variabel independen) di Kota Manado.
- H_0 = Tidak ada pengaruh secara signifikan, maka H_0 = diterima dan H_a = ditolak.
 H_a = Ada pengaruh secara signifikan, maka H_0 = ditolak dan H_a = diterima.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variabel tarif retribusi ,kualitas pelayanan, kemampuan membayar terhadap kemampuan membayar dan dampaknya terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Manado dengan pengambilan data melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dan juga penyebaran kuisioner. Waktu penelitian dilakukan selama tahun 2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- a. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Persampahan/Kebersihan (Y_2) didefinisikan sebagai persepsi responden tentang besar kecilnya jumlah hasil pemungutan retribusi sampah yang diterima oleh Kecamatan dari wajib retribusi/masyarakat yang telah menerima pelayanan. Skala pengukuran yang digunakan adalah satuan rupiah.
- b. Tarif Retribusi (X_1), merupakan persepsi masyarakat tentang kesesuaian tarif retribusi sampah yang selama ini dikenakan. Skala pengukuran yang digunakan adalah satuan rupiah.
- c. Kualitas Pelayanan (X_2) merupakan persepsi wajib retribusi/masyarakat tentang tinggi rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan yang dilakakukan oleh Kecamatan. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Interval yang diurutkan dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju=STS) sampai 5 (Sangat Setuju=SS).
- d. Kemampuan Membayar (X_3), merupakan persepsi wajib retribusi/masyarakat tentang kesanggupan wajib retribusi/masyarakat yang menerima pelayanan kebersihan untuk membayar retribusi sampah yang ditetapkan baginya. Skala pengukuran yang digunakan

- adalah Skala Interval yang diurutkan dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju=STS) sampai 5 (Sangat Setuju=SS).
- e. Kemauan Membayar (Y_1), merupakan persepsi wajib retribusi/masyarakat tentang seberapa besar kemauan wajib retribusi/masyarakat yang menerima pelayanan kebersihan untuk membayar retribusi sampah. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Interval yang diurutkan dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju=STS) sampai 5 (Sangat Setuju=SS).

Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Jalur (Analisis Path). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervenig adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan varibel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Priyatno (2008), kriteria pengujian validitas adalah:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (dengan sig 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (dengan sig 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji Reliabilitas

Instrument dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas $> 0,6$ atau lebih. Koefisien reliabiltas diperoleh dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach's bila $\text{Alpha} < 0,6$ maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dikatakan reliabel.

Pengujian Hipotesis

Uji t – test Statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap.

Uji F- test Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F.

Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai unituk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punyai.

Persamaan Analisis

Persamaan Substruktur 1

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan fungsi :

$$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3)$$

Fungsi diatas kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y_1 = a_1X_1+ a_2X_2+ a_3X_3 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y_1 merupakan variabel dependen, sedangkan X_1 dan X_2 adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 1 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y_1 .

- Dimana : X_1 : Tarif Retribusi
 X_2 : Kualitas Pelayanan
 X_3 : Kemampuan Membayar

Y_1 : Kemauan Membayar

Persamaan Substruktur 2

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 2 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut :

$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3)$

Fungsi diatas kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut :
 $Y_2 = a_1X_1+ a_2X_2+ a_3X_3+ a_4Y_1 + e_2$ (1)

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y_2 merupakan variabel dependen, sedangkan X_1, X_2, X_3 dan Y_1 adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 2 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1, X_2, X_3 dan Y_1 terhadap Y_2 .

- Dimana : X_1 : Tarif Retribusi
 X_2 : Kualitas Pelayanan
 X_3 : Kemampuan Membayar
 Y_1 : Kemauan Membayar
 Y_2 : Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Uji Validitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Retribusi

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.533	0.2039	Valid
Item 2	0.525	0.2039	Valid
Item 3	0.419	0.2039	Valid
Item 4	0.514	0.2039	Valid
Item 5	0.613	0.2039	Valid
Item 6	0.832	0.2039	Valid
Item 7	0.834	0.2039	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Diketahui bahwa r_{hitung} setiap item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.863	0.2039	Valid
Item 2	0.918	0.2039	Valid
Item 3	0.907	0.2039	Valid
Item 4	0.909	0.2039	Valid
Item 5	0.805	0.2039	Valid
Item 6	0.744	0.2039	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Diketahui bahwa r_{hitung} setiap item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan membayar

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.911	0.2039	Valid
Item 2	0.740	0.2039	Valid
Item 3	0.843	0.2039	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Diketahui bahwa r_{hitung} setiap item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kemauan Membayar

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.646	0.2039	Valid
Item 2	0.745	0.2039	Valid
Item 3	0.852	0.2039	Valid
Item 4	0.660	0.2039	Valid
Item 5	0.564	0.2039	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Diketahui bahwa r_{hitung} setiap item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan PAD retribusi

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.898	0.2039	Valid
Item 2	0.883	0.2039	Valid
Item 3	0.834	0.2039	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Diketahui bahwa r_{hitung} setiap item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tarif Retribusi

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
.733	7

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui ada N of Item dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,733. Karena nilai Cronbach's Alpha $0,733 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas adalah reliabel atau konsisten.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
.928	6

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui ada N of Item dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,928. Karena nilai Cronbach's Alpha $0,928 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas adalah reliabel atau konsisten.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel kemampuan membayar

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
.778	3

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui ada N of Item dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,778. Karena nilai Cronbach's Alpha $0,778 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas adalah reliabel atau konsisten.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel kemauan membayar

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
.734	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui ada N of Item dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,734. Karena nilai Cronbach's Alpha $0,734 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas adalah reliabel atau konsisten.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
.839	3

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui ada N of Item dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,839. Karena nilai Cronbach's Alpha $0,839 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas adalah reliabel atau konsisten.

Model Persamaan I
Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 12.
Uji Pengaruh T (parsial) untuk persamaan substruktur 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	sig
1 (Constant)	7.678	2.441		3.145	.002
Tarif Retribusi (X ₁)	.083	.049	.163	1.710	.091
Kualitas Pelayanan (X ₂)	.128	.060	.200	2.129	.036
Kemampuan Membayar (X ₃)	.688	.165	.397	4.160	.000
a. Dependent Variable : Kemauan Membayar (Y ₁)					

Sumber data : Hasil Olah SPSS 26

1. Variabel Tarif Retribusi (X₁) Terhadap Kemauan Membayar (Y₁)
- Kriteria pengambilan keputusan : $H_0 = \text{ditolak}$, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 10%.
- Hasil persamaan regresi variabel Tarif Retribusi (X₁) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.091**. Nilai signifikan $<$ dari α 10%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel Tarif

- Retribusi (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.710 dan t_{tabel} 1.29159 dengan df 10 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $1.710 > t_{tabel}$ 1.29159. Artinya ada hubungan linier antara Tarif Retribusi (X_1) dengan Kemauan Membayar (X_2). Jadi, dapat disimpulkan Tarif Retribusi (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar (Y_1).
2. **Variabel Kualitas Pelayanan (X_2) Terhadap Kemauan Membayar (Y_1)**
Kriteria pengambilan keputusan : $H_0 =$ ditolak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 10%. Hasil persamaan regresi variabel Kualitas Pelayanan (X_2) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.036**. Nilai signifikan $<$ dari α 5%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel Kualitas Pelayanan (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.129 dan t_{tabel} 1.66298 dengan df 10 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $2.129 > t_{tabel}$ 1.66298. Artinya ada hubungan linier antara Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar (X_2). Jadi, dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar (Y_1).
3. **Variabel Kemampuan Membayar (X_3) Terhadap Kemauan Membayar (Y_1)**
Kriteria pengambilan keputusan : $H_0 =$ ditolak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 1%. Hasil persamaan regresi variabel Kemampuan Membayar (X_3) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.000**. Nilai signifikan $<$ dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel Kemampuan Membayar (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 4.160 dan t_{tabel} 2.37102 dengan df 10 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $4.160 > t_{tabel}$ 2.37102. Artinya ada hubungan linier antara Kemampuan Membayar (X_3) dengan Kemauan Membayar. Jadi, dapat disimpulkan Kemampuan Membayar (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar (Y_1).

Uji Statistik F (Uji F)

Tabel 13.

Uji Pengaruh F (secara bersama-sama) untuk persamaan substruktur 1

ANOVA ^a					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	143.968	3	47.989	9.260	.000 ^b
Residual	445.687	86	5.182		
Total	589.656	89			
a. Dependent Variable : Kemauan Membayar (Y_1)					
b. Predictors : (Constant), Kemampuan Membayar (X_3), Kualitas Pelayanan (X_2), Tarif Retribusi (X_1)					

Sumber: Hasil Olah SPSS 26

Kriteria pengambilan keputusan : $H_0 =$ ditolak, jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 1%. Berdasarkan tabel 2 pada persamaan struktur 1 dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar **0.000**. Nilai signifikan $<$ dari α 1%, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2) dan Kemampuan Membayar (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemauan Membayar (Y_1). Variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2) dan Kemampuan Membayar (X_3) mempunyai nilai f_{hitung} yakni 9.260 dan f_{tabel} 2.479 dengan df_1 ($k-1=5-1$) , df_2 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai f_{hitung} yakni $9.260 > f_{tabel}$ 2.479. Artinya secara bersama-sama variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2) dan Kemampuan Membayar (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kemauan Membayar (Y_1).

Koefisien Determinasi

Tabel 14. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.494 ^a	.244	.218	2.276
a. Predictors : (Constant), Kemampuan Membayar (X_3), Kualitas Pelayanan (X_2), Tarif Retribusi (X_1)				

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Besarnya nilai R square adalah 0.244. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y_1 sebesar 24.4%, sementara sisanya 75,6% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak dimaksudkan didalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus :

$$e1 = \sqrt{(1-0.244)} = 0.869.$$

Dengan demikikan diperoleh diagram jalur model struktrur 1 sebagai berikut :

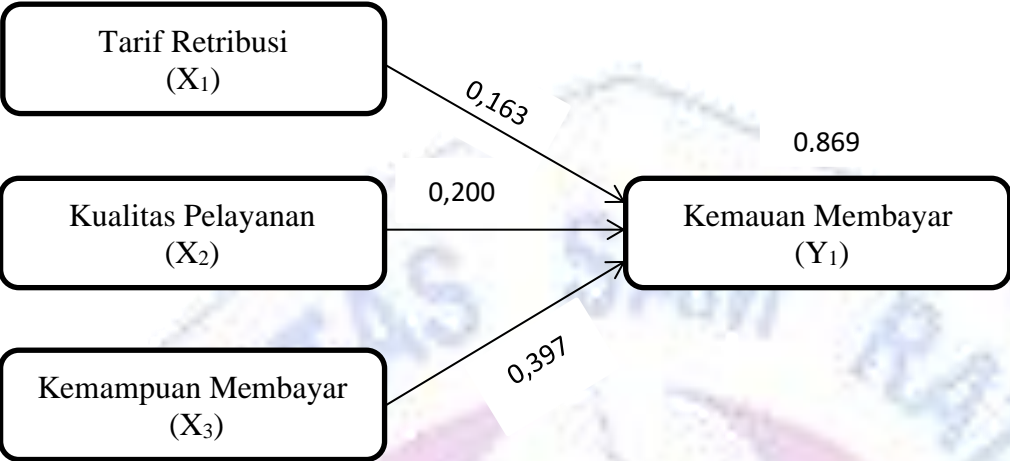


Diagram jalur diatas mempunyai persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_1 = a_1X_1+ a_2X_2+ a_3X_3 + e_1$$
$$Y_1 = 0.163 X_1 + 0.200 X_2 + 1.397 X_3 + e_1 0.869$$

Model Persamaan II
Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 15.
Uji Pengaruh T (parsial) untuk persamaan substruktur 2

		Coefficients ^a		t	sig
Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error		
1	(Constant)	4.283	1.959	2.186	.032
	Tarif Retribusi (X ₁)	.023	.038	.058	.550
	Kualitas Pelayanan (X ₂)	-.012	.047	-.025	.794
	Kemampuan Membayar (X ₃)	.030	.138	.022	.830
	Kemauan Membayar (Y ₁)	.369	.082	.484	.000
b. Dependent Variable : Pencapaian Target PAD Retribusi Persampaha/Kebersihan (Y ₂)					

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

1. Variabel Tarif Retribusi (X₁) Terhadap Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan (Y₂)
Kriteria pengambilan keputusan : H₀ = diterima, jika t_{hitung} < t_{tabel} atau nilai sig. < α 10 %.
Hasil persamaan regresi variabel Tarif Retribusi (X₁) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.550**. Nilai signifikan < dari α 10%, maka H_a ditolak H₀ diterima. Variabel Tarif Retribusi (X₁) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.601 dan t_{tabel} 1.29159 dengan df 10 (n-k = 90-5 = 85). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 0.601 < t_{tabel} 1.29159. Artinya tidak ada hubungan linier antara Tarif Retribusi (X₁) dengan pencapaian taerget PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y₂). Jadi, dapat disimpulkan tarif retribusi tidak berpengaruh terhadap pencapaian taerget PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y₂).
2. Variabel Kualitas Pelayanan (X₂) Terhadap Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan (Y₂)
Kriteria pengambilan keputusan : H₀ = diterima, jika t_{hitung} < t_{tabel} atau nilai sig. < α 10 %.
Hasil persamaan regresi variabel Kualitas Pelayanan (X₂) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.794**. Nilai signifikan < dari α 10%, maka H_a ditolak H₀ diterima. Variabel Kualitas Pelayanan (X₂) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.261 dan t_{tabel} 1.66298 dengan df 10 (n-k = 90-5 = 85). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 0.261 < t_{tabel} 1.66298. Artinya tidak ada hubungan linier antara Kualitas Pelayanan (X₂) dengan Pencapaian Target PAD retribusi

persampahan/kebersihan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap Pencapaian Target PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2).

3. Variabel Kemampuan Membayar (X_3) Terhadap Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan (Y_2)

Kriteria pengambilan keputusan : H_0 = diterima, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 10 %. Hasil persamaan regresi variabel Kemampuan Membayar (X_3) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.830**. Nilai signifikan $<$ dari α 10%, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel Kemampuan Membayar (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.215 dan t_{tabel} 2.37102 dengan df 10 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $0.215 < t_{tabel}$ 1.29103. Artinya tidak ada hubungan linier antara Kemampuan Membayar (X_3) dengan Pencapaian Target PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan kemampuan membayar tidak berpengaruh terhadap Pencapaian Target PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2).

4. Variabel Kemauan Membayar (Y_1) Terhadap Pencapaian Target PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan (Y_2)

Kriteria pengambilan keputusan : H_0 = diterima, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 1 %. Hasil persamaan regresi variabel Kemauan Membayar (Y_1) dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar **0.000**. Nilai signifikan $<$ dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel Kemauan Membayar (Y_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 4.498 dan t_{tabel} 2.37102 dengan df 10 ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $4.498 > t_{tabel}$ 2.37102. Artinya ada hubungan linier antara Kemauan Membayar (Y_1) dengan Pencapaian Target PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan Kemauan Membayar (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Target PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2).

Uji Statistik F (Uji F)

Tabel 16.

Uji Pengaruh F (secara bersama-sama) untuk persamaan substruktur 2

ANOVA ^a					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	88.023	4	22.006	7.351	.000 ^b
Residual	254.466	85	2.994		
Total	342.489	89			
a. Dependent Variable : Pencapaian Targer PAD Retibusi Persampahan/Kebersihan (Y_2)					
b. Predictors : (Constant), Kemauan Membayar (Y_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Tarif Retribusi (X_1), Kemampuan Membayar (X_3)					

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Kriteria pengambilan keputusan : H_0 = ditolak, jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai sig. $< \alpha$ 1%. Berdasarkan tabel 2 pada persamaan struktur 2 dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar **0.000**. Nilai signifikan $<$ dari α 1%, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2) , Kemampuan Membayar (X_3) dan Kamuan Pencapaian Target Penerimaan PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2). Variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Kemampuan Membayar (X_3) dan dan Kamuan Membayar (Y_1) mempunyai nilai f_{hitung} yakni 7.531 dan f_{tabel} 2.479 dengan df₁ ($k-1=5-1$) , df₂ ($n-k = 90-5 = 85$). Jadi, nilai f_{hitung} yakni $7.531 > f_{tabel}$ 2.479. Artinya secara bersama-sama variabel Tarif Retribusi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Kemampuan Membayar (X_3) dan Kemauan Membayar (Y_1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pencapaian Targer PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y_2).

Koefisien Determinasi

Tabel 17. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.507 ^a	.257	.222	1.730
Predictors : (Constant), Kemauan Membayar (Y ₁), Kualitas Pelayanan (X ₂), Tarif Retribusi (X ₁), Kemampuan Membayar (X ₃)				

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Besarnya nilai R square adalah 0.257. hal ini menunjukkan bawah kontribusi pengaruh Tarif Retribusi (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), Kemampuan Membayar (X₃) dan Kemauan Membayar (Y₁) terhadap Penerimaan PAD retribusi persampahan/kebersihan (Y₂) sebesar 25.7%, sementara sisanya 74,3% diperngaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimaksudkan didalam penelitian.\

Sementara itu, untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus :

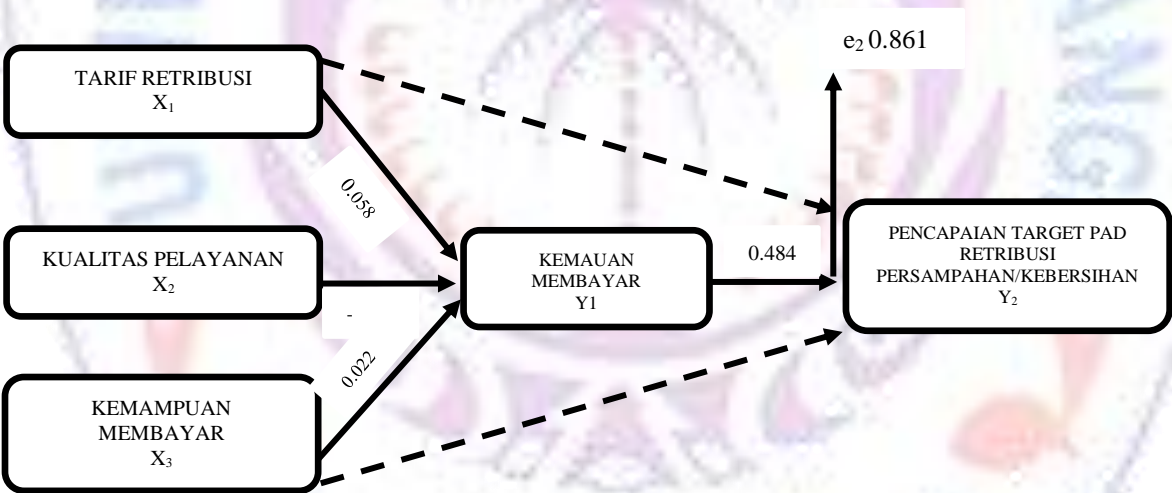
$$e1 = \sqrt{(1-0.257)} = 0.861.$$

Diagram jalur diatas mempunyai persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_2 = a_1X_1+ a_2X_2+ a_3X_3 + aY_1 + e_1$$
$$Y_2 = 0.058 X_1 - 0.025 X_2 + 0.022 X_3 + 0.484 Y_1 + e_1 \ 0.869$$

Dengan demikikan diperoleh diagram jalur model struktrur 2 sebagai berikut :

Gambar 1. Model Persamaan Jalur II



Menghitung Pengaruh Langsung (Direct Effect), Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) dan Pengaruh Total (Total Effect)

Tabel (Direct Effect), (Indirect Effect) dan (Total Effect)		
Pengaruh Langsung X ₁ ke Y ₁	=	0.083
Pengaruh Tak Langsung X ₁ ke Y ₂ melalui Y ₁	=	0.031 (0.083 x 0.369)
Pengaruh Total X ₁ ke Y ₁ ke Y ₂	=	0.452 (0.083 + 0.369)
Pengaruh Langsung X ₂ ke Y ₁	=	0.128
Pengaruh Tak Langsung X ₂ ke Y ₂ melalui Y ₁	=	0.047 (0.128 x 0.369)
Pengaruh Total X ₂ ke Y ₁ ke Y ₂	=	0.497 (0.128 + 0.369)
Pengaruh Langsung X ₃ ke Y ₁	=	0.688
Pengaruh Tak Langsung X ₃ ke Y ₂ melalui Y ₁	=	0.254 (0.688 x 0.369)
Pengaruh Total X ₃ ke Y ₁ ke Y ₂	=	1.057 (0.688 + 0.369)
Pengaruh Y ₁ ke Y ₂	=	0.369

Pembahasan

1. Pengaruh tarif retribusi, kualitas pelayanan dan kemampuan membayar terhadap kemauan membayar

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tarif retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Artinya apabila penetapan tarif retribusi pelayanan pasar semakin sesuai dengan persepsi dan kemampuan wajib retribusi maka kemauan membayar retribusi juga akan meningkat secara langsung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur As'Adah, dkk (2010) dan I Nengah Jaya, dkk (2014) yang menyatakan bahwa tarif retribusi sampah berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar retribusi, yang artinya jika tarif retribusi mengalami kenaikan di luar batas kemampuan membayar retribusi maka kemauan membayar retribusi akan menurun dan sebaliknya jika semakin sesuai tarif retribusi dengan kemampuan dan persepsi wajib retribusi maka kemauan membayar retribusi akan meningkat. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pedagang maka semakin tinggi juga kemauan membayar retribusi oleh pedagang. Penelitian lain yang sesuai dengan penelitian ini yaitu I Nengah Jaya, dkk (2014), dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah. kemampuan membayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Artinya apabila masyarakat mempunyai kemampuan untuk membayar maka akan mendorong kemauan membayar seseorang.

2. Pengaruh tarif retribusi, kualitas pelayanan dan kemampuan membayar terhadap Penerimaan Target PAD secara tidak langsung melalui kemauan membayar.

Berdasarkan hasil penelitian secara tidak langsung tarif retribusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. Ini berarti bahwa tarif retribusi berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. Ini berarti bahwa besarnya tarif retribusi yang ditetapkan telah memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan akan ada kesadaran dari masyarakat untuk mau membayar besarnya tarif retribusi. Kualitas pelayanan juga secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. Menurut Wechel & Kimberly dalam Widjonarko (2007). Kemauan membayar yaitu sebagai jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh individu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa layanan. Kualitas pelayanan yang baik yang diberikan kepada masyarakat memberikan rasa nyaman dan kepuasan sehingga mendorong kemauan masyarakat untuk membayar retribusi. Berdasarkan hasil penelitian kemampuan membayar secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. Hal ini disebabkan karena apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar retribusi sampah maka mereka akan memiliki kerelaan untuk membayar besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tarif retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. kemampuan membayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar.
2. Berdasarkan hasil penelitian secara tidak langsung tarif retribusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. Kualitas pelayanan juga secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar. . Berdasarkan hasil penelitian kemampuan membayar secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan target PAD melalui kemauan membayar.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan pelayanan pengangkutan sampah agar tingkat kemauan membayar lebih maksimal.
2. Petugas penagih idealnya setiap petugas menagih hanya 1 lingkungan agar seluruh wilayah dapat dijangkau. Sehingga target realisasi retribusi bisa terpenuhi.
3. Petugas penagih harus memiliki pengetahuan tentang Perda retribusi jasa umum.
4. Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana harus tepat waktu, menjaga kerusakan berkelanjutan dari kendaraan.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki model dalam penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan retribusi persampahan/kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Sakti Walenta, Fredrik Bastian Kawani (2020) Analysis of Potential Market Retribution Receipts on Poso District Revenue (PAD) Case Study in Tentena City Siwagilemba Market.
- Agus Isdarmawan, I Made Tirta, Yuliani Setia Dewi (2013) “ Pola-Pola Jalur Pada Path Analisis Untuk Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai UN SMA di Kabupaten Lumajang”,
- Ainaya Al Farihah (2020) “ Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 sampai dengan 2018)”,
- Andi Maujung Tjodi, Try Oldy Rotinsulu, George M.V. Kawung (2018) “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara)”,
- Awaludin Anwar, Chahyono, Arifuddin Mane (2022) “ Analisis Implementasi Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja ASN Melalui Kepuasan Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur”,
- Elza Hartaniza (2018) Kesadaran Pelaku Usaha Membayar Retribusi Persampahan Pada Pusat Pertokoan Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Edi Yanto, Fahri Eka Oktora, A. Irfan Efendi (2022) Analysis of the target achievement level of public services levy related waste services. Study on the government of tolitoli, central sulawesi.
- I Nengah Jaya (2014) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung”
- I Putu Irvan, Ni Luh Karmini (2016) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Varibel Intervening”
- Iswanti (2021) The Effect Of Regional Tax Revenue And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (A Case Study at the Seruyan District Financial and Asset Management Revenue Service).
- Jeiny Ribka Pandelaki (2021) “Analisis Efektivitas Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
- Noni Kumpangpune, David, P. E. Saerang, Daise S.M. Engka (2019) “ Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung”
- Roy Haris Oktabian (2020) Analisis Percepatan Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Persampahan Dengan Pemberian Reward Oleh Pihak Ketiga.
- Siti Sahara Azhar (2011) “Pengaruh Tingkat Pelayanan, Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Masyarakat Kota Medan Terhadap Penerimaan Retribusi Sampah.
- Sutianingsih, Shinta Eka Kartika dan Widowati (2021) Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Yaenal Arifin , (2016) Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Zamadila Rosyida Hasbullah, Kancitra Pharmawati¹, Yulianti Pratama (2020) Analisis Tarif Pengelolaan Sampah Berdasarkanability To Pay Danwillingness To Pay Di Kecamatan Cimahi Tengah. Studi Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP)

<http://repository.uinbanten.ac.id/1274/3/BAB%20II.pdf>

<http://e-journal.uajy.ac.id/8791/3/2EM14782.pdf>

http://e-journal.uajy.ac.id/26964/3/205103197_bab%203.pdf

<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/ERdTXm042fo19gvsNklFh63YPpOrGluMaxBCiceHVWjSZ7nw8z.pdf>

<https://konsultaskripsi.com/2020/10/09/asumsi-asumsi-path-analysis-skripsi-dan-tesis-2/>

<http://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/217/150>



PENGARUH PROFITABILITAS, EFISIENSI, JUMLAH KREDIT DAN PENYERTAAN MODAL BANK SULUTGO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Martino Calvyn Ratag¹, Anderson G. Kumenaung², Tri Oldy Rotinsulu³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: martinoratag2@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, o_rotinsulu@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Probabilitas, Efisiensi, Jumlah Kredit, Penyertaan Modal dan PAD

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of probability, efficiency, amount of credit and equity participation on the PAD of North Sulawesi Province. The analytical method used is multiple regression with the help of the SPSS application. The results of the study show that probability has a positive and significant effect on Regional Original Income in North Sulawesi Province. The results of the study show that efficiency has a positive and significant effect on Local Own Revenue in North Sulawesi Province. The results showed that the amount of credit had a positive and significant effect on Regional Original Income in North Sulawesi Province. The results showed that equity participation had a positive and significant effect on Regional Original Income in North Sulawesi Province. The results of the study show that probability, efficiency, amount of credit and capital investment simultaneously have a positive and significant effect on Regional Original Income in North Sulawesi Province.

Keywords: Probability, Efficiency, Amount of Credit, Equity and PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu basis yang paling mendasar di daerah dalam rangka pengembangan daerah secara mandiri. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Konsep pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem “swakelola mandiri”. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan insentif. Agar dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan BUMD/Perusahaan daerah, maka sangat diperlukan jiwa entrepreneurship yang baik di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang saham utama BUMD/perusahaan daerah (Sudarno, dkk 2010).

Upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menganggarkan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Penyertaan modal ini adalah merupakan investasi daerah yang sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan dorongan bagi pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari sendiri sumber pendapatan mereka, investasi daerah semisal pembelian surat berharga dan penyertaan modal dapat menjadi alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan mereka (Halim, 2012).

Di Indonesia perbankan dibagi dalam beberapa kategori kelompok perbankan, salah satu pembagian kategori perbankan di Indonesia yaitu berdasarkan kepemilikan bank yang dibagi kedalam 2 bentuk badan usaha yaitu bank pemerintah dan swasta. Dalam bank pemerintah sendiri kategori bentuk bank dibagi menjadi 2 bentuk badan usaha yaitu bank yang dipegang kendali penuh oleh pemerintah pusat atau sering disebut Bank BUMN, dan bank yang dipegang kendali oleh pemerintah daerah/kabupaten yang sering disebut Bank BUMD. Dalam susunan PAD, perusahaan BUMD memiliki peranan dalam mengisi pos Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah. Pos ini merupakan pendapatan yang didapat dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah/kabupaten dalam upaya peningkatan dan pengembangan (Kasmir; 2012).

Kinerja keuangan bank merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk dapat terus bertahan hidup. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Alat ukur kinerja yang dapat digunakan yaitu didasarkan pada laporan keuangan adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan supaya dapat mengetahui kinerja dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas Return On Asset (ROA) dan analisis rasio efisiensi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Sebagai bagian dari fungsi dasar bank maka penyaluran kredit merupakan salah satu hal penting khususnya berhubungan dengan sumber pendapatan. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, dengan demikian akan berdampak langsung pada semakin besar pula pendapatan yang akan di terima bank. Kontribusi pendapatan ini selanjutnya akan di perhitungkan bersama-sama dengan beban dan menghasilkan laba/rugi bagi perusahaan.

Bank SulutGo merupakan Bank daerah yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1961 dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan terakhir pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).

Status kepemilikan saham Bank SulutGo pada posisi 31 Desember 2021 yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 36,36%, Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 4,60%, Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut sebesar 3,88%, PT Mega Corpora sebesar 24,08%, dan seluruh Pemerintah Kab/Kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Besarnya persentase kepemilikan ini berhubungan langsung dengan jumlah penyertaan modal yang di berikan oleh masing-masing pemegang saham, yang selanjutnya akan menjadi dasar perhitungan dalam penerimaan hasil usaha atau deviden.

Bank SulutGo sebagaimana bank pada umumnya dinilai kinerja keuangannya berdasarkan rasio-rasio keuangan, indikator keuangan lainnya termasuk jumlah kredit dan penyertaan modal yang akan mencerminkan apakah bank ini bertumbuh, sehat serta memberikan keuntungan bagi shareholder dalam bentuk deviden.

Berdasarkan data-data yang diperoleh secara sekunder melalui link website <https://www.banksulutgo.co.id/bankreport/list/laporan-tahunan.html>, maka dapat diperoleh data kinerja keuangan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Rasio Profitabilitas, Rasio Efisiensi, Jumlah Kredit, Dan Penyertaan Modal Prov. Sulut Tahun 2017-2021
(dalam % dan Jutaan Rupiah)

RASIO KINERJA KEUANGAN	2017	2018	2019	2020	2021	% 2017-2018	% 2018-2019	% 2019-2020	% 2020-2021
ROA (Profitabilitas)	2,80	2,30	1,44	1,60	1,24	-17,86%	-37,39%	11,11%	-22,50%
BOPO (Efisiensi)	81,79	82,14	86,67	89,34	86,89	0,43%	5,51%	3,08%	-2,74%
Jumlah Kredit	10.792.402	10.968.976	12.030.932	12.172.029	12.767.966	1,64%	9,68%	1,17%	4,90%
Penyertaan Modal Prov. Sulut	297.471	297.471	352.471	372.471	372.471	0,00%	18,49%	5,67%	0,00%

Sumber : Annual Report Bank SulutGo 2017-2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa selain rasio BOPO, rasio ROA menunjukan angka persentase yang tidak konsisten menaik/menurun sejak tahun 2017 – 2021, sedangkan jumlah kredit dan Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Utara menunjukan adanya pertumbuhan yang konsisten.

Rasio keuangan tersebut menunjukan kinerja keuangan Bank SulutGo selang tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, namun demikian jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah penyertaan modal Provinsi Sulawesi Utara terus bertambah. Adapun hal ini akan secara langsung berdampak pada laba perusahaan dan kontribusinya terhadap para pemegang saham khususnya Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk deviden.

Bank SulutGo merupakan bank pembangunan daerah yang menjadi salah satu penyangga pos hasil kekayaan daerah yang dipisahkan didalam susunan PAD. Peran bank SulutGo dalam kontribusinya terhadap PAD karena adanya penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kekayaan daerah yang dimiliki. Pemerintah daerah memberikan kepercayaan terhadap bank daerah khususnya Bank SulutGo karena pemerintah melihat tingkat Kesehatan perusahaan dan tingkat probabilitas perusahaan daerah, karena dengan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah yang digunakan dengan baik oleh pihak bank tentunya dapat memberikan kontribusi PAD setiap tahunnya sebagai kontribusi bank SulutGo kepada pemerintah daerah melalui PAD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu pemegang saham dan juga sebagai pemegang saham pengendali di Bank SulutGo memiliki hak atas deviden yang akan dibagikan sesuai dengan laba bersih yang diperoleh pada tahun buku sebelumnya. Jumlah deviden yang adakan diterima oleh para pemegang saham ditetapkan persentasenya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan selanjutnya di bagikan kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan *share* saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham (*Shareholder*).

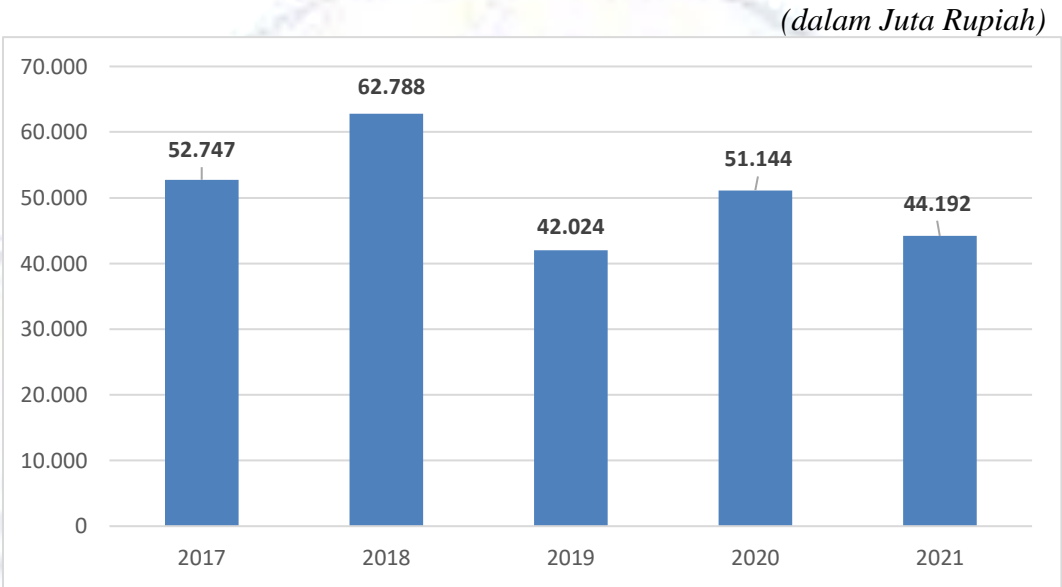
Tabel 2. Komposisi Saham (Penyertaan Modal) Bank SulutGo Tahun 2021

31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah / Total
Provinsi Sulawesi Utara	3.724.711	36,36%	372.471.100.000
Provinsi Gorontalo	470.940	4,60%	47.094.000.000
Pemda Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara			
Kabupaten Minahasa	274.336	2,68%	27.433.600.000
Kabupaten Bolaang Mongondow	159.411	1,56%	15.941.100.000
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	29.724	0,29%	2.972.400.000
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	80.014	0,78%	8.001.400.000
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60.234	0,59%	6.023.400.000
Kabupaten Minahasa Tenggara	50.010	0,49%	5.001.000.000
Kota Kotamobagu	76.767	0,75%	7.676.700.000
Kabupaten Sangihe	118.483	1,16%	11.848.300.000
Kabupaten Minahasa Selatan	77.102	0,75%	7.710.200.000
Kabupaten Minahasa Utara	45.854	0,45%	4.585.400.000
Kota Manado	250.030	2,44%	25.003.000.000
Kota Bitung	238.043	2,32%	23.804.300.000
Kota Tomohon	88.547	0,86%	8.854.700.000
Kabupaten Talaud	47.347	0,46%	4.734.700.000
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	37.170	0,36%	3.717.000.000
Pemda Kabupaten / Kota di Gorontalo			
Kota Gorontalo	290.243	2,83%	29.024.300.000
Kabupaten Gorontalo	258.386	2,52%	25.838.600.000
Kabupaten Boalemo	481.612	4,70%	48.161.200.000
Kabupaten Pohuwato	184.585	1,80%	18.458.500.000
Kabupaten Bone Bolango	120.154	1,17%	12.015.400.000
Kabupaten Gorontalo Utara	216.996	2,12%	21.699.600.000
Koperasi Karyawan PT Bank Sulut	397.058	3,88%	39.705.800.000
PT Mega Corpora	2.466.377	24,08%	246.637.700.000
Jumlah	10.244.134	100%	1.024.413.400.000

Sumber : Annual Report Bank SulutGo Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat komposisi *share* saham pada Bank SulutGo yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham (*shareholder*), yang umumnya merupakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Khusus untuk Pemerintah Sulawesi Utara memiliki *share* saham sebanyak 3.724.711 lembar dengan persentase kepemilikan sebanyak 36,36% dari total saham, dan menjadi pemegang saham terbanyak serta juga sebagai pemegang saham pengendali.

Grafik 1.
Jumlah PAD dari Deviden Bank SulutGo yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017 s.d 2021



Sumber : Annual Report Bank SulutGo Tahun 2017 s.d 2021

Berdasarkan grafik 1. dapat dilihat jumlah deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2017 s.d. 2021 mengalami pergerakan yang tidak pasti. Dengan adanya kondisi deviden tersebut seharusnya dapat dilihat pengaruhnya dari kinerja keuangan Bank SulutGo selang tahun 2017 s.d 2021 khususnya rasio profitabilitas, rasio efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal Pemprov. Sulawesi Utara, sebagai bentuk kontribusi Bank SulutGo pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya deviden. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul **“Pengaruh Probabilitas, Efisiensi, Jumlah Kredit dan Penyertaan Modal Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kredit Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, efisiensi, jumlah kredit, dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Bank SulutGo secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tinjauan Pustaka
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a) Pendapatan Daerah, yakni meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. Pendapatan Transfer; dan
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- b) Belanja Daerah, yakni meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - c) Pembiayaan daerah, yakni meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Rasio Keuangan Bank

Menurut Kasmir (2015), mengemukakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dalam satu laporan keuangan atau komponen yang ada diantara laporan keuangan.

1. Rasio Profitabilitas (*Return On Assets*)

Dalam penelitian ini, untuk mengukur profitabilitas bank peneliti menggunakan ROA (*Return on Assets*). Menurut Kasmir (2012), ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam hal untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia pada perusahaan. Jika rasio ROA $\geq 1,5\%$ dapat dikatakan sangat sehat, namun jika rasio ROA $\leq 0\%$ maka dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat.

Besarnya ratio ROA diperoleh dengan membagi seluruh laba yang diperoleh bank (sebelum pajak) dengan total asset bank tersebut. Semakin tinggi Return On Assets suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Dengan kata lain bank tersebut semakin optimal dalam penggunaan aktivitya untuk memperoleh pendapatan, maka berarti kegiatan kredit yang dilakukan oleh bank telah dioptimalkan dalam rangka memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya akan semakin meningkat jika nilai ROA yang dimiliki perbankan menunjukkan nilai yang tinggi.

Apabila Return On Asset meningkat, berarti profitabilitas bank meningkat, sehingga dampak akhir adalah peningkatan deviden yang dinikmati oleh pemegang saham.

2. *Rasio Efisiensi (Beban Operasional Pendapatan Operasional)*

Menurut Pandia (2012) bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional ratio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Semakin kecil ratio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2009) ratio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dengan batas maksimum BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) yaitu 90%. Efisiensi operasi juga mempengaruhi kinerja bank, BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil.

Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007).

(Malayu S.P.2007) Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Thomas dalam Ismail (2010) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

Penyertaan Modal

Semua perusahaan yang melakukan kegiatan pasti selalu membutuhkan dana, Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional kegiatan perusahaan maupun untuk investasi. Menurut Zaelani (2013) modal adalah dana yang seharusnya tetap ada dalam perusahaan sehingga operasional perusahaan menjadi lebih lancar serta tujuan akhir perusahaan untuk menghasilkan laba akan tercapai.

Kasmir (2012) mendefinisikan modal sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan Riyanto (2010) mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal, dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

Dari pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa modal kerja merupakan unsur utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan, Karena tanpa adanya modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Modal kerja dalam istilah lebih teknis adalah selisih dari aset atau harta lancar dengan kewajiban lancar.

Modal mutlak menjadi kebutuhan yang harus disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka diperlukan sumber-sumber serta jenis-jenis modal yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modalpun perlu diperhatikan akan untung ruginya sumber modal tersebut. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Menurut Saryadi (2013) Sumber modal dapat berasal dari modal operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, serta penjualan saham dan obligasi.

Adapun menurut Riyanto (2010) berdasarkan pendapat Taylor jenis-jenis modal yaitu :

- a. Modal permanen yang terdiri dari modal primer dan modal normal.
- b. Modal variabel yang terdiri atas modal kerja musiman, modal siklus, dan modal darurat.

Ada tiga konsep modal menurut Dewa (2015) diantaranya yaitu:

- a. Konsep Kuantitatif atau Modal Kerja Bruto Menurut konsep ini modal kerja adalah seluruh jumlah aktiva lancar. Berarti jumlah kas/bank + efek yang bisa diperjual belikan + piutang + persediaan.
- b. Konsep Kualitatif atau Modal Kerja Netto Menurut konsep ini modal kerja adalah selisih lebih jumlah aktiva lancar terhadap jumlah utang lancar.
- c. Konsep Fungsional Menurut konsep ini modal kerja adalah dana yang digunakan selama periode akuntansi untuk menghasilkan penghasilan yang utama (current income) pada saat sekarang ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan.

Penyertaan Modal dapat menopang kegiatan produksi dan penjualan sudah menjadi kejelasan ketika modal kerja mampu membiayai kegiatan produksi, kegiatan produksi yang lancar (dalam keadaan lain dianggap tetap) akan memperlancar penjualan. Ketika penjualan diperkirakan meningkat diperlukan dana untuk menambah persediaan, sementara dana dari penjualan belum tentu saja belum masuk, di situlah modal kerja akan mendanai persediaan hingga dana tersebut dapat diganti kembali dari hasil pembayaran oleh konsumen.

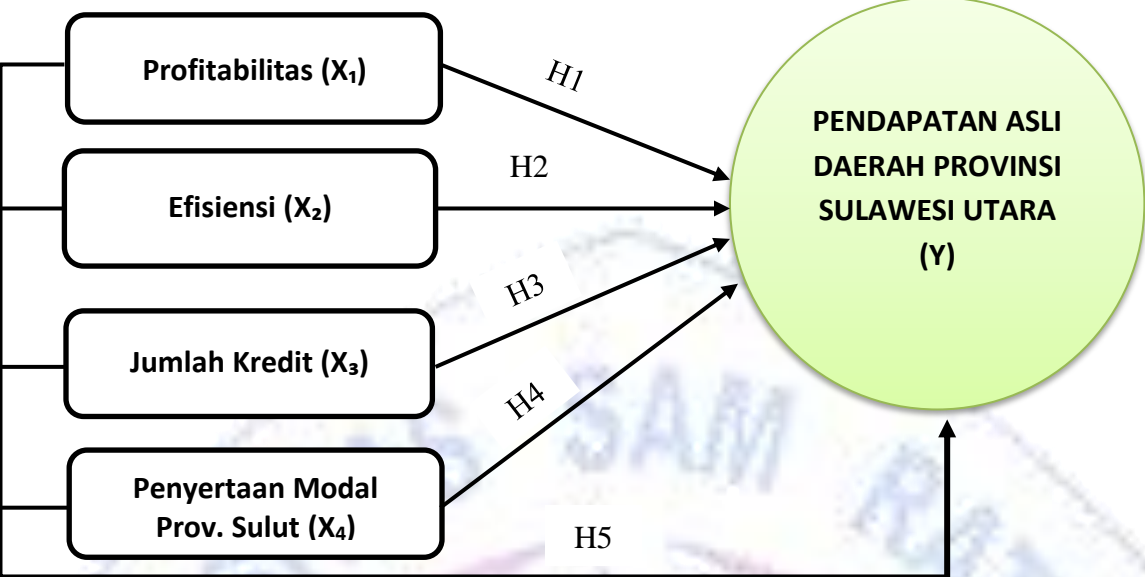
Deviden

Kebijakan deviden dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan. Kebijakan deviden merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Titin Herawati (2013) besarnya deviden yang dibagikan oleh perusahaan dapat memengaruhi harga saham karena menurut *Theory Bird In Hand*, investor lebih menyukai pengembalian yang berasal dari deviden dibandingkan dengan *capital gain*. Pembayaran deviden yang lebih besar tidak selalu dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Berdasarkan teori preferensi pajak pembayaran deviden yang rendah juga dapat meningkatkan harga saham.

Kebijakan deviden dapat dianggap sebagai salah satu komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian laba bersih yang diterima kepada para pemegang saham (Suad Husnan, 2006). Deviden tersebut yang menjadi alasan oleh investor ketika menanamkan dana untuk investasi. Perusahaan dalam membagikan deviden mempertimbangkan proporsi pembagian antara pembayaran kepada para pemegang saham dan reinvestasi dalam perusahaan. Di satu sisi, laba ditahan (*retaining earnings*) merupakan salah satu sumber pendanaan (hutang) yang sangat signifikan bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi di sisi lain deviden merupakan aliran kas yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Kebijakan deviden menyangkut penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham, karena pada dasarnya laba tersebut bisa dibagi sebagai deviden atau ditahan untuk diinvestasikan kembali (Taswan, 2006).

Kerangka Pemikiran



2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif, oleh karena data yang diperoleh masih perlu dianalisis dengan menggunakan metode statistika. Berdasarkan tingkat eksplanasi (penjelasan), jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu: penelitian yang menguji pengaruh antar variabel.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Bank SulutGo yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan sedangkan data kualitatif yang digunakan yaitu data mengenai gambaran umum objek penelitian seperti visi, misi, struktur organisasi serta sejarah singkat

Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank SulutGo yang dapat di akses melalui website www.banksulutgo.co.id dan melalui Divisi Akuntansi Bank SulutGo.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011:210):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + b_kX_k$$

Keterangan :

Y : nilai prediksi dari Y

a : bilangan konstan

b_1, b_2, \dots, b_k : koefisien variabel bebas

X_1, X_2, X_3, X_4 : variabel independent

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah (Dividen yang Diterima)

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X_1 : Profitabilitas (ROA)

X_2 : Efisiensi (BOPO)

X_3 : Jumlah Kredit

X_4 : Penyertaan Modal

e : Error

Menurut Widarjono (2016) untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji t, uji F dan Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*).

1. Uji t – test Statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut : Hipotesis :

- 1) $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Nilai t tabel dapat dicari dengan rumus : T tabel : $t_{\alpha : n-k}$. Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi) k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta
- 4) T hitung dapat dicari dengan rumus : Dimana : $t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$, β_i = koefisien regresi, $Se(\beta_i)$ = standar error Koefisien Regresi.
- 5) Kriteria pengujian :
 - a) Jika t hitung < t tabel, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - b) jika t hitung > maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F- test Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis :

- 1) $H_0 : \beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4=0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : \beta_1\neq\beta_2\neq\beta_3\neq\beta_4\neq 0$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 3) Nilai F table dapat dicari dengan rumus : F table : F $\alpha : n-k : k-1$, Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta, F-hitung diperoleh dengan rumus : $F= R^2 / (k-1) / (1-R^2) / (n-k)$. Dimana : R^2 = koefisien determinasi, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta. Kriteria pengujian :

a) Jika F hitung < F table, maka Ho diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika F hitung > F table, maka Ho ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punyai. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) regresi sederhana. $R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS}$, $R^2= 1-\frac{ESS}{TSS}, 1-\frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (y_i-\bar{y})^2}$. (Widarjono 2013 : 24)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, efisiensi, jumlah kredit, dan penyertaan modal Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2002-2021, digunakan Model Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan formula perubahan pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh perubahan faktor profitabilitas, efisiensi, jumlah kredit, dan penyertaan modal Bank SulutGo

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linera Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.989	.435		1.591	.011
Profitabilitas	.763	.324	.897	2.823	.001
Efisiensi	.884	.324	.897	2.817	.010
Jumlah kredit	.669	.239	.072	1.978	.005
Penyertaan modal	.576	.133	.658	1.886	.002

a. Dependent Variable:pendapatan asli daerah (dividen)

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS, menghasilkan persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2+ \beta_3X_3+ \beta_4X_4 + e$$
$$Y = 1,989 + 0,763 X_1 + 0,884 X_2 + 0,669 X_3 + 0,576 X_4$$

Hasil persamaan Regresi Linear Berganda ini menunjukkan bahwa :

- $\alpha = 1,989$

Merupakan besarnya nilai konstanta (*intercept*). 1.
Nilai konstanta sebesar 1,989 menyatakan bahwa jika nilai X1 profitabilitas, X2 Efisiensi, X3 Jumlah Kredit dan X4 Penyertaan Modal adalah (0) Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Sulawesi Utara melalui dividen (Y) adalah sebesar 1.989.
- $\beta_1 = 0,763$

Merupakan nilai Koefisien Regresi parsial dari variabel Profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Profitabilitas naik sebesar 1 juta, maka Pendapatan Asli Daerah (Dividen) akan meningkat sebesar 0,763 %, *ceteris paribus* (faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah atau tetap).
- $B_2 = 0,884$

Merupakan nilai Koefisien Regresi parsial dari variabel Efisiensi (BOPO). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Efisiensi naik sebesar 1 juta, maka Pendapatan Asli Daerah (Dividen) akan meningkat sebesar 0,884 %, *ceteris paribus* (faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah atau tetap).
- $\beta_3 = 0,669$

Merupakan nilai Koefisien Regresi parsial dari Jumlah Kredit . Hal ini menunjukkan bahwa apabila Jumlah Kredit naik sebesar 1 juta, maka Pendapatan Asli Daerah (Dividen) akan meningkat sebesar 0,669 %, *ceteris paribus* (faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah atau tetap).
- $\beta_4 = 0,576$

Merupakan nilai Koefisien Regresi parsial dari Penyertaan Modal . Hal ini menunjukkan bahwa apabila Penyertaan Modal naik sebesar 1 juta, maka Pendapatan Asli Daerah (Dividen) akan meningkat sebesar 0,576 %, *ceteris paribus* (faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah atau tetap).

Setelah mendapatkan nilai Koefisien Regresi parsial dari variabel bebas, maka perlu dilakukan Uji Statistik Regresi Linear Berganda untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel. Untuk Regresi Linear Berganda, Uji Statistik dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pengujian hipotesis secara parsial (dengan uji t) dan pengujian hipotesis secara serentak (dengan uji F) yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Uji Parsial (t-statistik)

Tabel 4. Hasil Uji t

VARIABEL	t-hitung	t-tabel	sig.	Hasil
Profitabilitas (ROA)	2,823	1,724	0,001	H ₁ diterima
Efisiensi (BOPO)	2,817		0,010	H ₁ diterima
Jumlah Kredit	1,978		0,005	H ₁ diterima
Penyertaan Modal	1,886		0,002	H ₁ diterima

Data Olahan SPSS 26

Variabel Profitabilitas (X₁)

Hasil persamaan regresi variabel profitabilitas dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.001. nilai signifikan lebih kecil dari α5%, maka Ha diterima Ho diolak. Variabel probabilitas mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.823 dan t_{tabel} 2.60248 dengan df 20 (n-k = 20-5 = 15). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 2.823 > t_{tabel} 2.60248. Artinya ada hubungan linier antara

probabilitas dengan PAD. Jadi, dapat disimpulkan probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Variabel Efisiensi (X₂)

Hasil persamaan regresi variabel efisiensi dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.010. nilai signifikan lebih kecil dari α5%, maka Ha diterima Ho diolak. Variabel probabilitas mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.817 dan t_{tabel} 2.60248 dengan df 20 (n-k = 20-5 = 15). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 2.817 > t_{tabel} 2.60248. Artinya ada hubungan linier antara efisiensi dengan PAD. Jadi, dapat disimpulkan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Variabel Jumlah Kredit (X₃)

Hasil persamaan regresi variabel jumlah kredit dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.005. nilai signifikan lebih kecil dari α5%, maka Ha diterima Ho diolak. Variabel jumlah kredit mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.978 dan t_{tabel} 2.60248 dengan df 20 (n-k = 20-5 = 15). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 1.978 > t_{tabel} 2.60248. Artinya ada hubungan linier antara jumlah kredit dengan PAD. Jadi, dapat disimpulkan jumlah kredir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Variabel Penyertaan Modal (X₄)

Hasil persamaan regresi variabel penyertaan modal dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.002. nilai signifikan lebih kecil dari α5%, maka Ha diterima Ho diolak. Variabel penyertaan modal mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.886 dan t_{tabel} 1.886 dengan df 20 (n-k = 20-5 = 15). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 1.886 > t_{tabel} 2.60248. Artinya ada hubungan linier antara penyertaan modal dengan PAD. Jadi, dapat disimpulkan penyertaan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

2. Koefisien Determinan (R²)

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 ^a	.826	.886	1.538	2.215

Data olah SPSS 26

Besarnya nilai R square adalah 0.826. hal ini menunjukan bawah kontribusi pengaruh probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal terhadap PAD sebesar 82,6%, sementara sisanya 17,4% diperngaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimaksudkan didalam penelitian.

3. Uji F-statistik

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5 dapat dijelaskan pengaruh variabel probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal. Secara simultan terhadap penerimaan PAD.

Tabel 6. Uji F Statistik

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.868	4	.364	11.869	.000 ^a
Residual	.698	19	.030		
Total	1.576	23			

Data olah SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 11.869 sedangkan F-tabel 3.06. Nilai F tabel berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/5-1) = 4$ dan df untuk denominator $(n-k/20-5) = 15$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal. secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas (ROA) Bank SolutGo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Return On Asset juga merupakan tingkat pengembalian investasi atas investasi perusahaan pada aktiva tetap yang digunakan untuk operasional. Return On Asset (ROA) yang semakin besar menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Maka imbalan yang diterima investor berupa pendapatan dividen semakin besar. Menurut Hery (2016) bahwa semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu bank, profitabilitas suatu bank menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Kumbirai dan Webb, 2010). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, semakin tinggi kemampuan yang dihasilkan maka perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham yang ada rasio keuntungan setelah pajak. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio ROA cukup tinggi maka perusahaan tersebut berkerja cukup efektif dan hal ini menjadi daya tarik bagi investor yang mengakibatkan peningkat nilai saham perusahaan yang bersangkutan dan karena nilainya meningkat maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh banyak investor yang akibatnya akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan satu dengan lainnya. Menurut Sudana (2011) bahwa semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Zufahni (2016) dan Lanawati, Amilin (2015), yang menyatakan bahwa terbukti Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Dividen.

Pengaruh Efisiensi (BOPO) Bank SolutGo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Efisiensi (BOPO) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap Dividen pada Bank SolutGo periode 2002-2021. Hal ini menunjukkan bahwa rasio Efisiensi (BOPO) mampu untuk meningkatkan Dividen. Menurut Pandia (2012) bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional ratio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang tidak mampu memperbaiki tingkat efisiensi usahanya maka akan kehilangan daya saing baik dalam hal mengerahkan dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana tersebut dalam bentuk modal usaha. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Purba (2019) yang menyatakan bahwa terbukti BOPO berpengaruh signifikan

terhadap Dividen namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen.

Pengaruh Jumlah Kredit Bank SulutGo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah Kredit yang disalurkan oleh Bank SulutGo berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan pihak Bank SulutGo maka besarnya dividen yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkat. Menurut Kasmir (2012) dalam sehari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan ataupun angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Menurut Ismail (2010) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan. Penelitian ini sejalan atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prisilia Karauan, Sri Murni dan Joy Tulung (2017) secara parsial Jumlah Kredit yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap Dividen sedangkan menurut Rosmita Rasyid (2018) Jumlah Kredit yang disalurkan berpengaruh negatif signifikan terhadap Dividen.

Pengaruh Penyertaan Modal ke Bank SulutGo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank SulutGo berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah memberikan investasi secara langsung berupa Penyertaan Modal Pemerintah kepada Bank SulutGo untuk mendukung program Pemerintah. Menurut Zaelani (2013) modal adalah dana yang seharusnya tetap ada dalam perusahaan sehingga operasional perusahaan menjadi lebih lancar serta tujuan akhir perusahaan untuk menghasilkan laba akan tercapai. Kasmir (2012) mendefinisikan modal sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan Riyanto (2010) mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal, dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit.

Penyertaan modal daerah pada berbagai jenis perusahaan daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta memperoleh dividen dalam suatu sistem keuangan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan teori oleh Suad Husnan (2006) bahwa kebijakan dividen dapat dianggap sebagai salah satu komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian laba bersih yang diterima kepada para pemegang saham.

Pengaruh Profitabilitas (ROA), Efisiensi (BOPO), Jumlah Kredit dan Penyertaan Modal Pemprov.Sulut pada Bank SulutGo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Profitabilitas (ROA), Efisiensi (BOPO), Jumlah Kredit dan Penyertaan Modal Pemprov.Sulut ke Bank SulutGo berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dividen) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi Bank SulutGo terhadap pendapatan asli daerah khususnya melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDD) sebagai imbal hasil penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini sejalan dengan teori menurut Halim (2004) bahwa salah satu pendapatan HPKDD adalah dari laba (dividen) Perusahaan Milik Daerah. Semakin tinggi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Bank SulutGo maka akan meningkatkan jumlah PAD yang diterima melalui Dividen.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas, efisiensi, jumlah kredit dan penyertaan modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan sehubungan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bank SulutGo pada dasarnya telah memiliki perhatian yang baik terhadap pendapatan asli daerah khususnya besaran dividen yang diterima oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, namun mengingat persaingan yang makin ketat dalam dunia usaha khususnya bidang perbankan, maka instansi harus terus memperhatikan Profitabilitas (ROA), Efisiensi (BOPO), Jumlah Kredit dan Penyertaan Modal sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kualitas besaran dividen yang diterima pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu pemegang saham dan juga sebagai pemegang saham pengendali dengan jumlah penyertaan modal terbesar, dapat memberikan dukungan baik terhadap bisnis Bank SulutGo seperti penghimpunan dana dan penyaluran kredit untuk meningkatkan kinerja keuangan bank, termasuk penyertaan modal untuk memperkuat Bank SulutGo melakukan kegiatan usahanya sehingga akan berdampak pada meningkatnya profit dan memberikan Dividen yang optimal bagi PAD Sulawesi Utara.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel yang diteliti, tidak hanya meliputi perbankan, tetapi dapat diperluas pada kelompok perusahaan BUMD lainnya, memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat dan menambah variabel lain yang mempengaruhi besarnya dividen yang diterima sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012** Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Aldiansyah Putra, Saryadi dan Wahyu Hidayat .2013.**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan BUMN(Non-Bank) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Diponegoro Journal of Social and Political.Universitas Diponegoro
- Agus Widarjono. (2016).** Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.
- Atik, Tri Wahyuni. 2014.** Pengaruh Client Importance dan Pergantian Auditor Terhadap Kualitas Audit. Surabaya
- Bambang Riyanto. 2010.** Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4, BPFYOGYAKARTA.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017).** Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewa, Aditya Putra. 2015.** Analisis Kinerja Keuangan pt Indofood Sukses Makmur Tbk Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 4, Nomer 3, Maret.
- Dendawijaya. 2009.** *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Gultom, M. L., Purba, D. P., Zepria, & Sinaga, R. (2019).** Pengaruh Current Ratio (Rasio Lancar), Return on Equity Dan Total Asset Turn Over (Tato) Terhadap Harga Saham Pada Sector Consumer Goods Industry Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Global Manajemen*, 8, 35–44.
- Husnan, Suad. 2006.** *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan H Malayu SP. 2007.** *Dasar-dasar Perbankan Jakarta* : Bumi Aksara
- Herawati, Titin. 2013.** *Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan*. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Hery. (2016).** *Akuntansi Dasar*. Jakarta: PT. Grasindo
- Ismail. 2010.** *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Prendamedia Group
- Kumbirai M. and Webb R. 2010.** A financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in So uth Africa. *African Review of Economics and Finance*, 2, 30- 53.
- Kasmir. 2012.** *Dasar-Dasar Perbankan Jakarta* : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2015.** *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir 2007.** *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prisilia Karauan, Sri Murni dan Joy Tulung (2017)** Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Bank Bumh Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017*, Hal. 935 – 944
- Pandia. 2012.** *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rasyid, Rosmita. 2018.** *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bei)*.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/1744>
- Sudarno, dkk. (2010).** “Pengaruh Penyertaan Modal Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. *Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 9 Nomor 2*.
- Siregar, Baldric. (2017).** *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sudana, I. 2011.** *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Taswan, 2006.** *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik & Aplikasi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Zuhafni ST. 2016.** Pengaruh “ROA” dan “DER” Terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 4, Nomor 3, September 2016* : 205 - 211.
- Zaelani, Koid, Abdul. 2013.** *Analisis Perbedaan Modal, pendapatan, Keuntungan dan Pengeluaran*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi.

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA LINGKUP KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA KEMENTERIAN KEUANGAN

Ismael Internasional Tarigan¹, Daisy S. M. Engka², Agnes L. Ch. P. Lopian³.

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email: ismaeltarigan061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Kompetensi SDM dan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. Data dikumpulkan dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai data primer. Sampel penelitian ini adalah seluruh *Person In Charge* (PIC) Pelaksana Anggaran pada lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut). Penelitian lapangan menggunakan Metode Kuantitatif dengan data cross-sectional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Handal, dan Sistem Informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Handal berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, sedangkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out empirical evidence regarding the effect of Budget Target Clarity, Budget Monitoring and Evaluation, HR Competence and Information System on the Effectiveness of Budget Execution in the scope of work at the Regional Offices of the Directorate General of State Assets of North Sulawesi, Central, Gorontalo and North Maluku. Data was collected by survey method using a questionnaire as primary data. The sample of this research is all Budget Executor Persons In Charge (PIC) in the scope of work at the Regional Office of the Directorate General of State Assets in North, Central Sulawesi, Gorontalo and North Maluku (Kanwil DJKN Suluttenggomalut). Field research using Quantitative Methods with cross-sectional data. Data analysis using validity test, reliability test, multiple linear regression, classical assumption test, t test, F test and the coefficient of determination.

The results of the study show that simultaneously Clarity of Budget Targets, Monitoring and Evaluation of Budget Implementation, Competence of Reliable Human Resources, and Information Systems have a significant effect on the effectiveness of Budget Execution in the Scope of Work at Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Partially Clarity of Budget Targets and Competency of Reliable Human Resources have an effect but not significant on the Effectiveness of Budget Execution in the Scope of Work at Kanwil DJKN Suluttenggomalut, have an effect but not significant on the effectiveness of Budget Execution in the Scope of Work at Kanwil DJKN Suluttenggomalut, while Monitoring and Evaluation of Budget Implementation and Information Systems Adequate budget management has a significant and positive effect on the effectiveness of Budget Execution in the Scope of Work at Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Keywords: Effectiveness of Budget Execution, Clarity of Budget Targets, Monitoring and Evaluation of Budget Execution, Competence of Human Resources, Information Systems

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Unsur-unsur yang membentuk PDB ini terdiri dari pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi.

Pelaksanaan anggaran belanja yang efektif secara tidak langsung akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara efektif sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi satuan kerja saat menyusun strategi dalam rangka memenuhi prinsip *good governance*.

Pengelolaan keuangan negara mempunyai 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat dieksekusi dengan baik bila telah dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lambatnya penunjukan tenaga pengelola keuangan, kebiasaan menunda pekerjaan dan tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran satuan kerja. Dalam hal penyerapan anggaran sudah dilakukan dan direalisasikan, masih perlu dipastikan apakah penyerapan tersebut juga sejalan dengan capaian output yang sudah dijadikan target pada setiap program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran. Hal ini perlu mendapat perhatian seluruh pelaksana teknis agar pelaksanaan anggaran dimaksud telah terwujud dengan efektif sehingga mengenai sasaran yang sudah ditetapkan.

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target utama alokasi anggaran. Performance Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcomenya. Hanya saja, variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian kita saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, semakin awal pelaksanaan kegiatan, manfaat serta efek stimulusnya juga semakin besar. Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun, padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena tertunda menerima manfaat.

Pelaksanaan anggaran belanja yang efektif terlihat dari alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional guna mewujudkan output yang telah ditentukan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomallut) memiliki Rincian Output sebanyak 17 jenis pada tahun 2022 beserta target output yang telah ditetapkan, dapat dilihat di

tabel di bawah. Pada akhir tahun anggaran, seluruh output tersebut dapat dicapai bahkan terdapat beberapa Rincian Output yang target outputnya dapat tercapai hingga 120%. Demikian pula dengan alokasi anggaran pada setiap Rincian Output, penyerapannya diakhir tahun dapat direalisasikan di atas 90%. Pelaksanaan anggaran yang efektif tidak hanya dilihat dari pencapaian di akhir tahun saja tetapi harus proporsional setiap triwulan sesuai trajectory penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disampaikan setiap bulannya.

Tabel 1. Program>Nama Rincian Output dan target output anggaran pada Kanwil DJKN Suluttenggomalat TA 2022

NO	Bidang/ Bagian	Program/ Kode RO	Nama Rincian Output	Volume	Satuan
		015.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	5.289	
1	Bidang PKN	4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	88	layanan
2	Bidang PN/Lelang	4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	35	layanan
3	Bidang PKN	4797.FAE.002	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1	Laporan
4	Bidang PKN	4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1	peraturan
5	Bidang PN	4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	126	peraturan
6	Bidang PKN	4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	5.024	Laporan
7	Bidang PKN	4798.FAE.006	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Laporan
8	Bidang Penilaian	4798.FAE.007	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Laporan
9	Bidang Lelang	4798.FAE.009	Penggalan Potensi Lelang	4	Laporan
10	Bidang PKN	4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	7	Unit
11	Bidang Lelang	4801.AAH.002	Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	1	peraturan
		015.WA	Program Dukungan Manajemen	80	
12	Bidang KIH	4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	2	layanan
13	Bagian Umum	4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12	layanan
14	Bagian mum	4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	layanan
15	Bidang KIH	4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	25	layanan
16	Bidang KIH	4702.BMB.002	Kehumasan	24	layanan
17	Bidang KIH	4704.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Laporan

Pelaksanaan belanja-belanja pemerintah harus dilakukan sesuai rencana dan dipastikan tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga target penyerapan dapat tercapai sesuai harapan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran akan mengakibatkan hilangnya manfaat dari belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas

kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, antara lain Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. Keempat faktor ini akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran belanja secara akurat, tepat jumlah dan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka menarik untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomallut), Kementerian Keuangan. Dengan melakukan analisa ini, kita akan mendapat pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di sebuah satuan kerja dari sisi kenyataan di lapangan dihubungkan dengan teori efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan melakukan kajian ini, sebagai seorang akademisi setidaknya bisa memberikan sumbangsih yang nyata dalam bentuk usulan pemikiran berdasarkan kajian akademis untuk tujuan kebaikan yaitu bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan besarnya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomallut).
2. Untuk menentukan besarnya pengaruh Monitoring Pelaksanaan anggaran belanja, terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
3. Untuk menentukan besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
4. Untuk menentukan besarnya pengaruh Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
5. Untuk menentukan besarnya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, Kompetensi SDM, dan Sistem Informasi secara bersama-sama (simultan) terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Anggaran menurut Rudianto (2009) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Dengan kata lain anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

Anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2010: 139).

Belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diteruskan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Non K/L. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal di bidang belanja negara, belanja K/L merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, antara lain meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja untuk mendorong pengelolaan belanja agar dapat dilakukan secara lebih efisien namun efektif.

Ada tiga fungsi anggaran menurut Munandar (2000) yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Fungsi pertama memposisikan anggaran sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan. Anggaran

merupakan aspek perencanaan yang penting, menggunakan dana (sumber daya) yang tersedia seefisien mungkin. Fungsi kedua yaitu anggaran sebagai alat koordinasi, dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keselarasan tujuan. Maka dari itu, anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi mampu menyelaraskan kegiatan dan tujuan satuan kerja. Selanjutnya disebutkan fungsi ketiga anggaran sebagai alat pengawasan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya merupakan bentuk dari pengawasan tersebut. Melalui perbandingan tersebut dapat dilihat seberapa jauh slack (perbedaan) dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga satuan kerja dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya.

Dari fungsi anggaran yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengingat anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kerja dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai organisasi, maka anggaran dapat digunakan pula sebagai alat bantu untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik, dengan kata lain agar dapat meningkatkan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang baik akan memberikan manfaat yang positif bagi sebuah organisasi.

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Mahmudi (2015: 86) menjelaskan bahwa Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. DIPA dapat dieksekusi dengan baik bila telah dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, masih perlu dipastikan apakah penyerapan tersebut juga sejalan dengan capaian output yang sudah dijadikan target pada setiap program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran. Hal ini perlu mendapat perhatian seluruh pelaksana teknis agar pelaksanaan anggaran dimaksud telah terwujud dengan efektif sehingga mengenai sasaran yang sudah ditetapkan.

Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan yang berisi pekerjaan belanja yang diusulkan dalam satu periode dari sumber pendapatan yang diusulkan membiayai belanja dalam satuan moneter tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan (Mardiasmo, 2002).

Dari pengertian efektivitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran adalah ukuran berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran pada suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, disebutkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja adalah tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker secara akurat. Artinya Pelaksanaan anggaran yang efektif tidak hanya dilihat dari pencapaian seluruh output dan penyerapan anggaran terealisasi di atas 90% di akhir tahun saja tetapi harus proporsional setiap triwulan sesuai trajectory penyerapan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan jenis belanja, serta sejalan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disiapkan setiap bulannya dan dituangkan ke dalam dokumen penganggaran.

Efektivitas pengelolaan keuangan merupakan jembatan untuk mengantarkan suatu pemerintahan mencapai *good governance*. Semua aspek dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan dari program dan kegiatan satuan kerja dapat tercapai. Hal ini karena anggaran pemerintah yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, Pelaksanaan anggaran belanja yang efektif akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu

pelaksanaan anggaran yang efektif sangat penting menjadi perhatian setiap pemerintah daerah atau satuan kerja pada daerah tersebut harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sondang P. Siagian (2001) berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula (S.P Siagian 2005:171). Artinya semakin jelas sasaran yang ditetapkan pada dokumen anggaran maka semakin mudah mengarahkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan sasaran tersebut, sehingga lebih efektif pelaksanaannya.

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara efektif, yaitu Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan telah memenuhi capaian output yang telah ditetapkan setiap bulannya. Penilaian dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab (Munawar, 2006). Dengan adanya monitoring dan evaluasi maka dapat menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja. Di samping itu, pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien bila telah didukung dengan SDM dan Sistem Informasi yang memadai. Semua faktor ini akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran belanja secara akurat, tepat jumlah dan tepat waktu.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa individu yang memiliki tujuan dan menyadarinya akan berusaha mencapai tujuan tersebut (Latham, 2004). Penetapan tujuan di awal akan membantu individu untuk mencapai tujuannya guna membantu meningkatkan kinerjanya. DuBrin (2012); Greenberg (2011); dan Newstrom (2011) dalam Lunenburg (2011) menyatakan bahwa pada situasi yang tepat, teori penetapan tujuan (*goal setting*) dapat menjadi teknik yang efektif dalam memotivasi anggota dari sebuah organisasi. Tujuan yang spesifik (jelas) akan membantu individu untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kemajuan mereka dalam proses pencapaian tujuan tersebut, sehingga efektivitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dapat tercapai. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Anggaran sebagai sarana menerjemahkan seluruh kegiatan organisasi secara rinci harus direncanakan secara jelas sesuai dengan sasaran dan misi sasaran organisasi. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara jelas dan rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas pada satuan kerja, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas satuan kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Definisi monitoring secara mendasar berprinsip pada penggunaan yang serupa yakni bahwa monitoring merupakan pengawasan yang dilakukan berkelanjutan pada fungsi aktivitas terhadap kontekstual berbagai jadwal-jadwal ketika melaksanakan serta dalam menggunakan masukkan aktivitas dari organisasi pada kontekstual melalui ekspektasi yang sudah dirancang sebelumnya (Fauzia, 2018). Sedangkan menurut Mthethwa dan Jili (2019) evaluasi merupakan

salah satu bentuk penerapan dalam pemeriksaan tahapan untuk mengumpulkan maupun menyusun bukti-bukti berdasarkan hal-hal yang penting disertai keefektifan, keefisienan, serta berbagai nilai dari bermacam-macam intervensi.

Beberapa pakar manajemen mengemukakan bahwa fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conner (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Manajemen pada umumnya menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring).

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (2003), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Ketaatan (*compliance*). Pelaksanaan monitoring dapat menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*). Pelaksanaan monitoring dapat menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- 3) Laporan (*accounting*). Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan (*explanation*). Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama dalam upaya untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “*on the track*” sesuai tujuan rencana proyek dan program. Monitoring dapat disebut sebagai “*on going evaluation*,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah “*terminate evaluation*,” yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek/program berikutnya. Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam peningkatan performa atau kinerja pegawai dan meminimalisir terjadinya penyelewengan tugas maupun wewenang (Ostasius & Laukaitis, 2015).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 045/U/2020 Pasal 1). Sedangkan menurut *Internasional Organization for Standardization*, 2012, definisi kompetensi adalah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab suatu organisasi atau instansi harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Sumber daya manusia dibutuhkan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang dapat membentuk suatu strategi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai suatu tujuan sumber daya manusia sangatlah menentukan.

Sutrisno (2012:7) menyatakan Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahan kunci pendorong yang tidak bisa lepas dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia, Sugian (2008:12).

Dari apa yang dijelaskan di atas dapat kita lihat, bahwa sumber daya manusia sangatlah berpengaruh bagi suatu instansi atau organisasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia merupakan suatu bagian yang berperan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun sekarang ini kita hidup di zaman perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju dan sangat canggih, namun dari semuanya itu membutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan semuanya itu.

Sistem Informasi

Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dalam suatu sistem terdapat kumpulan beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain untuk bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Jika suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya.

Menurut Tata Sutarbi (2003) Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relative tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya.

Informasi (*information*) didefinisikan oleh Hartono (2005) sebagai data yang diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Dari definisi informasi ini, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah:

1. data yang diolah;
2. menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya.

Sistem Informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru.

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari segi fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksanaannya yang secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi informasi merupakan suatu proses berurutan dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan komunikasi/desiminasi. Selanjutnya sistem informasi dikatakan berdaya guna jika mampu menghasilkan informasi yang baik, tinggi akurasi, tepat waktu, lengkap dan ringkas isinya.

Penelitian Terdahulu

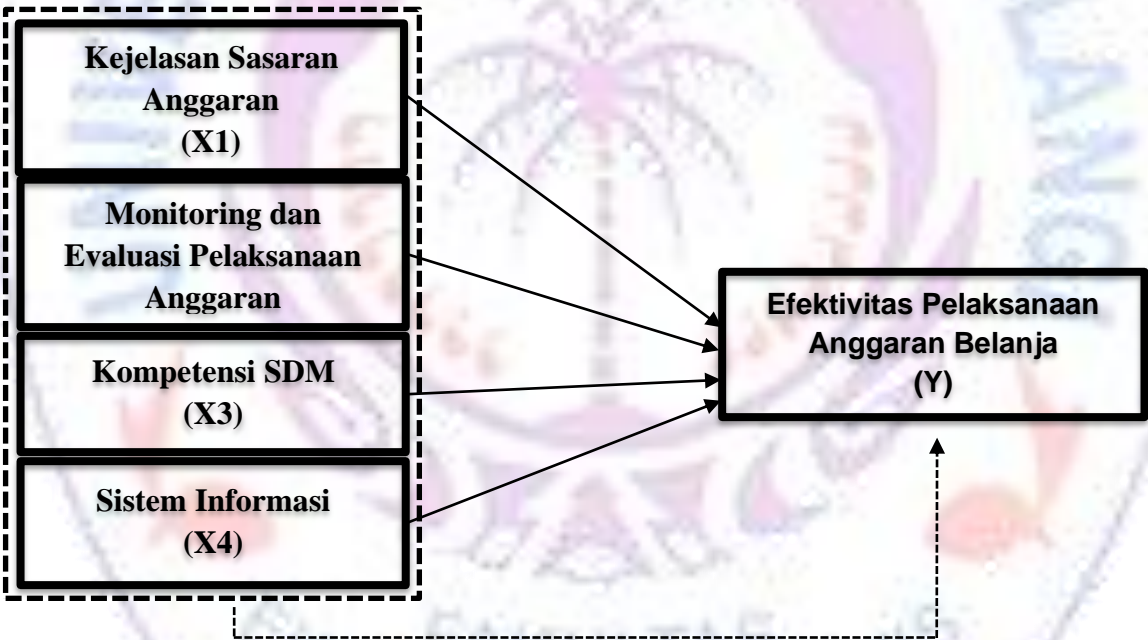
Priscilia Grace Bay, Maria Elerina Douk Tunti (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah kasubag, kabid, kasubid, dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 45 responden, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar. Analisisnya didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 21, dengan hasil penelitian: (1) Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Tidak terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hornal Kenal Ontorael, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan Metode perhitungan kuadran terkecil (ordinary least square) dimana anggaran berbasis kinerja sebagai variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen yaitu anggaran yang digunakan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Dengan menggunakan metode pengambilan data primer atau dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan manajemen keuangan dan aset daerah. Hasil bahwa anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, serta dengan menghitung secara individual menggunakan t-hitung juga mendapat hasil positif dan signifikan.

Achmad Faisal Daulay, Muhammad Arfan, Hasan Basri (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Responden penelitian Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kota Lhokseumawe.

Kerangka Konseptual



2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer. Menurut Menurut Uma Sekaran (2013:113) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. Jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut berupa persepsi atau tanggapan karyawan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para responden penelitian dengan cara memberikan daftar pertanyaan/ Pernyataan yang akan diisi atau dijawab oleh para responden. Pengukuran skor variabel menggunakan Skala Likert 5 (lima) point yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini (Uma Sekaran, 2013). Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh PIC anggaran yang terdapat di masing-masing Seksi/Bidang/Bagian pada lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomaltut.

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka digunakan teknik pengambilan sampel dengan sensus sampling. Sensus sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan cara mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sehingga dalam penelitian ini, sampel yang dipakai yaitu seluruh PIC anggaran yang terdapat di masing-masing Seksi/Sub Bagian/Bidang/Bagian pada lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomaltut. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kuesioner yang akan dibagikan

No	Nama Jabatan	Jumlah Kuisisioner
1	Kepala Kanwil	1
2	Kepala KPKNL	4
3	Kepala Bidang/Bagian	6
4	Kepala Seksi/Sub Bagian	27
5	Bendahara	5
6	Pelaksana (Staf) PIC Anggaran	26
Jumlah Kuisisioner yang dibagikan		69

Keterangan: Rangkap jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) hanya dihitung sebagai satu responden

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomaltut) yang terdiri dari Kanwil DJKN Suluttenggomaltut sebagai satuan kerja beserta 4 (empat) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang ada dibawahnya.

Penelitian akan berlangsung selama periode waktu tertentu yaitu kurang dari satu tahun, maka metode yang digunakan adalah cross sectional method. Menurut Uma Sekaran (2013:106) penelitian dapat dilakukan dimana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi seperti ini disebut *one-shot* atau metode *cross sectional*. Kelebihan menggunakan metode *cross-sectional* adalah mudah dilaksanakan, sederhana, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat.

Selanjutnya diolah dengan menggunakan uji statistik, yaitu: (1) uji statistik deskriptif; (2) uji kualitas data: uji validitas dan uji reliabilitas; (3) uji hipotesis: analisis regresi linear berganda, uji statistik t dan uji f.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Kompetensi SDM dan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kanwil DJKN Suluttenggomaltut dan seluruh KPKNL dibawahnya (KPKNL Manado, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, KPKNL Ternate yang menjadi PIC Anggaran yakni Seluruh Kepala Kantor, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub

Bagian/Seksi, Bendahara, serta staf PIC Anggaran. Pada saat penelitian dilakukan, terdapat 5 (lima) jabatan Kepala Sub Bagian/Seksi yang masih kosong/ merangkap selaku Pelaksana Tugas (Plt.) sehingga hanya dihitung sebagai 1 (satu) responden, dengan jumlah populasi sebanyak 69 pegawai. Namun pada saat kuesioner penelitian dibagikan, hanya 57 pegawai atau sebesar 82,6% pegawai/responden yang mengisi formulir kuesioner dan dapat diperoleh datanya.

Responden dalam sampel penelitian ini adalah responden yang berasal dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut sebanyak 23 orang (40%), KPKNL Manado sebanyak 10 orang (18%), KPKNL Gorontalo sebanyak 9 orang (16%), KPKNL Ternate sebanyak 8 orang (14%) dan KPKNL Palu sebanyak 7 orang (12%), jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Responden berdasarkan Jabatan, diketahui bahwa Pelaksana sebanyak 30 orang (53%), Kepala Seksi/Sub Bagian sebanyak 19 orang (33%), Kepala Bidang/Bagian sebanyak 5 orang (9%), dan Kepala Kantor sebanyak 3 orang (5%). Jumlah responden tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang (7%), tingkat DIII (Diploma) sebanyak 15 orang (26%), kemudian dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 26 orang (46%), untuk S2 (Magister) sebanyak 12 orang (21%).

Hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa semua item lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner Kejelasan Sasaran Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Kompetensi SDM, Sistem Informasi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha (α) > 0,5 yang berarti semua variabel reliabel. Hal ini berarti bahwa item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh dan hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Monitoring dan Evaluasi Anggaran (X_2), Kompetensi SDM (X_3) dan Sistem Informasi (X_4) terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara (Y), maka selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui persamaan Regresi Linier Berganda.

Pengujian Model Regresi

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model persamaan dalam penelitian ini adalah dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Tabel 3. Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/23/22 Time: 03:04
Sample: 1 57
Included observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.839398	0.611743	1.372140	0.1759
X1	0.140526	0.151582	0.927064	0.3582
X2	0.470993	0.157977	2.981413	0.0044
X3	0.018036	0.083111	0.217008	0.8291
X4	0.190521	0.141391	1.347473	0.0837
R-squared	0.543687	Mean dependent var	4.792398	
Adjusted R-squared	0.508586	S.D. dependent var	0.352543	
S.E. of regression	0.247136	Akaike info criterion	0.125872	
Sum squared resid	3.175954	Schwarz criterion	0.305087	
Log likelihood	1.412637	Hannan-Quinn criter.	0.195521	
F-statistic	15.48924	Durbin-Watson stat	0.020117	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

$Y = 0,839398 + 0,140526 X_1 + 0,470993X_2 + 0.018036 X_3 + 0,190521 X_4 + e$
Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,839398 menyatakan bahwa jika nilai Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2), Sumber Daya Manusia Handal (X_3) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) adalah 0 (nol), Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut (Y) adalah sebesar 0,839398.
2. Nilai koefisien regresi Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) memiliki hubungan positif 0,140526, artinya setiap kenaikan 1 satuan Kejelasan Sasaran Anggaran, maka efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut akan mengalami kenaikan 0,140526, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) memiliki hubungan positif 0,470993, artinya setiap kenaikan 1 satuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, maka efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut akan mengalami kenaikan 0,470993, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
4. Nilai koefisien regresi Sumber Daya Manusia Handal (X_3) memiliki hubungan positif 0,018036, artinya setiap kenaikan 1 satuan Sumber Daya Manusia Handal, maka efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut akan mengalami kenaikan 0,018036, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
5. Nilai koefisien regresi Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) memiliki hubungan positif 0,190521, artinya setiap kenaikan 1 satuan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran, maka efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut akan mengalami kenaikan 0,190521, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.543687 atau 54,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2), Sumber Daya Manusia Handal (X_3) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 54,36% terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistic F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variable terikat. Dari hasil pengolahan menggunakan eviws dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.01$, Prob (F-statistik) $0,00000 < \alpha = 0.01$, yang artinya semua variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y .

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil uji t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviws menunjukkan adanya tingkat signifikansi Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2), Sumber Daya Manusia Handal (X_3) dan Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3582. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_1 $0,3582 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
2. Variabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0044 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.01$, Nilai probabilitas X_2 $0,0044 < 0,01$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.

3. Sumber Daya Manusia Handal (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8291. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X_3 sebesar $0,8291 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Handal (X_3) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
4. Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0837. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, nilai probabilitas X_4 sebesar $0,0837 < 0,10$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.
5. Dilihat dari koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) lebih besar dan signifikan dari Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4).

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pertama menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Namun demikian, mengingat nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai hubungan yang searah dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan sejauhmana tujuan anggaran program dan kegiatan dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran. Jadi disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran.

Hasil penelitian Daulay *et al* (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kota Lhokseumawe.

Demikian juga dengan hasil penelitian Nurzianti, R., Anita. (2014) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar”, Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar.

Sasaran yang tidak jelas dapat mengakibatkan tujuan yang akan dicapai juga menjadi tidak jelas sehingga efektivitas pengelolaan keuangan tidak dapat dicapai. Kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program dan kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam RKA ini juga telah diuraikan target output beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran ini dilaksanakan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar.

Pengaruh Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa Variabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomallut. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan telah memenuhi capaian output yang telah ditetapkan setiap bulannya. Penilaian dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dan dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Masing-masing Bidang/Bagian/Seksi/Sub

Bagian yang memiliki Rincian Output perlu dimonitoring dan evaluasi secara rutin terutama dalam penyerapan anggaran sebagaimana telah disusun dalam dokumen penganggaran. Hasil estimasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) menunjukkan bahwa variabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) berhubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Daulay *et al* (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kota Lhokseumawe. Dengan adanya monitoring dan evaluasi maka dapat menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa Variabel Sumber Daya Manusia Handal (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ontorael *et al* (2018) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, sumber daya manusia dan sistem informasi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.

Dengan adanya SDM yang mumpuni maka diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih dimaksimalkan, selain itu perlu juga adanya faktor pendukung lainnya seperti informasi untuk dapat mengembangkan kemampuan SDM serta bahan masukan dan referensi dalam mengelola keuangan daerah seefektif mungkin. Selain faktor Sumber Daya Manusia perlu juga didorong dengan adanya sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi yang memadai maka diharapkan akan memberikan dampak kepada kinerja pegawai yang bertugas mengelola keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Yang Memadai Dalam Pengelolaan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Lingkup Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Dilihat dari koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) lebih besar dan signifikan dari Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4). Pada lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalut Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini memang rutin dilakukan setiap bulannya untuk memantau realisasi capaian output. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, disebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran adalah tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker secara akurat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ontorael *et al* (2018) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, sistem informasi secara bersama-sama maupun parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) pada lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Secara parsial variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan namun secara bersama-sama (simultan) variabel ini berpengaruh terhadap efektivitas Pelaksanaan Anggaran.
2. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh Variabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, bahwa Variabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.
3. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh Variabel Sumber Daya Manusia Handal (X_3) terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, bahwa Sumber Daya Manusia Handal (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.
4. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh Variabel Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, bahwa Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_3) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.
5. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (X_2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3), Sistem Informasi yang memadai dalam pengelolaan anggaran (X_4) pada lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Saran

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan agar tetap dipertahankan karena kegiatan ini sangat berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Kegiatan Monev ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan telah memenuhi capaian output yang telah ditetapkan setiap bulannya. Penilaian dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.
2. Menerapkan *Reward and punishment* terhadap Bidang/Bagian pada Kanwil atau terhadap Seksi/Sub Bagian pada KPKNL agar merasa dihargai atas prestasi yang dicapai dan memberikan sanksi atau teguran bila kurang optimal melaksanakan anggaran belanja sesuai dengan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan.
3. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi maka perlu selalu mempersiapkan kesiapan bila terjadi perubahan terkhususnya di dalam penggunaan IT dalam proses pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup kerja Kantor Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Faisal Daulay, Muhammad Arfan, Hasan Basri (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas

- Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.4 No.3 , 39-48.
- BPKP. (2011).** Menyoal Penyerapan Anggaran. Yogyakarta: Paris Review.
- Fauzia, E. (2018).** Sistem Informasi Laporan Monitoring Evaluasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. *Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 8(9), 657–662.
- Hartono, Jogyanto. 2005.** *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hornal Kenal Ontorael, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko (2018).** Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.1
- Kenis, I. (1979).** *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review. Vol. LIV. No.4. October. pp. 707-721
- Latham, G. P. (2004).** *The motivational benefits of goal-setting*. The Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 4, hlm: 126-129.
- Lunenburg, F. C. (2011).** *Goal-Setting Theory of Motivation*. International Journal of Management, Business, and Administration, Vol. 15, No. 1, Hal: 1
- Mardiasmo. (2009).** *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mahmudi. (2015).** *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Ketiga.
- M. Munandar (2000).** *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE
- Munawar. 2006.** Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Politeknik Negeri Kupang.
- Mthethwa, R. M., and Jili, N. N. (2019).** *Challenges in implementing monitoring and evaluation (M & E) The case of the Mfolozi Municipality*. *African Journal of Public Aaffaire*, 3(2), 102– 113.
- Nurzianti, R., Anita. (2014).** Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.1 No.1, 58–71.
- Ostasius, E., & Laukaitis, A. (2015).** Reference Model for E-Government Monitoring, Evaluation and Benchmarking. 26 No. 3.
- Priscilia Grace Bay, Maria Elerina Douk Tunti (2019).** Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol.7 No.2 , 138-147.
- Prof. Dr. J. Winardi, S.E. (2004).** *Manajemen Prilaku Organisasi* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP) cet. 4, Hlm. 383
- Republik Indonesia. (2003).** Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. *Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286*.
- Republik Indonesia. (2018).** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840*.
- Rudianto. (2009).** *Penganggaran*. Jakarta : Erlangga
- Rachmat. (2010).** *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sekaran, U. d. (2013).** *Research Methods For Bussiness: A Skill Builing Approach*. Edisi 6: Wiley.
- Sugiyono. (2010).** *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugian, S. 2008.** Kamus Manajemen (Mutu). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, Edy. 2012.** *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang P. (2001).** *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang, S. (2008).** *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Tata Sutarbi. (2003).** *Sistem Teknologi Informasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- William N Dunn. (2003).** *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Yogyakarta, Gajahmada University press

ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA KE PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG

Serly Rosa Pasa¹, George M.V Kawung², Ita Pingkan F Rorong³

Email: serlypasanew@gmail.com, georgekawung@unsrat.ac.id, itapingkan@unsrat.ac.id

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh PAD dan dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melalui belanja modal. Alat analisis yang digunakan ialah analisis jalur dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : PAD, Dana Transfer, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the influence of PAD and transfer funds on economic growth and poverty through capital expenditure. The analytical tool used is path analysis with the help of SPSS 26. The results of the study show that regional own-source revenue directly has a significant effect on capital expenditure. Transfer funds do not affect capital expenditure directly. The results of the study show that indirectly or through capital expenditure, regional original income has an effect on economic growth. Fund transfers indirectly or through capital expenditures have no effect on economic growth. Capital expenditure directly affects economic growth. The results of the study show that indirectly or through capital expenditure, regional original income has no effect on poverty. Meanwhile, transfer funds indirectly or through capital expenditure have an effect on poverty. And capital spending directly affects poverty.

Keyword : PAD, Transfer Funds, Capital Expenditures, economic growth and Poverty

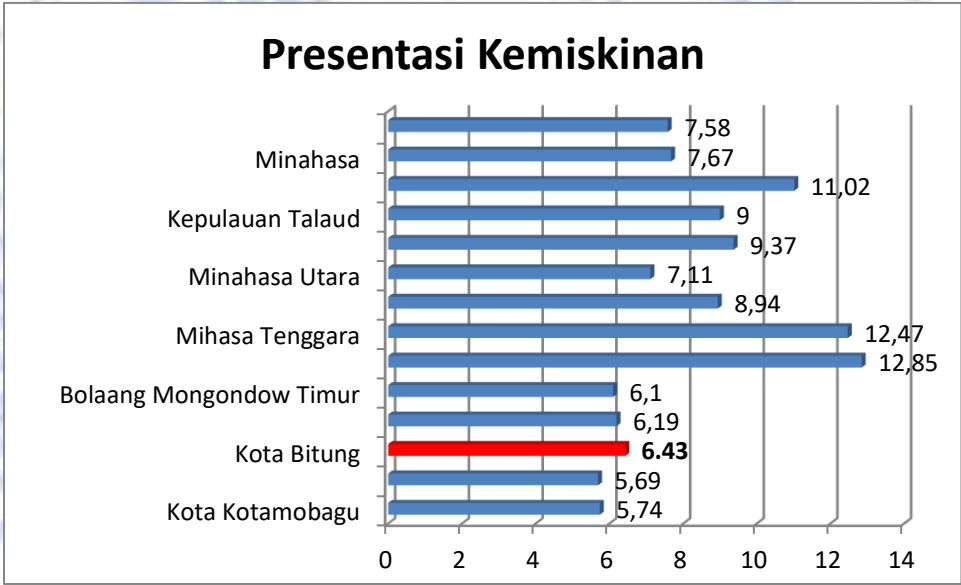
1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dikarenakan oleh standar hidup yang rendah dimana terwujud dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau miskin (Todaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Menurut Jonaidi (2012), terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ping dan Bai (2005), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang mendasar seperti perawatan medis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baik buruknya pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah sehingga bisa terjadi jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin dapat berkurang karena kegiatan dan Pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga dapat menurunkan angka jumlah penduduk miskin yang ada.

Grafik 1.
Presentasi Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021



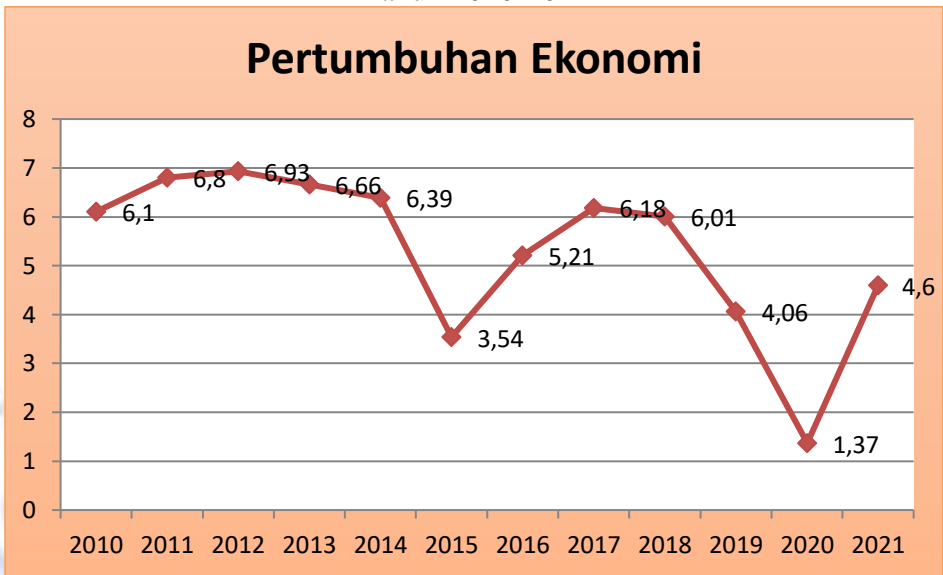
Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan data diatas, presentasi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung menduduki peringkat 10 daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan presentasi kemiskinan tertinggi dan menduduki peringkat pertama di empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan presentasi tertinggi mencapai 6.43%. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bitung. Walaupun kenaikan tersebut masih berada pada angka terendah dibandingkan dengan daerah lainnya yang sudah mencapai dua digit angka presentasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1995). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Harry Ramadhana,2008).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berikut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Bitung:

Grafik 2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung
Tahun 2010-2021



Sumber Data : BPS Kota Bitung

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 6.93 % dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,54% kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6,18% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai 1.37%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana:2005). Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien. Berikut adalah perkembangan dana transfer di Kota Bitung tahun 2010-2021 :

Tabel 1.
Dana Transfer Kota Bitung Tahun 2010-2021

Tahun	Dana Transfer
2010	327.481.918.000
2011	352.630.749.839
2012	440.111.231.759
2013	492.770.558.386
2014	550.441.543.914
2015	503.702.709.603
2016	678.650.861.794
2017	676.975.326.351
2018	771.801.631.408
2019	726.026.664.451
2020	622.348.090.825
2021	800.025.357.594

Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan table 1 perkembangan dana tranfer di Kota Bitung Tahun 2010 dana transfer Kota Bitung sebesar 327.481.918.000 juta rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 352.630.749.839 juta rupiah. Tahun 2012 naik menjadi 440.111.231.759 juta rupiah, tahun 2013 meningkat menjadi 492.770.558.386 juta rupiah dan terus naik sampai tahun 2016 menjadi 678.650.861.794 juta rupiah. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 676.975.326.351 juta rupiah dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 771.801.631.408 juta rupiah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 726.026.664.451 juta rupiah terus turun sampai tahun 2020 menjadi 622.348.090.825 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 800.025.357.594 juta rupiah. Dana transfer yang diterima pemerintah daerah merupakan pembagian yang harus diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang disebut otonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dengan program-program yang ada diharapkan mampu mengali potensi-potensi daerah yang bisa memberikan pendapatan untuk daerah, pemerintah daerah juga menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana perimbangan. Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peran penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kota Bitung masih sangat diharapkan oleh pemerintah daerah karena masih kurangnya PAD yang ada di Kota Bitung.

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kota Bitung
Tahun 2010-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2010	18.875.511.960	113.239.795.525
2011	25.394.063.796	103.257.610.472
2012	38.435.120.911	129.165.574.193
2013	44.000.000.000	131.163.554.173
2014	71.654.094.447	147.857.043.508
2015	106.133.530.054	171.232.907.302
2016	82.886.448.410	222.967.119.701
2017	103.479.596.018	197.088.797.032
2018	109.652.849.471	302.862.622.352
2019	88.193.758.190	222.678.090.274
2020	64.735.031.362	71.674.810.283
2021	71.484.630.988	143.075.879.820

Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat bahwa PAD Kota Bitung tiga tahun terakhir 2018 sampai 2020 mengalami penurunan PAD. Tahun 2018 sebesar 109.652.849.471 juta rupiah turun pada tahun 2020 mencapai 64.735.031.362 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 71.484.630.988 juta rupiah. Penurunan PAD ini dapat dilihat dari peningkatan kemiskinan yang ada dimana pemerintah daerah belum mampu mengelola potensi daerah dengan maksimal tercermin dari data yang ada, juga dilihat dari belanja modal dimana perkembangannya juga mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 belanja modal sebesar 302.862.622.352 juta rupiah mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 71.674.810.283 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 143.075.879.820 juta rupiah.

Peranan dana transfer sangat besar dalam aktifitas keuangan yang ada di daerah Kota Bitung. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer atau Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan mempersembahkan otonomi kepala

daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Melihat hal ini, pajak-pajak masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi besaran dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Daerah, termasuk kabupaten atau kota dalam daerah yang bersangkutan. Dana transfer atau Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dana transfer Pemerintah Pusat terhadap belanja modal di Kota Bitung, peranan belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peranan PAD terhadap dana transfer. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul “ **Analisis Pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal serta dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Tranfer terhadap Belanja Modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Tranfer dan Belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Tranfer dan Belanja modal terhadap Kemiskinan.

Tinjauan Pustaka Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara- negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan

teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Menurut Sukirno (2002) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000):

- a. Akumulasi modal Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dari pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.
- b. Pertumbuhan Ekonomi Berhubungan dengan kenaikan angka kelahiran kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.
- c. Kemajuan Teknologi Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan

sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah (Prastiwi, 2008).

Dana alokasi umum selanjutnya digunakan pemerintah untuk mendanai pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan pendidikan, dimana pendidikan sangatlah penting kedudukannya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya pelayanan pemerintah pada bidang pendidikan secara merata dan baik, maka suatu daerah dikatakan baik tingkat kemajuan daerahnya karena masyarakat telah mendapatkan hak yang mereka miliki yakni pelayanan terhadap dunia pendidikan. Dengan majunya pendidikan suatu daerah, maka masyarakatnya dapat membantu untuk meningkatkan mutu dari daerahnya tersebut.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan yakni membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi suatu urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut diantara lain adalah untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu dari bentuk dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Novianto, 2015). Apabila pengelolaan dana alokasi khusus dikelola dengan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, dana alokasi khusus ini akan dapat digunakan sebagai dana yang mampu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta membantu mengurangi kerusakan infrastruktur dengan cara merawat infrastruktur yang ada dengan menggunakan dana tersebut. Sehingga dana alokasi khusus dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DAK sangat penting bagi dunia Pendidikan, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan DAK yang terarah sehingga akan membantu menaikkan tingkat dan mutu Pendidikan di daerah tersebut.

Dana Bagi Hasil

Menurut Putra, dkk (2015) dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut.

DBH yang telah ditransfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah itu sendiri. Sistem dana bagi hasil yang berjalan dengan baik, menandakan terlaksananya otonomi daerah secara luas dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DBH memiliki sifat memberi keleluasaan pada suatu daerah untuk mengelola dana tersebut yang akan dipergunakan untuk mendanai belanja daerah yang produktif seperti meningkatkan mutu Pendidikan suatu daerah. Karena apabila mutu pendidikan suatu daerah baik, maka kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut juga baik yang otomatis akan mengangkat mutu dari daerah tersebut. Yang menjadi tujuan utama dari dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki potensi yang besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pada daerahnya.

Belanja Modal

Menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak,

maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan Belanja Modal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variabel PAD dan Dana Transfer terhadap belanja modal dan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bitung dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kota Bitung. Waktu penelitian dilakukan tahun 2010 sampai 2022.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Retherford (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Sarwono, 2012). Sedangkan menurut Webley (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sarwono, 2012). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (Garson, 2003).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model Persamaan I

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *Eviews 8* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Belanja Modal (Y_1) (variabel dependen) dengan PAD (X_1) dan Dana Transfer (X_2) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 1
Hasil Regersi variabel PAD dan Dana Transfer
terhadap Belanja Modal

Dependent Variable: Y1					
Method: Least Squares					
Sample: 2010 2021					
Included observations: 12					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X1	1.564444	0.705169	2.218539	0.0537	
X2	-0.008585	0.099735	-0.086075	0.9333	
C	6.02E+10	3.87E+10	1.555282	0.1543	
R-squared	0.551343	Mean dependent var	1.63E+11		
Adjusted R-squared	0.451642	S.D. dependent var	6.40E+10		
F-statistic	5.529939	Durbin-Watson stat	2.083754		
Prob(F-statistic)	0.027140				

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

Koefisien Jalur Model I

Berdasarkan output Eviews 8 diatas, diketahui pada persamaan substruktur 1 dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X₁) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y₁) secara positif (+) sebesar 1.564444. Hasil ini sesuai dengan yang disarankan dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara ke duanya. Hasil ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik sebesar 95% atau pada tingkat α 5%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} .Nilai t_{stat} sebesar 2.218539 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.8311.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Dana Transfer (X₂) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y₁). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.9333 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel} . Nilai t_{stat} sebesar 0.086075 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.38303. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap belanja modal.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.5513 atau 55.13%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas belanja modal yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD dan Dana Transfer adalah sebesar 55.13% sedangkan sisanya sebesar 44.87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah dan dana transfer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 5.529939 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.26 pada tingkat keyakinan 95%.

Model Persamaan II

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₂) (variabel dependen) dengan PAD (X₁), Dana Transfer (X₂) dan Belanja Modal (Y₁) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 2
Hasil Regersi variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: Y2				
Method: Least Squares				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-4.930011	2.570011	-1.916921	0.0915
X2	-8.620013	2.930012	-0.294281	0.7760
Y1	2.320011	9.780012	2.370183	0.0452
C	5.407819	1.279661	4.225978	0.0029
R-squared	0.490864	Mean dependent var		5.320833
Adjusted R-squared	0.299938	S.D. dependent var		1.663405
F-statistic	2.570963	Durbin-Watson stat		1.539807
Prob(F-statistic)	0.127011			

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

$Y_2 = 5.407819 + 2.320011 X_1 - 8.620013 X_2 - 4.930011 X_3 + e$

Berdasarkan output Eviews diatas, diketahui pada persamaan substruktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0915 atau lebih kecil dari dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 1.916921 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Dana Transfer (X₂) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.7760 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel}. Nilai t_{stat} sebesar 0.294281 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai belanja modal (Y₁) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0452 atau lebih kecil dari dari α 5%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 2.370183 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.85955. hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.4908 atau 49.08%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal adalah sebesar 49.08% sedangkan sisanya sebesar 50.92% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah, dana transfer dan belanja modal tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 2.570963 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.07 pada tingkat keyakinan 95%.

Model Persamaan III

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kemiskinan (Y₃) (variabel dependen) dengan PAD (X₁), Dana Transfer (X₂) dan Belanja Modal (Y₁) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 3
Hasil Regersi variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal
terhadap Kemiskinan

Dependent Variable: Y3				
Method: Least Squares				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-9.490012	8.780012	-1.080874	0.3113
X2	-3.750012	9.990013	-3.751964	0.0056
Y1	5.040012	3.340012	1.509257	0.1697
C	8.920957	0.436564	20.43450	0.0000
R-squared	0.833071	Mean dependent var		7.023333
Adjusted R-squared	0.770472	S.D. dependent var		0.991063
F-statistic	13.30816	Durbin-Watson stat		1.068591
Prob(F-statistic)	0.001778			

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

$Y_3 = 8.920957 - 9.490012 X_1 - 3.750012X_2 + 5.040012 X_3 + e$

Berdasarkan output Eviews diatas, diketahui pada persamaan substruktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai pendapatan asli daerah (X₁) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.3113 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel}. Nilai t_{stat} sebesar 1.080874 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai dana transfer (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0056 atau lebih kecil dari dari α 1%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 3.751964 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.89646. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai belanja modal (Y₁) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y₃). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.1697 atau lebih kecil dari dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 1.509257 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.8330 atau 83.30%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas kemiskinan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal adalah sebesar 83.30% sedangkan sisanya sebesar 16.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah dan dana transfer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 13.30816 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.07 pada tingkat keyakinan 95%.

1. Pengaruh Langsung (*Direct Effect* atau DE)
- a. Pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal = (X₁ → Y₁) = 1,564.
Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Belanja Modal senilai 1,564.

b. Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Belanja Modal = (X₂ → Y₁) = 0,008
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Belanja Modal senilai 0,008.

c. Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi = (X₁ → Y₂) =4,930

- Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 4,930.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi = $(X2 \rightarrow Y2) = 8,620$
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 8,620.
 - Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan = $(X1 \rightarrow Y3) = 9,490$
Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Kemiskinan senilai 9.490.
 - Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan = $(X2 \rightarrow Y3) = 3,750$
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan senilai 3.750.
 - Pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi = $(Y1 \rightarrow Y2) = 2,320$
Pengaruh langsung antara variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 2,320.
 - Pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Kemiskinan = $(Y1 \rightarrow Y3) = 5,040$
Pengaruh langsung antara variabel Belanja Modal terhadap Kemiskinan senilai 5,040.

2. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect* atau IE)

- Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (1,564 \times 2,320) = 3,628$.
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 3,628.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (0,008 \times 2,320) = 0,018$
Pengaruh tidak langsung Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 0.018.
- Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (1,564 \times 5,040) = 7,882$.
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 7.882.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (0,008 \times 5,040) = 0,040$
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai.

3. Pengaruh Total (*Total Effect* atau TE)

- Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (1,564 + 2,320) = 3,884$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 3.884.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (0,008 + 2,320) = 2,328$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 2.328.
- Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (1,564 + 5,040) = 6,604$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 6.604.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (0,008 + 5,040) = 5,048$
Total pengaruh antar variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 5.048

Pembahasan

1. Pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Hasil ini juga membuktikan bahwa

hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya *Ceteris paribus*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer dengan belanja modal. Hasil ini juga menolak hipotesis yang ada. Artinya kenaikan dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana transfer ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana transfer sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program-program yang ada di daerah. Dana transfer meliputi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah, Lewi dan Zaki (2017) yang menyatakan bahwa Dana Transfer tidak berpengaruh secara signifikan.

2. Pengaruh PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga membuktikan bahwa hipotesis diterima. Artinya bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan potensi-potensi yang di kelola oleh pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Karena jika PAD meningkat, pemerintah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi yang ada dengan cara memberikan belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah, sehingga jika pembangunan daerah tersebut baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hasil ini menolak hipotesis penelitian. Artinya kenaikan atau penambahan dana transfer dari pemerintah pusat belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2018) yang menyatakan bahwa dana transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dapat bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan memiliki sifat produktif sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Menurut Harrod-Domar faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal, pembentukan modal dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:84). Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu hubungan keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan public yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah.

3. Pengaruh PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara

pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. Sehingga dengan hasil yang didapat ternyata pendapatan asli daerah yang di peroleh belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Artinya apabila mengalami peningkatan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena PAD yang diterima sebahagian dapat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh RANY (2021) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dana transfer berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya ketambahan dana transfer yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan Jolianis (2014) yang menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana transfer memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya apabila belanja modal meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan antara belanja modal terhadap kemiskinan. Belanja modal yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukan secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung.
2. Hasil penelitian menunjukan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian menunjukan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan

Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kota Bitung agar bias mengelolah potensi-potensi daerah yang bias menunjang pertumbuhan ekonomi melalui program-program atau kegiatan yang bisa membantu masyarakat sehingga bisa berdampak pada penurunan kemiskinan.
2. Bagi penulis selanjutnya agar bisa menamba variable penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007.** Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Arius Jonaidi.2012.** Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 1, No. 1, April 2012 hal.: 140- 164.
- Basri, F dan Munandar, H. (2010),** “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Baldric Siregar 2017,** Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Carunia Mulya Firdausy. 2017.** Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006.** Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad

- Jhingan, M. L. (2007).** Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mursyidi.2009.** Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: RefikaAditama
- Nugroho, Heru. 1995.** Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media
- Novianto Riko, Hanafiah Rafiudin. 2015.** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015 : ISSN : 2302-7169.
- Prastiwi, Hana. 2008.** Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa). Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putra, Putu Gede W, dkk. 2015.** “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11 (3) : 863-877. ISSN: 2302- 8556
- Ping, Xin-Qiao and Jie Bai. 2005.** Fiscal Decentralization Local Public Good Provision in China. Economic Research, pp: 1-27.
- Retherford, Robert D. (1993).** Statistical Models For Causal Analysis. Program on Population East-West Center , Honolulu, Hawaii.
- Ramadhana, Harry, 2008.** Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat. Universitas Andalas
- Suparlan, Supardi, 1995,** Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropolog Perkotaan, Yogyakarta: YOI.
- Suryana, Achmad. 2005.** Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Anjak_2005_IV_pdf.
- Suryawati. 2004.** Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy
- Sukirno, Sadono, 2002.** Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sarwono, J, 2012,** Path Analysis dengan SPSS: Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Alex Media Komputido, Jakarta
- Todaro P. Michael. 2000.** Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Todaro, M.P. 2006.** Economic Development. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Webley, Paul. 1997.** “It Could Be OK! Predictors and Correlates of Participation in The National Lottery. In I. Quintanilla Pardo (Ed)”. The 22nd IAREP Colloquium (pp. 173-183). Valencia: Promolibro.

ANALISIS EFEK LIMPAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH BOLAANG MONGONDOW RAYA

Chandra Saniman¹, Paulus Kindangen², Een. N Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email: chandrasaniman061@student.unsrat.ac.id, p_kindangen@unsrat.ac.id,
eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Adanya pemerataan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Sehingga perlu diketahui bagaimana hubungan sebab akibat dalam perekonomian daerah yang kemudian memberikan efek limpahan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kausalitas pertumbuhan ekonomi yang memberikan efek limpahan kepada kab/kota di Bolaang Mongondow Raya, dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dengan metode *Granger Causality Test*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat hubungan kausalitas dua arah yang saling memberikan efek limpahan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di daerah-daerah tersebut hubungan kausalitas serta efek limpahan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan potensi sumber daya alam, karakteristik wilayah, sektor unggulan. Selain itu faktor keterkaitan wilayah (ketetanggaan) dan komplementaritas atas barang dan jasa serta kondisi infrastruktur yang baik dan saling terkoneksi juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Efek Limpahan dan *Granger Causality Test*.

ABSTRACT

The existence of equitable distribution of economic development is closely related to the economic potential and characteristics possessed by the regions as well as the linkages of economic activities between the surrounding regions. So it is necessary to know how the causal relationship in the regional economy which then has a spillover effect on regional economic growth.

The purpose of this study is to identify the causality of economic growth that has spillover effects on regencies/cities in the Bolaang Mongondow Raya with the gross regional domestic product variable at constant prices using the Granger Causality Test method.

The results of the study show that in the Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, there is a bidirectional causality relationship that has a positive spillover effect on economic growth. In these regions the causality relationship and spillover effects are caused by differences in natural resource potential, regional characteristics and leading sectors. In addition, the factors of regional linkage (neighborhood), and complementarity of goods and interconnected infrastructure conditions also influence economic activity.

Keywords: Economic Growth, GRDP On a Constant Price Basis, Overflow Effect and Granger Causality Test.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah harus terintegrasi dan mampu mendorong serta berinovasi agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran nyata keberhasilan pembangunan, pertumbuhan tersebut kemudian diharapkan akan memberikan *spillover effect* yang bersifat positif (*spread effect*) untuk wilayah sekitarnya.

Selain kesejahteraan, setiap aspek dari pelaksanaan pembangunan diupayakan untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah. Adanya ketimpangan pertumbuhan dan

pendapatan dapat memberikan efek limpahan negatif (*backwash effect*) kepada wilayah/daerah lain. Menurut Sjafrizal (2012), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan kanduangan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Adanya keterkaitan fisik antar daerah baik dari segi ekonomi maupun geografi/spasial dapat memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Wibisono dan Kuncoro (2015) *growth spillover effect* dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah disekitarnya.

Perbedaan-perbedaan potensi sumber daya alam, karakteristik wilayah, sektor unggulan. Selain itu faktor keterkaitan wilayah (ketetanggaan) dan komplementaritas atas barang dan jasa serta kondisi infrastruktur yang baik dan saling terkoneksi juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sehingga perlu diketahui bagaimana hubungan sebab akibat dalam perekonomian daerah yang kemudian memberikan efek limpahan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu?
2. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kota Kotamobagu?
3. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu
2. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kota Kotamobagu
3. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan, diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan dan menentukan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mendorong setiap daerah untuk melakukan kerjasama (*cross border spatial cooperation*) agar dapat saling memberikan limpahan positif aktifitas ekonomi.
2. Bagi penelitian selanjutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun bahan studi komparasi untuk penelitian/pengembangan selanjutnya dengan penambahan atau perubahan variabel serta metode untuk mendapatkan kajian komprehensif dalam memahami hubungan dan limpahan pertumbuhan ekonomi baik antar wilayah maupun antar variabel makro ekonomi lainnya.
3. Bagi masyarakat, semoga hasil penelitian akan mampu memberikan informasi adanya keterkaitan erat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang secara geografis saling berdekatan dengan potensi sumber daya dan karakteristik yang berbeda, sebagai pertimbangan investasi/peluang usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik dan lebih sejahtera. Tolak ukur pembangunan tidak hanya pendapatan per kapita, namun harus juga dilihat pada perspektif distribusi pendapatan dan berkurangnya kemiskinan serta pengangguran. Menurut Siagian (1994) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori pertumbuhan baru (Romer, 2018), yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Motivasi dasar dari teori pertumbuhan baru adalah menjelaskan perbedaan dari tingkat pertumbuhan yang diamati.

Teori Rostow

W.W Rostow menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi lima tahapan, antara lain masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak maju menuju kematangan, dan tahap konsumsi tinggi. Menurut Rostow, setiap Negara berada dalam satu dari lima tahapan tersebut.

Tahap-tahap pertumbuhan tersebut sebenarnya berpangkal pada keadaan-keadaan dinamis dari permintaan, penawaran dan pola produksinya. Sektor-sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat teknologi dan kemauan para pengusaha dalam berinovasi, tetapi juga oleh kekuatan permintaan dalam hubungannya dengan harga. (Jhingan, 2012).

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan tipologi untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi suatu daerah. Tipologi ini merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui suatu gambaran pertumbuhan ekonomi.

Tipologi kelasmen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menggunakan tipologi Klassen ini wilayah akan termasuk ke dalam empat tipe atau karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Menurut H. Aswandi dan Kuncoro (2002), yaitu Daerah bertambah maju dan cepat tumbuh, Daerah maju tapi tertekan, Daerah Sedang Tumbuh, dan Daerah Relatif Tertinggal.

Teori Kutub Pertumbuhan Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Perroux, mengatakan kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan sebagai tempat kekuatan sentrifugal (memencar) dan kekuatan sentripetal (menarik) ke arah situ. Jadi *growth poles* bukanlah kota atau wilayah, melainkan kegiatan ekonomi yang dinamis dan hubungan kegiatan ekonomi tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi.

Pusat pertumbuhan sebagaimana dikemukakan oleh Boudeville adalah dengan menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah ada, dijadikan konsep keruangan yang konkrit. Pusat pertumbuhan adalah kota atau wilayah perkotaan memiliki suatu industri yang memiliki pengaruh besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap semua kegiatan lainnya.

Indeks Gravitasi

Indeks Gravitasi diilhami dari hukum Gravitasi Newton yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Gultom (2013) menyatakan penerapan analisis gravitasi bermanfaat dalam bidang analisis perencanaan wilayah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang dimiliki, mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara dua kutub magnet.

Model gravitasi menurut Tarigan (2005) adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut.

Efek Limpahan (*Spillover Effect*)

International Monetary Fund mendefinisikan *spillover* sebagai dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dapat berpengaruh terhadap negara lain baik melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan.

Growth spillover effect dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya (Wibisono dan Kuncoro, 2015).

Capello (2009) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis efek limpahan, yaitu efek limpahan teknologi, efek limpahan industri, dan efek limpahan pertumbuhan. Menurut Capello pertumbuhan produksi sebuah sektor ekonomi disebuah wilayah dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Fingleton (2003), memperlihatkan bahwa terjadinya *spillover* dapat meningkatkan ketergantungan spasial tentang pertumbuhan suatu daerah. Limpahan aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk mobilitas barang, tenaga kerja dan modal maupun eksternalitas spasial, mempengaruhi suatu organisasi tertentu tentang aktivitas ekonomi dalam suatu ruang.

Teori *Core Periphery* yang dikembangkan oleh John Friedman (1966) menyatakan bahwa daerah itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pusat yang dinamis (*core*) dan pinggiran yang statis (*periphery*). Teori ini menekankan bahwa ada hubungan yang erat antara daerah pusat yang dinamis (kota) dan daerah pinggiran yang statis (desa).

Autokorelasi Spasial (*Spatial Autocorrelation*)

Esensi dari autokorelasi/keterkaitan spasial (*spatial autocorrelation*) adalah “objek ruang”, yaitu keterkaitan antar-daerah, sehingga sesuatu hal yang terjadi pada satu daerah terkait dengan hal lain yang terjadi di daerah tetangga. Menurut Tobler dalam Lee dan Wong (2001), yang dikenal sebagai Hukum Geografi I “*Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things*”, apabila ditinjau dari aspek geografi, maka pernyataan tersebut berarti bahwa setiap sesuatu (kejadian) saling terkait relatif dengan posisinya (secara geografis).

Konsep Kewilayahan

Konsep kewilayahan sebagai metode klasifikasi muncul dalam dua fase yang berbeda, yaitu mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Glasson (1977) pertama memperlihatkan wilayah formal yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Kedua memperlihatkan perkembangan wilayah fungsional yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antar bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan

investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo dalam Ghufroon, 2008).

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten/Kota digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Domestic Regional Product*).

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Penyajian Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto diseluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDB atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Maisi Hasna Mariyatul Qibti dan R. Mulyo Hendarto yang berjudul *Analisis Spillover Effect* Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan menganalisis efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di wilayah Purwomanggung Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode *Granger Causality Test* dan VECM, menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 1988-2018, dengan hasil bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi sebagian besar bersifat dua arah. Efek limpahan setiap daerah terdapat spread dan backwash effect. Efek limpahan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan masing-masing daerah lebih besar dari backwash effect, hal ini konsisten dengan hipotesis Perroux tentang Kutub Pertumbuhan.

Penelitian dari M. Irfan Rosyadi dan Sinta Yulyanti dengan judul *The Effect of Regional Spillover on Economic Growth in Pekanbaru City, Riau Province, Indonesia*, menggunakan metode *Two-Stage Least Square*, penelitian ini membahas tentang hubungan timbal balik antara pertumbuhan Kota Pekanbaru dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kampar, dengan data PDRB hasilnya menunjukkan bahwa Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan dan Kab. Siak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru, sementara Kab. Bengkalis tidak berpengaruh.

Penelitian dari Fitri Kurniasih, Taufiq Marwa, Saada Yuliana, dan Abdul Bashir, yang berjudul *The Economic Spillover of South Sumatera Toward Economic of Southern Sumatera Provinces in Indonesia*, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengeluaran pemerintah di wilayah *Hinterland*, PDRB, Investasi, Indeks Harga Konsumen, dan Panjang Jalan Provinsi Sumatera Selatan terhadap PDRB Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Analisis menggunakan multiple regressions dengan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *spillover* ekonomi Sumatera Selatan yang terdiri dari produk domestik bruto, investasi, indeks harga konsumen dan panjang jalan menimbulkan *spread effect* ke Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung dengan nilai positif kecuali Bangka Belitung yang indeks harga konsumennya adalah negatif.

Penelitian dari Pristiawan Wibisono dan Mudrajad Kuncoro, yang berjudul *Efek Limpahan Pertumbuhan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2013*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan menganalisis efek limpahan pertumbuhan antar kabupaten/kota. Alat analisis adalah tipologi *klasesn*, identifikasi kutub pertumbuhan berdasarkan definisi Richardson, perhitungan efek

limpahan pertumbuhan, deteksi autokorelasi spasial dengan indeks local moran dan *Local Indicators of Spatial Association (LISA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang tergolong maju dan cepat tumbuh pada tahun 2001 hingga 2013 terpusat di kawasan tengah Provinsi Jawa Timur. Konsistensi sebagai daerah cepat tumbuh dan maju yang merupakan indikator kutub pertumbuhan ditunjukkan oleh Kota Surabaya.

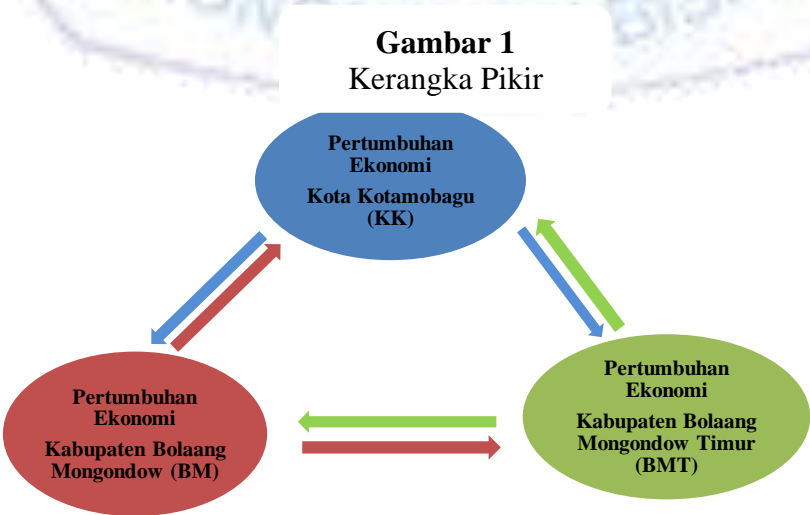
Penelitian dari Nindya Eka Santi, Aisyah Jumiarti, Fivien Muslihatinningsih dengan judul Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menentukan arah kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, Investasi dan PDRB, tenaga kerja dan PDRB. Menggunakan data panel SWP Jember dan sekitarnya untuk kurun waktu 2000-2014. Dengan metode uji kausalitas granger, menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB, tenaga kerja dan PDRB.

Penelitian dari Reizard O Wullur, Rosaliina A.M Koleangan, Audie O. Niode, dengan judul Analisis Kausalitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas anatara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi, metode analisisnya adalah model analisis kausalitas dan Granger Causality Test dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan dua arah antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian dari Ernawati Pasaribu, D.S. Priyarsono, Hermanto Siregar, dan Ernan Rustiadi, dengan judul Dampak Spillover Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kalimantan, tujuannya untuk mengetahui apakah pusat-pusat pertumbuhan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional akan menimbulkan *backwash effect* bagi daerah sekitarnya, pengujiannya menggunakan *Lagrange Multiplier Spatial Lag Dependent*. Hasilnya membuktikan bahwa pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi yang terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan secara signifikan memberikan dampak *spillover* negative terhadap wilayah sekitarnya. Dampak positif *spillover* terhadap wilayah-wilayah sekitar terjadi apabila pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan disertai dengan aliran ekonomi ke wilayah sekitarnya.

Penelitian dari Dityawarman El Aiyubbi dan Diana Wijayanti, dengan judul Pengaruh *Regional Spillover* terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996-2010, tujuannya untuk mengetahui efek limpahan regional terhadap PDRN Yogyakarta dari tahun 1996 sampai dengan 2010. Menggunakan model *Ordinary Least Squares (OLS)*, dengan hasil bahwa kuantitas tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB Yogyakarta, sedangkan investasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Aliran investasi dari PMA dan PMDN terjadi pada banyak kegiatan yang berdampak pada PDRB. Sedangkan dari pelimpahan variabel wilayah menunjukkan bahwa hanya kabupaten yang memiliki kesamaan karakteristik ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB Yogyakarta.

Kerangka Berpikir



:

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Produk Domestik Regional Bruto dari Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2010-2021. dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi Pemerintah lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap teori-teori atau konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

PDRB sebagai variabel, didasarkan pada konsep bahwa PDRB merupakan total nilai tambah bruto, dimana nilai tambah bruto yang merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dan biaya antara (*input*) dari suatu produk seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan disuatu wilayah yang timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Metode Analisis

Untuk mengetahui hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi antar daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya, digunaka *Granger Causality Test*. Menurut Gujarati, D. N., & Porter, D. C., (2003), tahap pengujian kausalitas granger, adalah sebagai berikut:

- 1. Uji Stasioneritas Data
- 2. Penentuan Nilai *Lag*
- 3. Apabila *Lag* sudah terpilih, selanjutnya digunakan untuk menguji kausalitas dengan metode *Granger Causality*
- 4. Membuat interpretasi hasil uji kausalitas

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Granger Causality Test digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya, dengan tahapan sebagai berikut:

Uji Stasioneritas

Data *Time Series* umumnya bersifat stokastik atau tren yang tidak stasioner, artinya data tersebut memiliki akar unit. Sehingga perlu dilakukan uji stasioneritas data.

Tabel 1.
Hasil Stasioner Data

Metode	Level	1st Difference	2nd Difference
Levin, Lin & Chu	0.2689	0.0002	0.0002
Augmented Dickey Fuller	0.9626	0.0514	0.0095

Sumber: Data Sekunder PDRB Diolah Eviews 12

Berdasarkan hasil uji *root* dengan metode *Augmented Dickey Fuller* dapat diketahui bahwa PDRB dari ketiga daerah mengandung akar unit pada tingkat *Level*, *First Difference* (orde 0 dan orde I) atau tidak stasioner (nilai probabilitasnya $> \alpha = 0.05$) artinya menerima hipotesis H_0 yaitu terdapat akar unit/tidak stasioner. Sehingga perlu dilakukan diferensiasi lanjutan pada tingkat *Second Difference* (orde II), dan diperoleh nilai probabilitas 0.0095 artinya $< \alpha = 0.05$ sehingga menolak Hipotesis H_0 (tidak terdapat akar unit/data sudah stasioner).

Penentuan Panjang *Lag* Optimum

Penentuan *Lag* untuk mengetahui panjang *Lag* optimal karena estimasi hubungan kausalitas sangat peka terhadap panjang *Lag*. Akaike Information Criterion (AIC) terkecil atau apabila terdapat tanda bintang (*) berarti menunjukan *Lag* optimal.

Tabel 2.
Hasil Penentuan Lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-343.1130	NA	2.33e+26	69.22261	69.31338	69.12303
1	-328.9449	17.00172*	9.51e+25*	68.18899*	68.55209*	67.79066*

Sumber: Data Sekunder PDRB Diolah Eviews 12

Uji Granger Causality

Tabel 3.
Hipotesis Nol (Null Hypothesis) atas Pengujian Granger Causality
berdasarkan Nilai Probabilitas $\alpha = 0.05$

$PDRB_{BM} = f(PDRB_{KK})$	$PDRB_{BMT} = f(PDRB_{KK})$	$PDRB_{BMT} = f(PDRB_{BM})$
$H_0 = PDRB_{BM}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_0 = PDRB_{BMT}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_0 = PDRB_{BMT}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BM}$
$H_1 = PDRB_{BM}$ Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_1 = PDRB_{BMT}$ Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_1 = PDRB_{BMT}$ Berhubungan $PDRB_{BM}$
$PDRB_{KK} = f(PDRB_{BM})$	$PDRB_{KK} = f(PDRB_{BMT})$	$PDRB_{BM} = f(PDRB_{BMT})$
$H_0 = PDRB_{KK}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BM}$	$H_0 = PDRB_{KK}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BMT}$	$H_0 = PDRB_{BM}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BMT}$
$H_1 = PDRB_{KK}$ Berhubungan $PDRB_{BM}$	$H_1 = PDRB_{KK}$ Berhubungan $PDRB_{BMT}$	$H_1 = PDRB_{BM}$ Berhubungan $PDRB_{BMT}$

Tabel 4
Hipotesis Nol (Null Hypothesis) atas Pengujian Granger Causality
berdasarkan Nilai F-Tabel: 4.256495

$PDRB_{BM} = f(PDRB_{KK})$	$PDRB_{BMT} = f(PDRB_{KK})$	$PDRB_{BMT} = f(PDRB_{BM})$
$H_0 = PDRB_{BM}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_0 = PDRB_{BMT}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_0 = PDRB_{BMT}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BM}$
$H_1 = PDRB_{BM}$ Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_1 = PDRB_{BMT}$ Berhubungan $PDRB_{KK}$	$H_1 = PDRB_{BMT}$ Berhubungan $PDRB_{BM}$
$PDRB_{KK} = f(PDRB_{BM})$	$PDRB_{KK} = f(PDRB_{BMT})$	$PDRB_{BM} = f(PDRB_{BMT})$
$H_0 = PDRB_{KK}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BM}$	$H_0 = PDRB_{KK}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BMT}$	$H_0 = PDRB_{BM}$ Tidak Berhubungan $PDRB_{BMT}$
$H_1 = PDRB_{KK}$ Berhubungan $PDRB_{BM}$	$H_1 = PDRB_{KK}$ Berhubungan $PDRB_{BMT}$	$H_1 = PDRB_{BM}$ Berhubungan $PDRB_{BMT}$

Hasil Uji Granger Causality Test (Eviews 12)

Tabel 5.
Granger Casuality test

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/05/22 Time: 07:25
Sample: 2010 2021
Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PDRBBM does not Granger Cause PDRBKK	11	5.31445	0.0501
PDRBKK does not Granger Cause PDRBBM		10.5276	0.0118
PDRBBMT does not Granger Cause PDRBKK	11	5.61728	0.0452
PDRBKK does not Granger Cause PDRBBMT		8.20134	0.0210
PDRBBMT does not Granger Cause PDRBBM	11	9.41922	0.0154
PDRBBM does not Granger Cause PDRBBMT		10.2061	0.0127

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu (Prob. $0.0501 \leq 0.05$ dan F-Statistik $5.31445 > F\text{-Tabel } 4.256495$), menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan

- kausalitas limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Kota Kotamobagu. Sedangkan PDRB Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Prob. $0.0118 < 0.05$ dan F-Statistik $10.5276 > F\text{-Tabel } 4.256495$) menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kota Kotamobagu terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu memiliki hubungan kausalitas (*bidirectional*) dan limpahan pertumbuhan yang signifikan satu sama lain.
2. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu (Prob. $0.0452 < 0.05$ dan F-Statistik $5.61728 > F\text{-Tabel } 4.256495$) menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap Kota Kotamobagu, sedangkan PDRB Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Prob. $0.0210 < 0.05$ dan F-Statistik $8.20134 > F\text{-Tabel } 4.256495$) menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kota Kotamobagu terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu memiliki hubungan kausalitas (*bidirectional*) dan limpahan pertumbuhan yang signifikan satu sama lain.
 3. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Prob. $0.0154 < 0.05$ dan F-Statistik $9.41922 > F\text{-Tabel } 4.256495$) menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Prob. $0.0127 < 0.05$ dan F-Statistik $10.2061 > F\text{-Tabel } 4.256495$) menolak hipotesis H_0 artinya terdapat hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki hubungan kausalitas (*bidirectional*) dan limpahan pertumbuhan yang signifikan satu sama lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil *Granger Causality Test* PDRB dari ketiga daerah terdapat hubungan kausalitas dua arah dan efek limpahan positif bagi masing-masing daerah ini sesuai dengan pendapat Capello (2009) yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis efek limpahan, yaitu efek limpahan teknologi, efek limpahan industri, dan efek limpahan pertumbuhan. Efek limpahan pertumbuhan (*growth spillovers*) dari ketiga daerah dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi satu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya dan sebaliknya.

Efek limpahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memiliki hubungan sebab akibat bersifat dua arah dan saling memberikan dampak positif (*spread effect*) dan tidak terjadi (*backwas effect*). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maisi Hasna Mariyatul Qibti dan R. Mulyo Hendarto (2020) bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah sebagian besar bersifat dua arah. Efek limpahan di masing-masing daerah memiliki efek *spread* dan *backwash effect*. Efek penyebabnya di kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh masing-masing daerah di Purwomanggung lebih besar dari efek *backwash*. Selain itu Dityawarman El Aiyubbi dan Diana Wijayanti (2014) bahwa kuantitas tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB Yogyakarta, sedangkan investasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Aliran investasi dari PMA dan PMDN terjadi pada banyak kegiatan yang berdampak pada PDRB. Sedangkan dari pelimpahan variabel wilayah menunjukkan bahwa hanya kabupaten yang memiliki kesamaan karakteristik ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB Yogyakarta.

Hubungan kausalitas dan limpahan pertumbuhan ekonomi antar daerah ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan karakteristik antar daerah, perbedaan itu menyebabkan saling ketergantungan atas barang dan jasa sehingga perlu dilakukan ekspor impor untuk memenuhi komplementaritas atas barang dan jasa. Rustiadi (2009) mengatakan bahwa secara ekonomi keterkaitan antar wilayah terjadi karena adanya efek komplementaritas antar kabupaten/kota. Adanya upaya untuk memenuhi atau saling melengkapi kebutuhan ekonomi telah mendorong

sektor-sektor ekonomi dari masing-masing daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya, dimana dari 17 sektor PDRB terdapat 8 sektor dari Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sejak tahun 2010 sampai 2021 yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor tersebut merupakan gambaran dari struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dimana setiap kategori mempunyai peranan besar dan menunjukkan basis perekonomian pada ketiga daerah tersebut sehingga dapat dianggap sebagai sektor unggulan, sebagaimana definisi Distribusi PDRB berdasarkan harga berlaku dari Badan Pusat Statistik.

Hubungan kausalitas dan efek limpahan pertumbuhan ekonomi dari ketiga daerah dapat dilihat dari aspek sejarah, aspek ekonomi, dan aspek kewilayahan/geografi, sebagai berikut:

Dari aspek historis, sebelum pemekaran tahun 2007 dan 2008 daerah-daerah ini merupakan satu kesatuan dan Kotamobagu merupakan ibukota kabupaten ketika itu, sebagai ibukota kabupaten kotamobagu memiliki sektor dominan di bidang perdagangan dan jasa sedangkan dua daerah lainnya sangat dominan di sektor sumber daya alam. Sampai saat ini Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di dua daerah tersebut sebagian besarnya masyarakat kotamobagu, bahkan sampai saat ini salah satu Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berada di Kotamobagu dengan pelanggan seluruhnya masyarakat kotamobagu. Kecamatan Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Passi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dari aspek ekonomi, sebelum dan setelah pemekaran dinamika ekonomi ketiga daerah masih sama yaitu kotamobagu menjadi tempat untuk melakukan kegiatan jual beli hasil sumber daya alam, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan untuk memperoleh layanan jasa di bidang keuangan atau pembiayaan. Bahkan transaksi dagang dari Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terjadi di Kotamobagu.

Dari aspek kewilayahan/geografi, ketiga daerah merupakan wilayah yang berbatasan langsung kondisi ketetanggaannya bersifat *Queen Contiguity*, yaitu ketetanggaan ditentukan berdasarkan persinggungan sisi perbatasan atau persinggungan ujung (*vertex*) perbatasan dengan wilayah lain. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Moat), di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow sebelah utara (Kecamatan Bilalang, Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi, dan Kecamatan Passi Barat), dan di sebelah selatan (Kecamatan Lolayan, Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Selatan, dan Kecamatan Dumoga Tenggara) dan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berbatasan dengan Kecamatan Moat dan Kecamatan Passi Timur. Kondisi kewilayahan sesuai dengan pendapat Tobler dalam Lee dan Wong (2001), yang dikenal sebagai Hukum Geografi I "*Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things*". Dengan demikian semakin dekat suatu kejadian, maka keterkaitannya akan semakin besar. Sama halnya dengan penelitian Veneri dan Ruiz (2013) yang menunjukkan bahwa spillover pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan jarak kedua wilayah, spillover magnitude ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak kedua wilayah.

Baik aspek historis, ekonomi dan wilayah ini sejalan dengan Berdegue *et al* (2015) yang mengatakan bahwa pertumbuhan sebuah wilayah dapat mempengaruhi wilayah lainnya melalui beberapa jalur yaitu *human capital*, konektivitas fisik dan virtual, diversitas sosial, diversifikasi produktif, investasi publik, aksesibilitas terhadap sektor jasa, dan kompetisi politik. Menurut Tarigan (2005:162-163) ciri pertumbuhan ekonomi yang pertama adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan. Keterkaitan antar sektor akan saling mendorong pertumbuhan oleh karena keterkaitan yang dimiliki, kedua adanya efek penggandaan (*multiplier effect*) karena adanya keterkaitan antar sektor dimana permintaan akan menciptakan produksi dan menjadi akumulasi modal, unsur efek penggandaan sangat berperan dalam membuat kota mampu memacu pertumbuhan belakangnya, ketiga adanya konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain menciptakan efisiensi di antara sektor yang saling membutuhkan juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi antara Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersifat dua arah dengan efek limpahan yang positif bagi masing-masing daerah, artinya ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan daerah lain (*spread effect* dan bukan *backwash effect*). Perbedaan potensi dan karakteristik sumber daya setiap daerah tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sebaliknya perbedaan tersebut dapat memunculkan komplementaritas atas barang dan jasa dan merangsang munculnya *supply* dan *demand* dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hubungan kausalitas dan efek limpahan positif tidak hanya ditentukan oleh sektor unggulan dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, akan tetapi dipengaruhi juga oleh kondisi spasial dan infrastruktur masing-masing daerah.

Saran

1. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya perlu memperhatikan pembentukan atau penambahan kutub pertumbuhan, aglomerasi industri, pemberdayaan sektor produksi baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, bantuan untuk modal ataupun peralatan serta penentuan wilayah industri dalam rencana tata ruang.
2. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung sektor industri dan perdagangan (jalan dan bangunan), untuk kelancaran aliran barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi antar sektor ataupun antar wilayah.
3. Pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan strategis yang berorientasi pada investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi dan kerjasama pembangunan (*cross border spatial cooperation*).
4. Penulis sangat berharap penelitian ini bisa terus dikembangkan baik dengan perubahan atau penambahan variabel maupun metode yang digunakan. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif yang kemudian dapat dijadikan referensi atau pembandingan dalam mengambil kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Aiyubbi, Dityawarman El dan Diana Wijayanti. 2014. Pengaruh Regional *Spillover* Terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996-2010. E-Jurnal Fakultas Ekonomi UII, Vol 15 No. 9: 1777-1798
- Capello, Roberta. 2009, *Spatial Spillover and Regional Growth: A Cognitive Approach*. *European Planning Studies* 17(5), 639-658. [e443](#)
- Dityawarman El Aiyubbi dan Diana Wijayanti, 2014, Pengaruh Regional *Spillover* Terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996-2010, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.15.
- Ernawati Pasaribu, D.S Priyarsono, Hermanto Siregar, dan Ernani Rustiadi, 2014, Dampak *Spillover Effect* Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kalimantan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5, Nomor 2 Desember 2014, 225-238, DOI:10.22212/jekp.v5i2.90
- Fingleton Bernard, 2003, *Externalities, Economic geography and Spatial Econometrics : Conceptual and Modeling Developments*, International Regional Science Review, Vol 26(2), 197-207, DOI:[10.1177/0160017602250976](#)
- Fitri Kurniasih, Taufiq Marwa, Saada Yuliana, dan Abdul Bashir, 2019, *The Economic Spillover of South Sumatera Toward Economic of Southern Sumatera Provinces in Indonesia*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol 7(3): 287-296, DOI:[10.22437/ppd.v7i3.8358](#)

- Gujarati Damodar N dan Dawn C Porter, 2012**, Dasar – Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.
- Hani Laksono, Eman Rustiadi dan Hermanto Siregar, 2017**, Determining Optimal Location of New Growth Centers Based on LGP-IRIO Model to Reduce Regional Disparity in Indonesia, *The Annals of Regional Science*, Vol 54(1), 89-115, DOI: [10.1007/s00168-014-0647-8](https://doi.org/10.1007/s00168-014-0647-8).
- Jhinghan M.L, 2012**, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali, <http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=338&q2=JHI&q3=E&q4=979-421-154-0>
- Maisi Hasna Mariyatul Qibti dan R. Mulyo Hendarto, 2020**, Analisis *Spillover Effect* Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah Tahun 1988-2018, Volume 9, Nomor 4, Tahun 2020,
- M. Irfan Rosyadi dan Sinta Yulyanti, 2020**, *The Effect of Regional Spillovers on Economic Growth in Pekanbaru City, Riau Province, Indonesia*, *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, Vol.1, issues 3, 186-199.
- Richardson Harry W, 2007**, Regional Growth Theory, The University of California
- Rustiadi, E., Sunsun, S. dan Dyah, R.P. 2009**. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wibisono, Mudrajad Kuncoro, 2015**, Efek Limpahan Pertumbuhan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2013, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 16 No. 1 Juli 2015: 31-46. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.584>

ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENENTU RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT BANK SULUTGO

Fenly Robert Hakiang, Daisy Shirly Marhaenie Engka, Tri Oldy Rotinsulu

Jurusan Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi,

Email : fenlyhakiang@gmail.com, daysiengka@unsrat.ac.id, o_rotinsulu@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor penentu Return On Equity (ROE) pada PT Bank SulutGo dengan menganalisis pengaruh Variabel CAR(Capital Adequacy Ratio) , NPL (Non Performing Loan) NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap ROE (Return On Equity), dan juga pengaruh variabel variabel tersebut secara bersama sama terhadap ROE (Return On Equity). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data annual report PT Bank SulutGo periode tahun 2007 sampai dengan 2021. Variabel dalam penelitian ini ada enam yaitu lima variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya terdiri dari variabel CAR, NPL, NIM, BOPO dan. Sedangkan variabel terikatnya adalah ROE. Teknik analisis data adalah analisis regresi linear berganda.

Dari hasil penelitian diketahui : 1) tidak terdapat pengaruh CAR terhadap ROE. 2) terdapat pengaruh NPL terhadap ROE. 3) tidak terdapat pengaruh antara NIM terhadap ROE. 4) terdapat pengaruh antara BOPO terhadap ROE. 5) tidak terdapat pengaruh LDR terhadap ROE. 6) terdapat pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR secara bersama-sama terhadap ROE pada PT Bank SulutGo.

Kata Kunci: Bank SulutGo, ROE, CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the determinants of Return On Equity (ROE) at PT Bank SulutGo by analyzing the influence of the CAR (Capital Adequacy Ratio) Variable, NPL (Non Performing Loan) NIM (Net Interest Margin), BOPO (Operating Costs to Income Operational), LDR (Loan to Deposit Ratio) to ROE (Return On Equity), and also the influence of these variables together on ROE (Return On Equity). This study uses a quantitative approach, the data used is secondary data. The data used in this study are PT Bank SulutGo's annual report data for the period 2007 to 2021. There are six variables in this study, namely five independent variables and one dependent variable. The independent variables consist of the variables CAR, NPL, NIM, BOPO and. While the dependent variable is ROE. The data analysis technique is multiple linear regression analysis.

From the research results it is known: 1) there is no effect of CAR on ROE. 2) there is an influence of NPL on ROE. 3) there is no influence between NIM on ROE. 4) there is an influence between BOPO on ROE. 5) there is no effect of LDR on ROE. 6) there is a joint effect of CAR, NPL, NIM, BOPO, and LDR on ROE at PT Bank SulutGo.

Keywords: Bank SulutGo, ROE, CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menghadapi persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan. Beranjak dari hal tersebut maka PT. Bank SulutGo secara berkesinambungan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang pelayanan, pengembangan produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan kantor, agar mampu mewujudkan Visi “Menjadi Bank inovatif, berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kepuasan nasabah” serta Misi PT Bank SulutGo:

1. Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah yang berdikari dan berkeadilan
2. Terus berinovasi menciptakan model bisnis, layanan dan produk yang terbaik serta bernilai tambah kepada nasabah

3. Menciptakan human capital sebagai pilar penting dalam pencapaian visi perusahaan
4. Melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

Mengingat fungsi, posisi dan peranan PT. Bank SulutGo di tengah-tengah masyarakat yang begitu strategis, dan juga kontribusi PT. Bank SulutGo kepada Pemerintah Sulawesi Utara dan Gorontalo melalui pendapatan asli daerah berupa Dividen maka hal yang menjadi tolak ukur kontribusi PT. Bank SulutGo dapat dilihat dari besarnya Return On Equity (ROE). Dalam bisnis dan ekonomi, pengertian ROE adalah metrik guna membandingkan jumlah pendapatan bersih (*net income*) perusahaan dan jumlah total modal investor/pemilik di dalamnya. Sementara itu di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk.

ROE atau return on equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab, usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh faktor apa saja yang menjadi penentu dari Return On Equity (ROE), dan hasil ini bisa digunakan oleh bank sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang. Dan juga bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk menambah penyertaan modal di PT Bank SulutGo.

Penelitian ini akan melihat faktor faktor penentu Return On Equity (ROE) dan variabel yang diukur adalah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on equity* (ROE).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang Return on equity yang dilakukan Monica, 2019, dengan judul Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia, dan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel NPL berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel NIM tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, Dari hasil pembahasan atas pengujian 5 hipotesis menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

Empirical gap pada penelitian ini adalah pada data ratio keuangan memiliki PT Bank SulutGo seperti CAR, NIM, LDR memiliki pengaruh pada ROE jika CAR, NIM, LDR mengalami perubahan maka akan mempengaruhi ROE tapi pada beberapa penelitian tidak memiliki pengaruh yaitu:

- a. Penelitian oleh Monica (2019) CAR, NIM, LDR tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)
- b. Penelitian oleh Ernawati (2011) CAR, LDR tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)

TINJAUAN PUSTAKA

Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri kasmir (2015:204). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (return on equity), yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham. Brigham & Houston (2011:133) Pengertian Return On Equity (ROE) menurut Sartono (2012:124) ROE yaitu: "Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar".

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:121) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber diluar bank.

Efisiensi Operasi (BOPO)

Dalam pernyataannya Dahlan Siamat (2001:153) menyatakan pengertian rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah: “Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.” Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya. Taswan 2010:167 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengidentifikasi efisiensi operasional bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank.

Non Performing Loan (NPL)

Menurut Wisnu Mawardi (2005:25) *Loan to Deposit Ratio* dapat diartikan sebagai berikut: “Rasio adanya kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari bank”. Menurut Dendawijaya (2003:49) pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah sebagai berikut:” Perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank”.

Net Interest Margin (NIM)

Rasio *net interest margin* merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan *interest margin* dengan *total loans*. Sehingga rasio *net interest margin* merupakan gambaran seberapa besar total pendapatan bunga yang diperoleh dari *total loans* yang diberikan. Penurunan persentase *interest margin* memberikan gambaran bahwa selama masa yang bersangkutan, bank tidak dapat mengoperasikan harta operasional yang menghasilkan (*bank earnings assets*) secara maksimal. Sebaliknya apabila *interest margin* mengalami peningkatan, bank tersebut dapat mengoperasikan harta operasionalnya secara maksimal (Sujoto, 1997:55).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to deposit Ratio (LDR) adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat kesehatan perbankan berdasarkan banyaknya pinjaman yang diberikan bank kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah yang disetorkan masyarakat dan modal bank itu sendiri. Rasio ini dinyatakan dalam persentase. Pemberian kredit diberikan oleh bank untuk menutupi *cost of found* dari bunga deposito dan tabungan. Pemberian pinjaman dalam jumlah besar atau LDR yang tinggi, diharapkan dapat menutup *cost of found* dan memberikan profit kepada pihak bank dari bunga pinjaman. Tetapi pemerintah telah mengatur jumlah maksimal rasio *loan to deposit* (LDR) disetiap bank, yaitu sebesar 110 %. Apabila suatu bank memiliki tingkat LDR diatas jumlah maksimal yang telah ditentukan oleh pemerintah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan LDR tidak baik karena memberikan pinjaman dalam jumlah yang terlalu banyak (Kasmir, 2012:225).

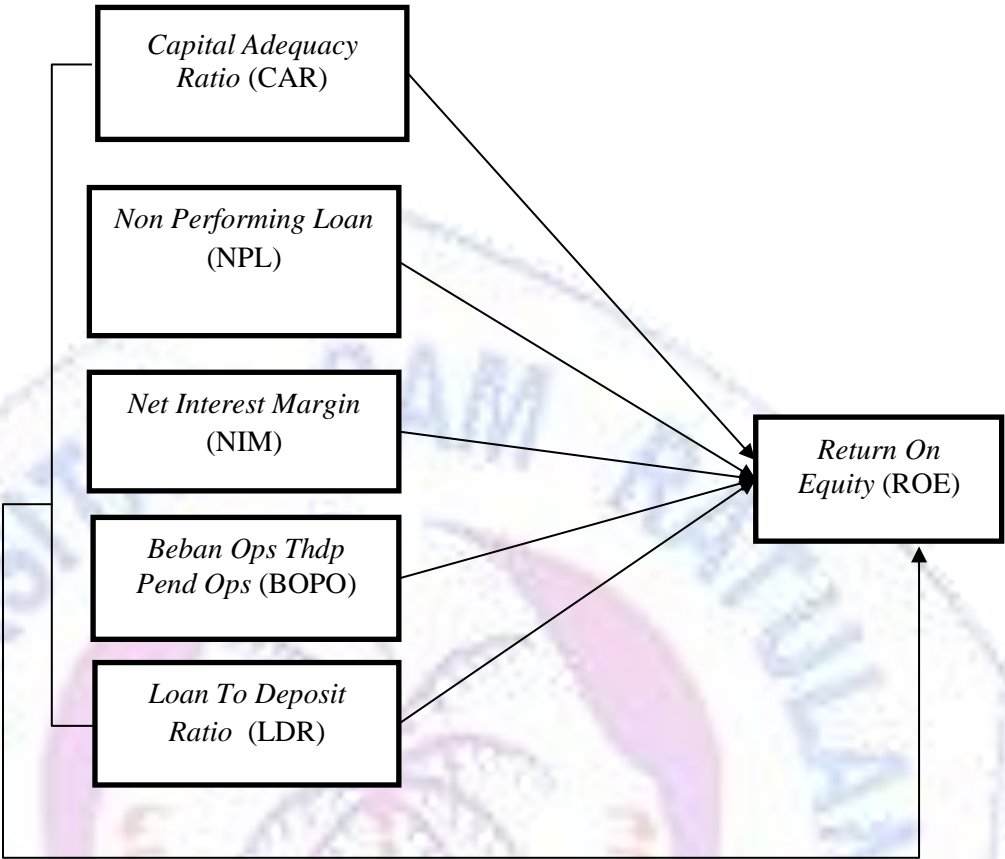
Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Monica, 2019, dengan judul Analisis Pengaruh CAR, NPL,NIM, BOPO dan LDR terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia, dan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel NPL berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel NIM tidak

berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, Dari hasil pembahasan atas pengujian 5 hipotesis menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan Erna Wati, 2011, dengan judul Analisis Pengaruh BOPO, NIM, GWM, LDR, PPAP Dan NPL Terhadap ROE Pada Bank Go Public Dan Non Go Public Di Indonesia, dan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan baik terhadap ROE pada bank go public maupun pada bank non go public. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan ROE baik pada bank go public maupun bank non go public harus melakukan pengelolaan aktivitas operasional bank yang efisien, NIM berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap ROE pada bank go public maupun pada bank non go public. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan ROE baik pada bank go public maupun bank non go public harus mampu untuk terus meningkatkan besarnya NIM, hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pada kinerja bank melalui pendapatan bunga bank, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada bank go public dan non go public. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan ROE, bank harus mampu mengelola LDR dengan terus menjaga besarnya LDR agar tetap berada dalam rentang 78%-110%, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada bank go public. Oleh karena itu dalam pemberian kredit, bank go public harus senantiasa selektif dan berhati-hati dalam memilih debitur pinjaman sehingga kredit yang telah disalurkan tersebut dapat terhindar dari kredit macet.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsan, Jasman Syarifuddin Hasibuan, Levi Nia Mapita, 2021, dengan judul Model Pengujian Faktor Determinan Return On Equity Pada Perusahaan Advertising, Printing dan Media Yang Terdaftar di BEI, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Return On Equity, Current Ratio, terhadap Return on Equity Pada Perusahaan Advertising, Printing & Media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:
 - Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio ada pengaruh yang signifikan terhadap Return on Equity dengan thitung -5% diketahui sebesar 1,677, nilai sig. sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian nilai thitung lebih besar dari ttabel (-1,62 > 1,677) dan nilai sig. (0,000 > 0,05), artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini memberikan makna bahwa tingginya Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan Return on Equity.
 - Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa Current Ratio ada pengaruh yang diketahui sebesar 1,677, nilai sig. sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,262 > 1,677) dan nilai sig. (0,000 > 0,05), artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini memberikan makna bahwa tingginya Current Ratio memiliki pengaruh dalam meningkatkan Return on Equity.
 - Hasil penelitian secara simultan membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio, Current Ratio ada pengaruh yang signifikan terhadap Return on Equity dengan nilai F hitung 9,386 dan F tabel 3,195 dan nilai sig. 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel (9,386 > 3,195) dan nilai sig. (0,000 < 0,05). H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus memperhatikan ketiga variabel bebas tersebut dalam menaikkan Return on Equity.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang hubungan dua atau lebih variabel, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian. (Burn & Grove, 2009 ; Notoatmodjo, 2010). Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh antara CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo
2. Terdapat pengaruh antara NPL (*Non Performing Loan*) terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo.
3. Terdapat pengaruh antara NIM (*Net Interest Margin*) terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo.
4. Terdapat pengaruh antara BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo
5. Terdapat pengaruh antara LDR (*Loan to Deposit Ratio*) terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo.
6. Terdapat pengaruh antara CAR (X₁), NPL (X₂), NIM (X₃), BOPO (X₄), dan LDR (X₅) secara bersama-sama terhadap ROE pada PT Bank SulutGo.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank SulutGo dan menggunakan data annual report PT Bank SulutGo berupa rasio rasio keuangan dan data yang diambil adalah annual report dari Tahun 2007 sampai dengan 2021 berupa rasio keuangan ROE, CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR.

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan variable-variabel yang telah dikemukakan, ada beberapa tahapan pengambilan data dalam penelitian ini. Tahapan tersebut adalah:

1. Studi Pustaka.

Data dikumpulkan untuk mendukung data yang telah dipublikasikan, literatur serta hasil penelitian lain untuk memperoleh gambaran umum yang berkaitan dengan bidang yang diteliti.

2. Pengumpulan Data Sekunder.

Data Sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan yang dipublikasikan serta yang diperoleh melalui dokumentasi yang dimiliki berbagai sumber dan dipilih sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Uji Kualitas Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak (Sumarsono, 2004: 40). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov.

Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal (Sumarsono, 2004 : 42) adalah:

- Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5%, maka distribusi adalah tidak normal.
- Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5%, maka distribusi adalah normal.

2. Uji Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu :

a. Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2002 : 61). Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi adalah uji Durbin Watson.

b. Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. (Ghozali, 2002 : 57). Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 , maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas (Ghozali, 2002 : 57-59)

c. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2002: 69). Alat uji yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu persamaan regresi dapat dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman.

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai *Sig (2-tailed)* $> 0,05$, maka hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau bebas Heteroskedastisitas (Santoso, 2001 : 301)

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda

Dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X_1 (CAR), X_2 (NPL), X_3 (NIM), X_4 (BOPO), X_5 (LDR), dengan variabel Y (ROE).

A. Koefisien determinasi

Menurut Sri Mulyono 2006:246 koefisien determinasi R^2 adalah suatu ukuran kesesuaian garis regresi *sample terhadap data*. untuk mengetahui proporsi variasi variabel x_1 (CAR), x_2 (NPL), x_3 (NIM), x_4 (BOPO), x_5 (LDR) terhadap variabel Y (ROE) secara bersama-sama atau dikenal dengan koefisien determinasi majemuk (R^2). Untuk menghitung R^2 digunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{n(a \sum Y + b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y + b_4 \sum X_4 Y + b_5 \sum X_5 Y) - (\sum Y)^2}{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

Pengujian Hipotesis

- Melakukan uji F untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan langkah pengujian sebagai berikut :
 - Merumuskan hipotesis
$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0 \dots\dots\dots \text{Tidak ada pengaruh}$$
$$H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0 \dots\dots\dots \text{Ada pengaruh}$$
 - Menentukan *level of significant* (α) sebesar 5%
 - Menghitung nilai F untuk mengetahui hubungan secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat
- Uji hipotesis yang dilakukan yaitu menggunakan uji t untuk menguji tingkat signifikan pengaruh beberapa variabel secara parsial.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah lima variabel bebas dan satu variabel terikat. Kelima variabel bebas tersebut adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (X_1), NPL (*Non Performing Loan*) (X_2), NIM (*Net Interest Margin*) (X_3), BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) (X_4), LDR (*Loan to Deposit Ratio*) (X_5). Sedangkan yang dijadikan sebagai variabel terikatnya adalah ROE (*Return On Equity*) (Y), sebagai berikut :

Periode Desember 2007 – Desember 2021						
Tahun	CAR (X1)	NPL (X2)	NIM (X3)	BOPO (X4)	LDR (X5)	ROE (Y)
2007	12,52	0,42	10,30	84,84	74,50	23,55
2008	15,29	0,31	10,18	84,68	88,74	27,28
2009	15,67	0,15	8,40	89,84	100,25	19,68
2010	10,60	0,19	11,64	85,09	104,98	32,46
2011	12,71	0,31	8,46	84,96	99,78	32,02
2012	18,76	0,13	8,66	77,66	108,88	39,86
2013	17,27	0,21	11,17	75,53	112,94	36,92
2014	14,26	0,93	9,72	81,52	90,10	23,16
2015	13,79	0,55	9,18	87,35	103,62	20,10
2016	17,11	0,50	9,25	86,68	111,85	21,02
2017	16,61	0,52	9,60	81,79	96,35	24,45
2018	16,49	1,62	8,24	82,14	102,87	18,84
2019	15,82	0,39	6,99	86,67	101,59	13,27
2020	15,19	1,88	7,42	89,34	91,28	13,28
2021	16,41	1,79	7,23	86,89	83,47	12,89

Sumber : Annual Report PT. Bank SulutGo Tahun 2007 s/d 2021

Setelah data diperoleh, kemudian diperiksa dan dihitung dengan menggunakan rumus yang disesuaikan dengan jenis variabel yang digunakan. Hasil perhitungan ini selanjutnya dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer. Program yang digunakan untuk menganalisis data adalah program serial statistik *EViews 12*.

Hasil Penelitian.

Regresi Linier Berganda

Hasil Regresi Linear Berganda “*LS – Least Squared (NLS and ARMA)*”

Dependent Variable: Y					
Method: Least Squares					
Date: 10/19/22 Time: 16:12					
Sample: 2007 2021					
Included observations: 15					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	138.8960	58.59675	2.370370	0.0419	
X1	-0.838069	0.855513	-0.979610	0.3529	
X2	-5.158267	2.572001	-2.005546	0.0759	
X3	0.441952	1.456101	0.303517	0.7684	
X4	-1.335924	0.453154	-2.948056	0.0163	
X5	0.100274	0.135623	0.739360	0.4785	
R-squared	0.811962	Mean dependent var		23.91867	
Adjusted R-squared	0.707497	S.D. dependent var		8.404886	
S.E. of regression	4.545660	Akaike info criterion		6.155397	
Sum squared resid	185.9672	Schwarz criterion		6.438617	
Log likelihood	-40.16548	Hannan-Quinn criter.		6.152380	
F-statistic	7.73554	Durbin-Watson stat		1.520379	
Prob(F-statistic)	0.004368				

Interpretasi Output :

Setelah data selesai diolah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$
 $Y (ROE) = \beta_0 - \beta_1 (CAR) - \beta_2 (NPL) + \beta_3 (NIM) - \beta_4 (BOPO) + \beta_5 (LDR) + e$
 $Y = 138.8960 - 0.838069(x_1) - 5.158267(x_2) + 0.441952(x_3) - 1.335924(x_4) + 0.100274(x_5) + e$

Dari data di atas, variable X2 dan X4 yang memberikan p-value yang lebih kecil dari 10% (0,10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR (X₁) berpengaruh tidak berpengaruh terhadap ROE (Y), variabel NPL (X₂) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE (Y), variabel NIM (X₃) tidak berpengaruh terhadap ROE (Y), variabel BOPO (X₄) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE (Y), variabel LDR (X₅) tidak berpengaruh terhadap ROE (Y).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan dengan multikolinieritas, dan autokorelasi, yaitu sebagai berikut :

1. Autokorelasi
Hasil Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.411530	Prob. F(2,7)	0.6777
Obs*R-squared	1.578143	Prob. Chi-Square(2)	0.4543

Sumber : Data Olahan Eviews 12

Hasil output diatas nilai Prob *Chi Square* (2) yang merupakan nilai *p value* (Probabilitas) uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* memiliki nilai sebesar 0.4543 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat *alpha* (0.4543 > 0.05) sehingga H₁ ditolak, dan H₀ diterima atau yang berarti data tidak terjangkit masalah autokorelasi.

2. Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

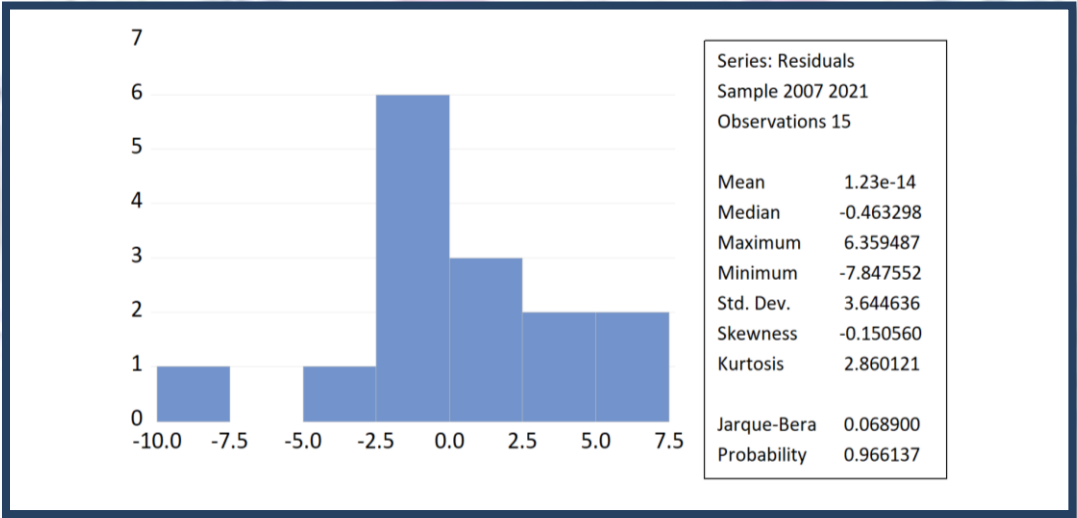
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1	1	0.133021	-0.36874	-0.37455	0.34538	-0.0063
X2	0.133021	1	-0.54045	0.265113	-0.37559	-0.6569
X3	-0.36874	-0.54045	1	-0.45661	0.127522	0.659276
X4	-0.37455	0.265113	-0.45661	1	-0.32794	-0.73081
X5	0.34538	-0.37559	0.127522	-0.32794	1	0.412678
Y	-0.0063	-0.6569	0.659276	-0.73081	0.412678	1

Sumber: Data Olahan Eviews 12

Ketentuan : Jika nilai output < 1 maka tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 4.3.3.b, nilai output dari variabel total CAR (X1), NPL (X2), NIM (X3), BOPO (X4), LDR (X5) semuanya lebih kecil dari 1. Oleh karena itu hasilnya adalah tidak terjadi multikolinieritas karena semua data lebih kecil dari 1

3. Uji Asumsi Normalitas



Sumber: Hasil Olah software Eviews 12

Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai probabilitas $pp \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi. Berdasarkan Tabel 4.3.3.c, Nilai $pp = 0.966137 \geq 0,05$ sehingga **asumsi Normalitas tercapai**. Atau data terdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Heteroskedasticity Test: White

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.485316	Prob. F(5,9)	0.0499
Obs*R-squared	9.891507	Prob. Chi-Square(5)	0.0784
Scaled explained SS	3.311892	Prob. Chi-Square(5)	0.6520

Sumber: Data Olahan Eviews 12

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 5%), maka ada inidikasi terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan table 4.3.3.d dapat disimpulkan **Terima H_0** atau “tidak terjadi gejala heteroskedastisitas”, karena Prob. Chi-Square **0,0784 > 0.05**.

Koefisien Determinasi
Hasil Koefisien Determinasi
antara Variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dengan Variabel Y

R-squared	0.811962	Mean dependent var	23.91867
Adjusted R-squared	0.707497	S.D. dependent var	8.404886
S.E. of regression	4.545660	Akaike info criterion	6.155397
Sum squared resid	185.9672	Schwarz criterion	6.438617
Log likelihood	-40.16548	Hannan-Quinn criter.	6.152380
F-statistic	7.772554	Durbin-Watson stat	1.520379
Prob(F-statistic)	0.004368		

Sumber: Data Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.3.4a pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai (r^2) sebesar 0.811962 atau 81.19%, hal ini berarti variabilitas ROE Pada PT Bank SulutGo dipengaruhi oleh CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR sebesar 81.19%, sedangkan sisanya sebesar 18.81% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini tidak diteliti oleh penulis.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 10/19/22 Time: 16:12				
Sample: 2007 2021				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	138.8960	58.59675	2.370370	0.0419
X1	-0.838069	0.855513	-0.979610	0.3529
X2	-5.158267	2.572001	-2.005546	0.0759
X3	0.441952	1.456101	0.303517	0.7684
X4	-1.335924	0.453154	-2.948056	0.0163
X5	0.100274	0.135623	0.739360	0.4785

Sumber: Data Olahan Eviews 12

Dari data table 4.3.5.1 di atas, variable X_2 dan X_4 yang memberikan p-value yang lebih kecil dari 10% (0,10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR (X_1) tidak berpengaruh terhadap ROE (Y), variabel NPL (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE (Y), variabel NIM (X_3) tidak berpengaruh terhadap ROE (Y), variabel BOPO (X_4) berpengaruh signifikan negative terhadap ROE (Y), variabel LDR (X_5) tidak berpengaruh terhadap ROE (Y).

Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F)
Hasil Uji Simultan F

R-squared	0.811962	Mean dependent var	23.91867
Adjusted R-squared	0.707497	S.D. dependent var	8.404886
S.E. of regression	4.545660	Akaike info criterion	6.155397
Sum squared resid	185.9672	Schwarz criterion	6.438617
Log likelihood	-40.16548	Hannan-Quinn criter.	6.152380
F-statistic	7.772554	Durbin-Watson stat	1.520379
Prob(F-statistic)	0.004368		

Sumber: Data Olahan Eviews 12

Hipotesis nol ditolak apabila p-value lebih kecil dari 10%. Dalam hal ini keputusan yang diharapkan adalah tolak H_0 .

Pada output di atas, diperoleh Prob (F-statistic) atau p-value lebih kecil dari 0.10. atau 0.004368

Keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) terhadap variabel dependen (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (X_1), NPL (*Non Performing Loan*) (X_2), NIM (*Net Interest Margin*) (X_3), BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) (X_4) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) (X_5) secara bersama-sama Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Pada pengujian F, diperoleh Prob (F-statistic) atau p-value lebih kecil dari 0.1 atau 0.004368

maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (X_1), NPL (*Non Performing Loan*) (X_2), NIM (*Net Interest Margin*) (X_3), BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) (X_4) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) (X_5) secara bersama-sama Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) bahwa dari hasil pembahasan atas pengujian 5 hipotesis menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

2. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*) Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.3529) > \alpha (0.1)$

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) yaitu dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia

Hal ini karena CAR merupakan rasio yang hanya melihat seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

3. Pengaruh NPL (*Non Performing Loan*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh secara negatif terhadap ROE (*Return On Equity*). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.0759) < \alpha (0.1)$ dengan nilai koefisien regresi memiliki hubungan negatif 5.158267, artinya ketika meningkat sebesar 1 satuan, maka Persentase ROE (Y) akan menurun sebesar 5.158267 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati dengan hasil NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada bank go public. Oleh karena itu dalam pemberian kredit, bank go public harus senantiasa selektif dan berhati-hati dalam memilih debitur pinjaman sehingga kredit yang telah disalurkan tersebut dapat terhindar dari kredit macet. Juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) bahwa variabel NPL berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia Hal ini karena jika terjadi peningkatan NPL maka perusahaan mengalami 2 kerugian yaitu tidak mendapatkan pendapatan bunga dan juga harus membentuk cadangan untuk tiap penurunan kolektibilitas kredit yang akan mengurangi profit sehingga tiap kenaikan NPL berpengaruh negatif terhadap ROE.

4. Pengaruh NIM (*Net Interest Margin*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa NIM (*Net Interest Margin*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.7684) > \alpha (0.1)$

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) yaitu dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel NIM tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

Tapi tidak sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati dengan hasil NIM berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap ROE pada bank go public maupun pada bank non go public.

Hal ini karena NIM hanya melihat dari selisih antar suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

5. Pengaruh BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*) berpengaruh secara negatif terhadap ROE (*Return On Equity*). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.0163) > \alpha (0.1)$ dengan nilai koefisien regresi memiliki hubungan negatif 1.335924, artinya ketika meningkat sebesar 1 satuan, maka Persentase ROE (Y) akan menurun sebesar 1.335924 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) yaitu dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan baik terhadap ROE pada bank go public maupun pada bank non go public. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan ROE baik pada bank go public maupun bank non go public harus melakukan pengelolaan aktivitas operasional bank yang efisien.

Hal ini karena jika terjadi efisiensi biaya maka profit akan meningkat tapi jika terjadi kenaikan biaya maka akan mengurangi profit sehingga setiap kenaikan BOPO akan berpengaruh negatif terhadap ROE.

6. Pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.4785) > \alpha (0.1)$

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica (2019) yaitu dari hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia.

Tapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada bank go public dan non go public.

Hal ini karena LDR hanya melihat perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (X_1), NPL (*Non Performing Loan*) (X_2), NIM (*Net Interest Margin*) (X_3), BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) (X_4) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) (X_5) secara bersama-sama berpengaruh Terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo.
2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo. Hal ini karena CAR merupakan rasio yang hanya melihat seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.
3. NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo. Hal ini karena jika terjadi peningkatan NPL maka perusahaan mengalami 2 kerugian yaitu tidak mendapatkan pendapatan bunga dan juga harus membentuk cadangan untuk tiap penurunan kolektibility kredit yang akan mengurangi profit sehingga tiap kenaikan NPL berpengaruh negatif terhadap ROE.
4. NIM (*Net Interest Margin*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*) pada PT Bank SulutGo. Hal ini karena NIM hanya melihat dari selisih antar suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.
5. BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo. Hal ini karena jika terjadi efisiensi biaya maka profit akan meningkat tapi jika terjadi kenaikan biaya maka akan mengurangi profit sehingga setiap kenaikan BOPO akan berpengaruh negatif terhadap ROE.
6. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return On Equity*) Pada PT Bank SulutGo. Hal ini karena LDR hanya melihat perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Saran kebijakan

Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak manajemen perlu memberikan perhatian yang khusus mengenai BOPO agar perusahaannya selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa menghasilkan laba yang maksimal, karena jika biaya dilakukan penghematan maka akan berpengaruh pada laba perusahaan.
2. Hendaknya pihak manajemen perlu memperhatikan besarnya NPL karena bank dengan aset yang besar perlu mengelola asetnya dengan baik dengan terus menjaga besarnya NPL, karena jika terjadi kredit macet maka perusahaan mengalami 2 kerugian yaitu tidak mendapatkan pendapatan bunga dan juga harus membentuk cadangan untuk tiap penurunan kolektibility kredit.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan atau mengganti variabel *independen* yang terkait dalam penelitian ini seperti net Profit (laba), Pendapatan, Biaya serta memakai jangka waktu yang lebih panjang sehingga nantinya memperoleh hasil yang lebih dapat digeneralisasikan.

Implikasi Penelitian

1. Non Performing Loan (NPL) merupakan faktor yang mempengaruhi Return On Equity (ROE) semakin tinggi NPL maka akan mempengaruhi secara negatif pada ROE atau ROE akan turun dan jika NPL turun maka ROE akan naik. Oleh karena itu Bank SulutGo harus menurunkan NPL atau kredit bermasalah dengan melakukan penagihan atau lelang jaminan, karena jika terjadi kredit macet maka perusahaan mengalami 2 kerugian yaitu tidak mendapatkan pendapatan bunga dan juga harus membentuk cadangan untuk tiap penurunan kolektibility kredit.
2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) karena jika BOPO naik maka akan mempengaruhi secara negatif terhadap ROE atau ROE akan turun begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu Bank SulutGo harus melakukan efisiensi biaya agar bisa menghasilkan laba

yang maksimal, karena jika biaya dilakukan penghematan maka akan berpengaruh positif pada laba perusahaan yang juga berpengaruh pada ROE

DAFTAR PUSTAKA

- Bank of International Settlement. 2011. *About Bank of International Settlement (BIS)*. <http://www.bis.org/about/index.htm>
- Bank Indonesia. 2011. *Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko Untuk Resiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar*.
- Bank Indonesia. 2022. *Laporan Perekonomian Indonesia, Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022: Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Menjaga Stabilitas*.
- Bahri Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. USA: McGraw-Hill/Irwin
- Ernawati. 2011. *Analisis Pengaruh BOPO, NIM, GWM, LDR, PPAP Dan NPL Terhadap ROE Pada Bank Go Public Dan Non Go Public Di Indonesia Periode Tahun 2007-2009*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Hunger, J.David & Thomas.L.Weelen. (2002). *Manajemen Strategis. Edisi 2*. Andi.Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syari. 2007. *Teori Akuntansi Edisi revisi*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada
- Hays, Fred H.Stephen A.De Lurgio, &Arthur H, GillbertJr. 2009. " *Efficiency Ratios and Community Bank Performance.*" *Journal of Finance and Accountancy*. <http://www.proquest.com/pqdweb>
- Jhingan, M, L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. New Delhi : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi revisi). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Monica. 2019. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO Dan LDR Terhadap ROE Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Tarumanagara.
- Muhammad Irsan, Jasman Syarifuddin Hasibuan, Levi Nia Mapita. 2021. *Model Pengujian Faktor Determinan Return On Equity Pada Perusahaan Advertising, Printing, dan Media yang terdaftar di BEI*. Medan : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- Nano Prawoto dan Agus Tri Basuki. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. *Laporan Triwulan II 2022 : Penguatan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan Melalui Perlindungan Konsumen Yang Optimal*.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan FEUI
- Sudrajat. 1988. *Mengenal Ekonometrika Pemula*, Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit CV Ari-Nico.
- Sugiono, Arief & Edy Untung. 2008. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : PT.Grasindo
- Sujoto, Siswanto. 1997. *Manajemen Terapan Bank*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vecky A. J. Masinambow, Tri Oldy Rotinsulu. 2021. *The Effect of Inflation Perception, Interest Rate, Investment Knowledge and Risk, On Customer Decisions to Invest in Bank BTN Manado Branch Office*. Manado : Universitas Sam Ratulangi
- Wahyudi Tri Setyo. 2020. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Weygandt, Jerry J, Donald E.Kieso & Paul D.Kimmel. 2010. *Accounting Principles*. USA :
John Wiley & Sons, inc.

